



**PENGADILAN TINGGI
YOGYAKARTA**

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA TAHUN 2022

**Jl. Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH.,
Wojo, Bangunharjo, Sewon, Bantul,
D.I. Yogyakarta - 55187
Telp. (0274) 4396412, Fax. (0274) 4396415
Website : www.pt-yogyakarta.go.id**

PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA

PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA
JL. PROF. DR. WIRJONO PRODJODIKORO, S.H. WOJO, BANGUNHARJO
SEWON, BANTUL, YOGYAKARTA - 55187
TELP. (0274) 4396412, FAX. (0274) 4396415



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA

2022

© 2022 Pengadilan Tinggi Yogyakarta

Jl. Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH., Wojo, Bangunharjo, Sewon, Bantul, D.I.Yogyakarta – 55187

Telp. (0274) 4396412, Fax. (0274) 4396415, Email: pt.yogya@gmail.com

Website: www.pt-yogyakarta.go.id

4 (EMPAT) PILAR PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA



SETYAWAN HARTONO, S.H., M.H
Ketua



Wakil Ketua



RIO KUNITIAS AMBARSAKTI, S.H.
Panitera



DEDY SULAKSONO, S.H., M.M.
Sekretaris

4 (EMPAT) PILAR PENGADILAN NEGERI, TINDAK PIDANA KORUPSI DAN HUBUNGAN INDUSTRIAL YOGYAKARTA KLAS I.A



MUH. DJAUHAR SETYADI, S.H., M.H
Ketua



MUJIONO, S.H., M.H.
Wakil Ketua



ABDUL KADIR RUMODAR, S.H.
Panitera



TASIMAN, S.H., M.H
Sekretaris

4 (EMPAT) PILAR PENGADILAN NEGERI SLEMAN KLAS I.A



IKHWAN HENDRATO, S.H., M.H.
Ketua



AMINUDDIN, S.H., M.H.
Wakil Ketua



H ATING BUDIMAN, S.H., M.H.
Panitera



NUR YUSUF IRAWAN, S.T.
Sekretaris

4 (EMPAT) PILAR PENGADILAN NEGERI BANTUL KLAS I.B



**SUNOTO, S.H.M.H.,
Ketua**



**KURNIAWAN WIJONARKO, S.H.M.Hum
Wakil Ketua**



**KASPENDI SEMBIRING, S.H
Panitera**



**YUYUN FITHRIYAH, SE. Ak.
Sekretaris**

4 (EMPAT) PILAR PENGADILAN NEGERI WATES KLAS I.B



JENI NUGRAHA DJULIS, S.H., M.Hum.
Ketua



ANDRI SUFARI, S.H., M.Hum..
Wakil Ketua



ISTIKO DWI WIDODO, S.H.
Panitera



WIRATNO, S.H.
Sekretaris

4 (EMPAT) PILAR PENGADILAN NEGERI WONOSARI KLAS II



**Y.F. TRI JOKO GANTAR
PAMUNGKAS, S.H., M.H.
Ketua**



**ANNISA NOVIYATI, S.H., M.H.Li.
Wakil Ketua**



**SAIDUL AMNI, S.H., M.H.
Panitera**



**NURHIDAYAT, S.H.
Sekretaris**

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan berkah dan rahmat-NYA sehingga Laporan Pelaksanaan Kegiatan se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Yogyakarta Tahun 2022 ini dapat kami sajikan.

Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Yogyakarta Tahun 2022 ini disusun berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor 143/KMA/SK/VII/2007 tentang Memberlakukan Buku I pada bagian ketiga (Prosedur Penyampaian Laporan Pelaksanaan Kegiatan) dan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 2876/SEK/OT.01.1/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 Perihal Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022.

Laporan ini menguraikan secara deskriptif tentang pelaksanaan tugas Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan Pengadilan Negeri se D.I. Yogyakarta Tahun 2022 yang meliputi tugas pokok dan tugas penunjang yaitu bidang teknis yustisial, administrasi kepaniteraan, kesekretariatan, bidang pengawasan serta bidang pembangunan sarana prasarana fisik, pengembangan Teknologi Informasi dan Perbaikan Sistem dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga kepercayaan publik terhadap Lembaga Peradilan terwujud. Hal tersebut selaras dengan tujuan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan mempercepat tercapainya Visi Mahkamah Agung RI.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini disajikan dengan harapan dapat memberikan manfaat dan informasi serta sebagai bahan evaluasi yang berguna bagi seluruh badan peradilan di Indonesia khususnya Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan Pengadilan Negeri se - D.I. Yogyakarta dalam rangka mewujudkan lembaga Peradilan Yang Agung.

Yogyakarta, 25 Januari 2023

Ketua
Pengadilan Tinggi Yogyakarta

SETYAWAN HARTONO, S.H., M.H
NIP. 195804011984031004

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GRAFIK.....	x
DAFTAR GAMBAR	xi
LAMPIRAN	xv
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Sejarah Pengadilan Tinggi Yogyakarta	5
C. Visi Misi dan Tujuan	6
D. Program Kerja	6
E. Rencana Strategis.....	7
BAB II. MANAJEMEN PERADILAN UMUM	9
A. Keadaan Perkara di Peradilan Umum di Wilayah D.I Yogyakarta	9
J Keadaan Perkara di Pengadilan Tinggi Yogyakarta	9
J Keadaan Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama	13
J Keadaan Perkara di Pengadilan Tingkat Banding	17
J Keadaan Perkara di Pengadilan Tingkat Kasasi	19

J	Keadaan Perkara di Pengadilan Tingkat Peninjauan Kembali.	21
B.	Penyelesaian Perkara	22
J	Jumlah Sisa Perkara Yang Diputus	22
J	Jumlah Perkara Yang Diputus Tepat Waktu	24
J	Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi, dan PK	27
J	Jumlah Perkara Perdata Yang Berhasil di Mediasi.....	29
J	Jumlah Perkara Anak Yang Berhasil Melalui Diversi.....	29
C.	Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikasi ISO Pengadilan).....	30
J	Pos Bantuan Hukum (Posbakum)	30
J	Sidang Keliling / Pelayanan Terpadu.....	31
J	Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara).....	32
BAB III.	SUMBER DAYA MANUSIA	34
A.	Komposisi Sumber Daya Manusia Berdasarkan Kepadangan/Golongan/Pendidikan	34
J	Mutasi	35
J	Promosi.....	36
J	Pensiun.....	36
J	Diklat.....	37
BAB IV.	PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA DAN TEKNOLOGI INFORMASI.....	38
A.	Pengelolaan Keuangan	38
B.	Pengelolaan Sarana dan Prasarana.....	61
C.	Pengelolaan Teknologi Informasi	77
J	Implementasi e-court di lingkungan peradilan umum	79
J	Implementasi SIPP di lingkungan peradilan umum	81

BAB V.	PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK	91
	A. Akreditasi Penjaminan Mutu	91
	B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	94
	C. Zona Integritas Menuju WBK/WBBM	95
	D. Inovasi Pelayanan Publik	96
	E. Kegiatan Pelayanan Lainnya	122
BAB VI.	PENGAWASAN	125
	A. Internal.....	125
	B. Evaluasi	126
BAB VII.	PENUTUP	128
	A. Kesimpulan	128
	B. Rekomendasi	129

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Keadaan Perkara Peradilan Umum di Wilayah D.I. Yogyakarta Tahun 2022.....	8
Tabel 2.2. Keadaan perkara di Pengadilan Tinggi Yogyakarta Tahun 2022.....	8
Tabel 2.3. Keadaan Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama Se D.I. Yogyakarta Tahun 2022	13
Tabel 2.4. Keadaan Perkara Perdata di Pengadilan Tingkat Pertama Se D.I. Yogyakarta Tahun 2022	14
Tabel 2.5. Keadaan Perkara Pidana di Pengadilan Tingkat Pertama Se D.I. Yogyakarta Tahun 2022	15
Tabel 2.6. Statistik Aktivasi E-Court Pengadilan Negeri se Wil D.I. Yogyakarta Tahun 2022	17
Tabel 2.7. Keadaan Perkara Perdata Banding di Pengadilan Tingkat Pertama Se D.I. Yogyakarta Tahun 2022	17
Tabel 2.8. Keadaan Perkara Pidana Banding di Pengadilan Tingkat Pertama Se D.I. Yogyakarta Tahun 2022	18
Tabel 2.9. Keadaan Perkara Perdata Kasasi di Pengadilan Tingkat Pertama Se D.I. Yogyakarta Tahun 2022	19
Tabel 2.10. Keadaan Perkara Pidana Kasasi di Pengadilan Tingkat Pertama Se D.I. Yogyakarta Tahun 2022	20
Tabel 2.11. Keadaan Perkara Perdata Peninjauan Kembali Tahun 2022	21
Tabel 2.12. Keadaan Perkara Pidana Peninjauan Kembali Tahun 2022	21
Tabel 2.13. Jumlah Sisa Perkara Perdata Tahun 2021 Yang Diputus Tahun 2022	22
Tabel 2.14. Jumlah Sisa Perkara Pidana Tahun 2021 Yang Diputus Tahun 2022	23
Tabel 2.15. Perkara Perdata Tingkat Pertama Yang Diputus Tepat Waktu Tahun 2022	25

Tabel 2.16. Perkara Pidana Tingkat Pertama Yang Diputus Tepat Waktu Tahun 2022	26
Tabel 2.17. Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Tahun 2022	27
Tabel 2.18. Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2022	28
Tabel 2.19. Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Peninjauan Kembali Tahun 2022	29
Tabel 2.20. Jumlah Perkara Perdata Yang Berhasil Di Mediasi Tahun 2022	29
Tabel 2.21. Jumlah Perkara Anak Yang Berhasil Diversi Tahun 2022	30
Tabel 2.22. Statistik Posbakum Pengadilan Negeri Se Wilayah DI Yogyakarta Tahun 2022	30
Tabel 2.23. Statistik Perkara Prodeo Pengadilan Negeri Se Wilayah DI Yogyakarta Tahun 2022	32
Tabel 3.1. Rekapitulasi Jumlah Sumber Daya Manusia pada Peradilan Umum Di Wilayah DI Yogyakarta Tahun 2022.....	34
Tabel 3.2. Rekapitulasi Mutasi Hakim dan Pegawai Tahun 2022	36
Tabel 3.3. Rekapitulasi Promosi Hakim dan Pegawai Tahun 2022	36
Tabel 3.4. Rekapitulasi Pensiun Hakim dan Pegawai Tahun 2022	36
Tabel 3.5. Rekapitulasi Diklat Hakim dan Pegawai Tahun 2022	37
Tabel 4.1. Rekapitulasi Realisasi Penyerapan Anggaran DIPA pada Peradilan Umum Se Wilayah D.I. Yogyakarta TA 2020 dan TA 2022	40
Tabel 4.2. Rekapitulasi Realisasi Penyerapan Anggaran DIPA PT Yogyakarta TA 2021 dan TA 2022	41
Tabel 4.3. Rekapitulasi Realisasi Penyerapan Anggaran DIPA PN Yogyakarta TA 2021 dan TA 2022	43
Tabel 4.4. Rekapitulasi Realisasi Penyerapan Anggaran DIPA PN Sleman TA 2021 dan TA 2022	48
Tabel 4.5. Rekapitulasi Realisasi Penyerapan Anggaran DIPA PN Wates TA 2021 dan TA 2022	50

Tabel 4.6.	Rekapitulasi Realisasi Penyerapan Anggaran DIPA PN Bantul TA 2021 dan TA 2022	53
Tabel 4.7.	Rekapitulasi Realisasi Penyerapan Anggaran DIPA PN Wonosari TA 2021 dan TA 2022	56
Tabel 4.8.	Rekapitulasi Prosentase Kenaikan Realisasi Anggaran DIPA 01 Peradilan Umum Se Wilayah D.I. Yogyakarta TA 2022	58
Tabel 4.9.	Rekapitulasi Prosentase Kenaikan Realisasi Anggaran DIPA 03 Peradilan Umum Se Wilayah D.I. Yogyakarta TA 2022	58
Tabel 4.10.	Rekapitulasi Pagu Awal dan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) DIPA 01 BUA Pada Peradilan Umum Se Wilayah D.I. Yogyakarta TA 2022	59
Tabel 4.11.	Rekapitulasi Pagu Awal dan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) DIPA 03 BADILUM Pada Peradilan Umum Se Wilayah D.I. Yogyakarta TA 2022	59
Tabel 4.12.	Alokasi dan Realisasi Anggaran Khusus Penanganan Covid-19 Pada Peradilan Umum Se Wilayah D.I. Yogyakarta TA 2022	61
Tabel 4.13.	Daftar Tanah dan Bangunan Gedung Tahun 2022	61
Tabel 4.14.	Daftar Rumah Negara Tahun 2022	62
Tabel 4.15.	Daftar Kendaraan Dinas Roda 2 Tahun 2022	62
Tabel 4.16.	Daftar Kendaraan Dinas Roda 4 Tahun 2022	63
Tabel 4.17.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Tahun 2022	64
Tabel 4.18.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Tahun 2022	64
Tabel 4.19.	Penghapusan Sarana dan Prasarana Gedung Tahun 2022	65
Tabel 4.20.	Keadaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung Tahun 2022	66
Tabel 4.21.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung Tahun 2022 ...	67
Tabel 4.22.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung Tahun 2022..	69
Tabel 4.23.	Penghapusan Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung Tahun 2022..	70
Tabel 4.24.	Keadaan Teknologi Informasi dan Pendukungnya Tahun 2022	78
Tabel 4.25.	Keadaan Verifikasi Advokat Pada Aplikasi E-Court Pengadilan Tinggi Yogyakarta	79

Tabel 4.26. Jumlah Perkara Di Wilayah D.I. Yogyakarta Yang didaftarkan Melalui E-Court Tahun 2022	79
Tabel 4.27. Alamat SIPP Pengadilan Negeri Se Wilayah D.I. Yogyakarta	81
Tabel 5.1. Hasil Penilaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Tahun 2018 - 2020	123

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1.	Keadaan Perkara di Pengadilan Tinggi Yogyakarta Tahun 2022...	9
Grafik 2.2.	Klasifikasi Perkara Pidana Biasa di Pengadilan Tinggi Yogyakarta Tahun 2022.....	10
Grafik 2.3.	Presentase Perkara Pidana Anak Berdasarkan Klasifikasi Perkara di Pengadilan Tinggi Yogyakarta Tahun 2022	11
Grafik 2.4.	Jumlah Perkara Perdata Berdasarkan Klasifikasi Perkara di Pengadilan Tinggi Yogyakarta Tahun 2022	12
Grafik 2.5.	Klasifikasi Perkara Tipikor di Pengadilan Tinggi Yogyakarta Tahun 2022.....	12
Grafik 3.1.	Rekapitulasi Jumlah Sumber Daya Manusia pada Peradilan Umum Di Wilayah DI Yogyakarta Tahun 2022.....	34
Grafik 3.2.	Rekapitulasi Hakim dan Pegawai Berdasarkan Golongan pada Peradilan Umum Di Wilayah DI Yogyakarta Tahun 2022.....	35
Grafik 3.3.	Rekapitulasi Jumlah Hakim dan Pegawai Berdasarkan Pendidikan pada Peradilan Umum Di Wilayah DI Yogyakarta Tahun 2022.....	35
Grafik 5.1.	Nilai LKjIP Pada Peradilan Umum Se Wilayah D.I. Yogyakarta Periode 2018- 2021	123

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1. Thermogun dan Thermodetector	71
Gambar 4.2. Pemasangan Washtafel dan Sabun Cuci Tangan	71
Gambar 4.3. Penyediaan dan Pemasangan Handsanitizer	72
Gambar 4.4. Droplet Protector atau Penyekat Akrilik PTSP dan Ruang Sidang	72
Gambar 4.5. Petugas Menggunakan Face Shield	73
Gambar 4.6. Pemasangan Kursi Berjarak Pada Lobi dan R. Tunggu	73
Gambar 4.7. Desinfektan Aerosol untuk Berkas dan Alat Ozonisasi	74
Gambar 4.8. Sarana Edukasi Seperti Leaflet, Banner dan Poster	74
Gambar 4.9. Pemeriksaan Suhu Pengunjung	75
Gambar 4.10. Penyemprotan Desinfektan dan Ozonisasi	75
Gambar 4.11. Pelaksanaan Rapid Test dan Swabtest	76
Gambar 4.12. Pelaksanaan Persidangan Secara Daring/Online Di Pengadilan Negeri	76
Gambar 4.13. Pelaksanaan Vaksinasi	77
Gambar 4.14. Server Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Se Wilayah D.I. Yogyakarta	78
Gambar 4.15. Pojok E-Court Corner Pada Peradilan Umum Se Wilayah D.I. Yogyakarta	80
Gambar 4.16. Tampilan SIPP Web Pengadilan Negeri	81
Gambar 4.17. Tampilan SIPP Web Pengadilan Tingkat Banding	82
Gambar 4.18. Tampilan Direktori Putusan Web Pengadilan Tinggi Yogyakarta	82
Gambar 4.19. Tampilan Web Aplikasi Eraterang Peradilan Tingkat Pertama Yogyakarta	83
Gambar 4.20. Tampilan Web Aplikasi Monitoring SIPP Peradilan Tingkat Pertama Yogyakarta	84

Gambar 4.21. Tampilan Web Aplikasi Komdanas bagi Semua Peradilan ..	84
Gambar 4.22. Tampilan Web Aplikasi SIKEP bagi Semua Peradilan	85
Gambar 4.23. Tampilan Web Aplikasi Monev Smart Semua Peradilan	85
Gambar 4.24. Tampilan Web Aplikasi SIMARI bagi Semua Peradilan	85
Gambar 4.25. Tampilan Web Aplikasi SIMPONI	86
Gambar 4.26. Tampilan Web Aplikasi OMSPAN	86
Gambar 4.27. Tampilan Web Aplikasi MONEV BAPPENAS PP.39	87
Gambar 4.28. Tampilan Web Aplikasi SAKTI Kemenkeu	87
Gambar 4.29. Tampilan Web Aplikasi Sipanah Hati	88
Gambar 4.30. Tampilan Web Aplikasi Angkringan	89
Gambar 4.31. Tampilan Formulir Digital e-Primari	89
Gambar 4.32. Tampilan Aplikasi e-Mosa	90
Gambar 4.33. Tampilan Aplikasi e-Berpadu	90
Gambar 5.1. Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Umum Se Wilayah D.I. Yogyakarta	93
Gambar 5.2. Sertifikasi Predikat WBK dan WBBM Peradilan Umum Se Wilayah D.I. Yogyakarta	96
Gambar 5.3. Aplikasi Angkringan Pengadilan Tinggi Yogyakarta	97
Gambar 5.4. Aplikasi Sipanah Hati Pengadilan Tinggi Yogyakarta	97
Gambar 5.5. Tampilan Aplikasi e-Primari dan e-Mosa Pengadilan Tinggi. Yogyakarta	98
Gambar 5.6. Ruang Command Center pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta	99
Gambar 5.7. Ruang Media Center pada Pengadilan Wates dan Pengadilan Negeri Sleman	99
Gambar 5.8. Tampilan Inovasi Layanan Antrian Sidang di Pengadilan Negeri Yogyakarta	100
Gambar 5.9. Inovasi Loker Konfirmasi dan Antrian Sidang di Pengadilan Negeri Bantul	101
Gambar 5.10. Inovasi Antrian PTSP Pengadilan Negeri Yogyakarta	102

Gambar 5.11.	Inovasi Antrian PTSP Pengadilan Negeri Wates	102
Gambar 5.12.	Inovasi Antrian PTSP Pengadilan Negeri Bantul	103
Gambar 5.13.	Inovasi Antrian PTSP Pengadilan Negeri Sleman	103
Gambar 5.14.	Inovasi Antrian PTSP Pengadilan Negeri Wonosari	103
Gambar 5.15.	Inovasi Co-Working Space Pengadilan Tinggi Yogyakarta Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Bantul	104
Gambar 5.16.	Inovasi Media Edukasi Pengadilan Negeri Wates	104
Gambar 5.17.	Ruang Pengasuhan Anak Pengadilan Negeri Yogyakarta	105
Gambar 5.18.	Ruang Edukasi Anak di Pengadilan Negeri Wates dan Pengadilan Negeri Sleman	105
Gambar 5.19.	Ruang Menyusui di Pengadilan Negeri Yogyakarta, Wates dan Pengadilan Negeri Sleman	106
Gambar 5.20.	Inovasi Pojok Baca dan Media Edukasi di Pengadilan Negeri Wates dan Pengadilan Negeri Yogyakarta	107
Gambar 5.21.	Inovasi Aplikasi E-Tilang Pengadilan Negeri Bantul	107
Gambar 5.22.	Inovasi Syarat Layanan Pengadilan Negeri Bantul	108
Gambar 5.23.	Inovasi Media Edukasi dan Kantin Kejujuran di Pengadilan Negeri Wates	108
Gambar 5.24.	Inovasi Warung Kejujuran Pengadilan Negeri Yogyakarta Dan Pengadilan Negeri Sleman	109
Gambar 5.25.	Inovasi Mext SIPP Pengadilan Negeri Wates	109
Gambar 5.26.	Inovasi Avatar (PN Wates), SIVINA (PN Wonosari) dan Bima (PN Bantul)	110
Gambar 5.27.	Inovasi Gate-On (Geledah Sita Tahanan Online) di Pengadilan Negeri Wates	111
Gambar 5.28.	Fasilitas Khusus Bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Yogyakarta	112
Gambar 5.29.	Fasilitas Khusus Bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Negeri Wates	113
Gambar 5.30.	Fasilitas Khusus Bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Negeri Sleman	114

Gambar 5.31. Fasilitas E-Bezoek Drive Thru Disabilitas di Pengadilan Negeri Yogyakarta	115
Gambar 5.32. Fasilitas E-Permohonan Informasi Akademisi di Pengadilan Negeri Yogyakarta	116
Gambar 5.33. Fasilitas E-Permohonan Informasi Publik di Pengadilan Negeri Yogyakarta	117
Gambar 5.34. Fasilitas E-Posbakum di Pengadilan Negeri Yogyakarta ..	118
Gambar 5.35. Fasilitas ATP di Pengadilan Negeri Yogyakarta	119
Gambar 5.36. Fasilitas E-Skum di Pengadilan Negeri Yogyakarta	119
Gambar 5.37. Alur Proses E-Skum di Pengadilan Negeri Yogyakarta ...	120
Gambar 5.38. Fasilitas e-Court dan Eraterang di Pengadilan Negeri Yogyakarta	120
Gambar 5.39. Fasilitas SMAP di Pengadilan Negeri Yogyakarta	120
Gambar 5.40. Fasilitas Audio Gratifikasi di Pengadilan Negeri Yogyakarta Dan Pengadillan Negeri Bantul	121
Gambar 5.41. Fasilitas Jogja Smart Service di Pengadilan Negeri Yogyakarta	121
Gambar 5.42. Fasilitas Media Informasi Digital di Pengadilan Negeri Yogyakarta	122
Gambar 5.43. Fasilitas e-Permohonan Informasi Akademisi di Pengadilan Negeri Yogyakarta	122

LAMPIRAN

1. Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta No. W13.U/205/SK/WKPT/XII/2021
Tanggal 27 Desember 2021 tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan
Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Tahun 2021

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai salah satu Lembaga Negara yang melaksanakan *pilot project* reformasi birokrasi sejak tahun 2007, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menyusun program dan kebijakan serta mengimplementasikan secara terus menerus pelaksanaan reformasi birokrasi secara utuh. Kebijakan ini sebagaimana tertuang dalam dokumen Perencanaan Jangka Panjang Badan Peradilan Indonesia, yang dinamakan Cetak Biru (*Blue Print*) Pembaruan Peradilan Indonesia 2010-2035 yang merupakan penyempurnaan dari Cetak Biru yang diterbitkan tahun 2003, guna lebih mempertajam arah dan langkah dalam mencapai cita-cita pembaruan badan peradilan secara utuh. Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan di bawahnya, termasuk Pengadilan Tinggi Yogyakarta serta Pengadilan Negeri di bawahnya senantiasa berupaya membangun citra positif peradilan melalui berbagai kebijakan pembaruan untuk mewujudkan Pengadilan Yang Agung (*Court of Excellence*).

Beberapa kebijakan yang dilakukan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam mencapai cita-cita pembaruan badan peradilan dan mewujudkan Pengadilan yang Agung (*Court of Excellent*) diantaranya adalah dikeluarkannya Maklumat Ketua Mahkamah Agung serta dilakukannya Akreditasi Penjaminan Mutu dan Lomba Inovasi Pelayanan Publik antar satuan kerja diseluruh Pengadilan di Indonesia. Akreditasi Penjaminan Mutu merupakan suatu bentuk komitmen Mahkamah Agung, khususnya Badan Peradilan Umum dalam memberikan pelayanan baik kepada pencari keadilan maupun masyarakat pada umumnya.

Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum telah membentuk Tim Akreditasi Internal dengan Surat Keputusan Nomor : 1639/DJU/SK/OT01.1/9/2015 untuk melakukan penilaian dan penjaminan mutu pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia. Dengan tujuan yang sama, berbagai Regulasi juga telah dikeluarkan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam mengatur secara teknis, antara lain SK KMA Nomor:

1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Di Pengadilan dan SK KMA Nomor: 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan, Perma Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya, Perma Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan Dan Pembinaan Atasan Langsung Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di Bawahnya dan PERMA Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) Di Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya.

Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan melalui program-program yang mendukung pencapaian tujuan organisasi pastinya sedikit banyak menghadapi kendala/rintangan yang harus dihadapi. Terdapat beberapa masalah yang menyerpa dan mendapatkan perhatian publik yang cukup luas sejak tahun 2010 (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional / RPJMN). Dalam upaya untuk menyelesaikan dan mencegah berbagai kejadian yang menurunkan wibawa Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan di bawahnya, maka Ketua Mahkamah Agung RI mengeluarkan Maklumat Ketua Mahkamah Agung RI No. 01/MAKLUMAT/KMA/IX/2017 Tentang Pengawasan dan Pembinaan Hakim, Aparatur Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya.

Pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia sejak tahun 2020 juga berdampak besar pada kegiatan perkantoran dan memaksimalkan kesiapan Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Se-Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menyongsong era modernisasi. Pandemi ini merupakan sarana pembuktian kepada publik bahwa Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Se-Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta siap dan mampu untuk menerapkan sistem peradilan elektronik sebagai wujud dari peradilan modern.

Salah satu kegiatan yang dilakukan Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Yogyakarta untuk melaksanakan core bisnis peradilan yaitu dengan melakukan peradilan elektronik.

Peradilan elektronik adalah solusi untuk mengikuti era modernisasi. Dengan sistem persidangan secara virtual dapat meminimalisasi pertemuan fisik antara aparat peradilan dan para pencari keadilan. Selain itu, peradilan elektronik menawarkan proses yang lebih cepat, mudah dan murah dengan waktu penyelesaian yang lebih terukur, hal ini dilakukan sesuai dengan beberapa regulasi yang telah diterbitkan Mahkamah Agung.

Mahkamah Agung pertama kali menghadirkan layanan peradilan elektronik pada tahun 2018 yang diatur dalam Perma Nomor 3 Tahun 2018. Layanan elektronik tersebut meliputi pendaftaran, pembayaran dan pemanggilan pihak secara elektronik. Setahun berikutnya, Mahkamah Agung menggenapkan layanan elektronik tersebut dengan menghadirkan sistem persidangan elektronik yang diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2019. Bahkan, dari Perma ini juga lahir layanan upaya hukum banding secara elektronik. Mahkamah Agung kembali memperkuat layanan pengadilan elektronik dengan Perma Nomor 7 Tahun 2022 Perubahan atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.

Pengadilan Tinggi Yogyakarta sudah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) sejak Perma Nomor 1 Tahun 2019 dikeluarkan (SK KPT Nomor W13.U/107/SK/KPT/V/2019) dan terakhir kali diperbaharui dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor W13U/158/SK/KPT/IX/2022. Dengan dikeluarkan Perma Nomor 7 Tahun 2022, Satgas SIPP Pengadilan Tinggi Yogyakarta secara aktif mensosialisasikan serta secara rutin memonitoring implementasi pelaksanaan Perma Nomor 7 Tahun 2022 tersebut, baik di tingkat banding ataupun tingkat pertama / Pengadilan Negeri dibawahnya.

Pada tahun 2022, Pengadilan Tinggi Yogyakarta sesuai dengan pedoman pemeliharaan akreditasi penjaminan mutu badan peradilan umum telah melakukan Surveilans / Asesmen Akreditasi Penjaminan Mutu di bulan Juli pada 2 (dua) Pengadilan Negeri klas IB yaitu Pengadilan Negeri Wates dan Pengadilan Negeri Bantul, 1 (satu) Pengadilan Negeri klas II yaitu Pengadilan Negeri Wonosari serta melakukan pendampingan assesmen untuk 2 (dua)

Pengadilan Negeri klas IA yaitu Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Sleman, untuk melihat penerapan Standar Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum.

Hal tersebut merupakan sebagian dari penerapan Kebijakan dan Regulasi yang dikeluarkan Mahkamah Agung RI untuk dilaksanakan Pengadilan Tinggi Yogyakarta serta Pengadilan Negeri dibawahnya yang semata-mata untuk mencapai cita-cita pembaruan badan peradilan dan mewujudkan Badan Peradilan Yang Agung (Court of Excellence).

Pengadilan Tinggi Yogyakarta mempunyai tugas pokok untuk memeriksa, memutus dan mengadili perkara perdata, perkara pidana, perkara pidana anak dan perkara tipikor di tingkat banding serta mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar pengadilan negeri di daerah hukumnya. Selain tugas pokok tersebut, Pengadilan Tinggi Yogyakarta mempunyai fungsi sebagai kawal depan (voorpost) Mahkamah Agung dalam melakukan pengawasan di wilayah hukumnya, melakukan pembinaan dan konsultasi terhadap penyelenggaraan peradilan di wilayah hukumnya, menyusun laporan hasil pengawasan, menyusun laporan perkara, menyusun statistik perkara serta mengkaji hasil evaluasi dan laporan periodik dari semua pengadilan negeri di wilayah hukumnya. Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Yogyakarta meliputi:

1. Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tipikor Yogyakarta Klas IA
2. Pengadilan Negeri Sleman Klas IA
3. Pengadilan Negeri Bantul Klas IB
4. Pengadilan Negeri Wates Klas IB
5. Pengadilan Negeri Wonosari Klas II

Pengadilan Tinggi Yogyakarta menyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan yang merupakan kompilasi dari pelaksanaan kegiatan Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Se-Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2022 sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat terutama bagi stakeholder yang telah memberikan perhatian kepada Pengadilan Tinggi Yogyakarta. Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini merupakan bahan evaluasi terhadap pelaksanaan wewenang dan tugas Pengadilan Tinggi

Yogyakarta serta sebagai bahan refleksi bagi kinerja seluruh komponen Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang terlibat dalam pemberian dukungan teknis dan administrasi. Selain itu Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini sebagai bekal untuk memproyeksikan perencanaan pada tahun-tahun berikutnya demi terwujudnya visi dan misi Pengadilan Tinggi Yogyakarta.

B. Sejarah Pengadilan Tinggi Yogyakarta

Sebelum Pengadilan Tinggi Yogyakarta dibentuk adalah merupakan wilayah hukum Pengadilan Tinggi Semarang, namun setelah terbit Undang Undang Nomor 7 Tahun 1980 Tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Yogyakarta, maka Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang meliputi wilayah hukum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan operasionalnya.

Satuan kerja Pengadilan Tinggi Yogyakarta diresmikan oleh Menteri Kehakiman RI pada tanggal 7 Mei 1981 di Gedung Agung Yogyakarta dengan dihadiri Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, Bambang Suro, SH., dan Panitera Pengadilan Tinggi Yogyakarta, Suparno, BA.

Didalam operasionalnya Pengadilan Tinggi Yogyakarta mengalami beberapa perpindahan tempat, pada awal berdirinya Pengadilan Tinggi Yogyakarta beralamat di Jl. Trikora No. 1980 Yogyakarta pada tanggal 29 Juli tahun 1980 dengan Ketua Pengadilan Tinggi pertama kali yaitu Bapak Suro S.H. kemudian pada tanggal 27 Mei 1986 kantor Pengadilan Tinggi Yogyakarta dipindah ke Jl. Prof. DR. Soepomo No.10 Yogyakarta. Pada saat gempa menguncang Yogyakarta, tanggal 27 Mei 2007 kantor Pengadilan Tinggi Yogyakarta rusak parah untuk sementara kantor Pengadilan Tinggi Yogyakarta menumpang di Pengadilan Negeri Yogyakarta yang beralamatkan di Jl. Kapas No. 10 Yogyakarta. Pada tanggal 1 Juli 2010, Pengadilan Tinggi Yogyakarta menempati gedung baru untuk melaksanakan semua Tugas Pokok dan Fungsinya yang beralamatkan di Lingkar Selatan, Wojo, Bangunharjo, Sewon, Bantul, Yogyakarta.

Berdasarkan Keputusan Gubernur D.I. Yogyakarta Nomor : 166/KEP/2017 Tentang Penamaan Jalan Arteri (*Ring Road*) Yogyakarta, Alamat Pengadilan Tinggi Yogyakarta berubah menjadi Jl. Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH., telah diresmikan oleh Gubernur D.I. Yogyakarta tanggal 10

Oktober 2017 dan telah dilaporkan kepada Ketua Mahkamah Agung RI, Ketua Pengadilan Tingkat Banding seluruh Indonesia dan Pengadilan Negeri se D.I. Yogyakarta.

C. Visi, Misi Dan Tujuan

Visi Pengadilan Tinggi Yogyakarta

“TERWUJUDNYA PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA YANG AGUNG”

Misi Pengadilan Tinggi Yogyakarta

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Tinggi Yogyakarta.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Tinggi Yogyakarta.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Tinggi Yogyakarta.

Tujuan Pengadilan Tinggi Yogyakarta

1. Meningkatkan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
2. Meningkatkan kepercayaan publik terhadap Pengadilan Tinggi Yogyakarta.
3. Meningkatkan sistem pelayanan yang meliputi jenis dan bentuk yang dibutuhkan dan kepuasan pengguna terpenuhi.
4. Mengembangkan sistem *self assesment* secara periodik dan berjenjang.

D. Program Kerja

Pengadilan Tinggi Yogyakarta menetapkan program kerja yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran dan didukung dengan ketersediaan anggaran dalam DIPA Pengadilan Tinggi Yogyakarta. Program tersebut selanjutnya dirinci dalam bentuk kegiatan dan sub kegiatan yang tertuang lebih rinci pada Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) DIPA Pengadilan Tinggi Yogyakarta. Adapun program kerja tersebut adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.
2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Mahkamah Agung.
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.

E. Rencana Strategis

Pengadilan Tinggi Yogyakarta telah membuat sasaran strategis yang menjadi prioritas rencana strategis Pengadilan Tinggi Yogyakarta 2020-2024 dalam rangka mewujudkan visi, misi, dan tujuan Pengadilan Tinggi Yogyakarta di atas serta untuk menghadapi tantangan-tantangan yang akan dihadapi ke depan. Adapun sasaran strategis yang ditetapkan antara lain:

1. Peningkatan penyelesaian perkara.
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap Peradilan (*Access To Justice*).
4. Peningkatan kualitas pengawasan.
5. Peningkatan pelayanan informasi publik.
6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).
7. Peningkatan Sarana dan Prasarana.
8. Peningkatan kualitas perencanaan.
9. Peningkatan layanan umum dan rumah tangga.
10. Peningkatan layanan kepegawaian.
11. Peningkatan pengelolaan keuangan.
12. Peningkatan akuntabilitas dan transparansi melalui pengembangan teknologi informasi.

BAB II

MANAJEMEN PERADILAN UMUM

A. Keadaan Perkara Di Peradilan Umum di Wilayah D.I. Yogyakarta

Gambaran umum penanganan perkara peradilan umum di Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan Pengadilan Negeri se Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 : Keadaan perkara peradilan umum di Wilayah D.I. Yogyakarta tahun 2022

No	Pengadilan	Sisa 2021	Masuk 2022	Beban Perkara	Cabut	Putus	Sisa 2022
1	PT Yogyakarta	19	250	269	-	253	16
2	PN Yogyakarta	144	10249	9798	63	10211	149
3	PN Sleman	215	15330	15545	137	15227	181
4	PN Wates	51	10590	10626	32	10575	52
5	PN Bantul	105	12805	12913	7	12818	85
6	PN Wonosari	57	3800	3857	-	3814	43
Jumlah		591	53024	53008	239	52898	526

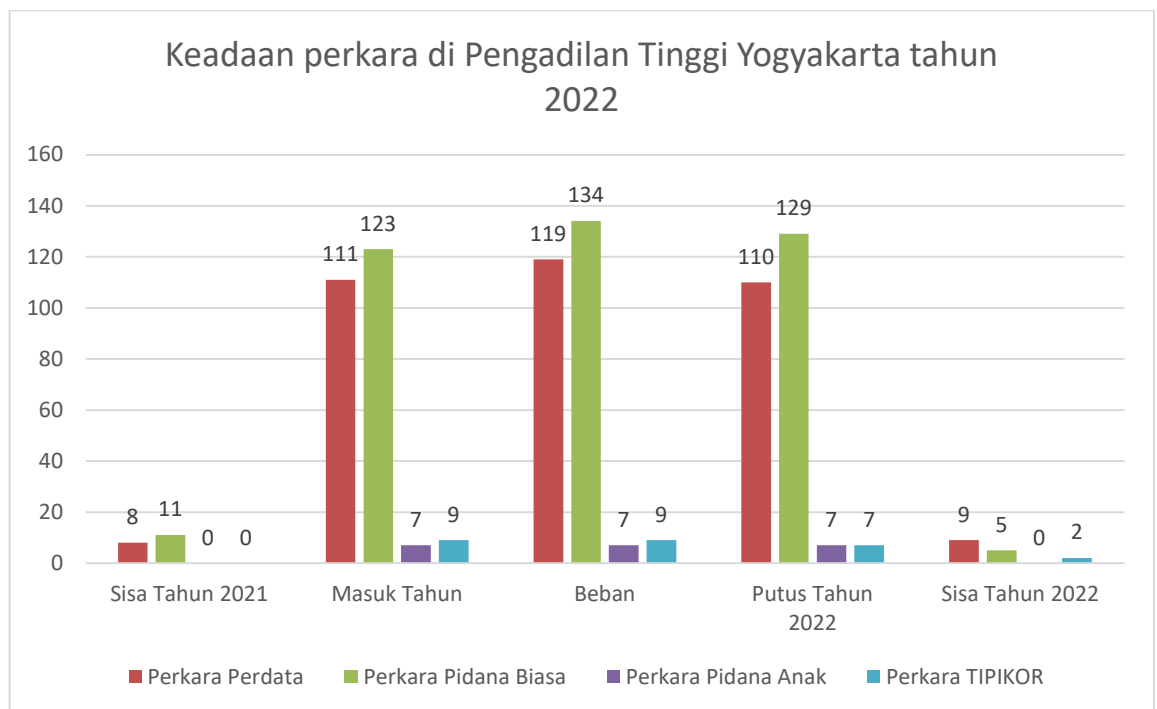
1. Keadaan Perkara di Pengadilan Tinggi Yogyakarta

Keadaan perkara di Pengadilan Tinggi Yogyakarta tahun 2022, yang menunjukkan kinerja penanganan perkara adalah sebagaimana tampak pada Tabel 2.2 di bawah ini. Perkara tersebut terdiri atas perkara perdata, perkara pidana, perkara pidana anak dan perkara pidana khusus Tipikor.

Tabel 2.2. : Keadaan perkara di Pengadilan Tinggi Yogyakarta tahun 2022

No	Jenis Perkara	Sisa Tahun 2021	Masuk Tahun 2022	Beban 2022	Putus Tahun 2022	Sisa Tahun 2022
1	Perkara Perdata	8	111	119	110	9
2	Perkara Pidana Biasa	11	123	134	129	5
3	Perkara Pidana Anak	0	7	7	7	0
4	Perkara TIPIKOR	0	9	9	7	2
Jumlah		19	250	269	253	16

Grafik 2.1. : Keadaan perkara di Pengadilan Tinggi Yogyakarta tahun 2022



a. Keadaan Perkara Pidana Biasa

Keadaan Perkara Pidana Biasa di Pengadilan Tinggi Yogyakarta sebagai berikut :

1. Sisa Tahun 2021 : 11 perkara
2. Masuk Tahun 2022 : 123 perkara
3. Putus Tahun 2022 : 129 perkara
4. Sisa akhir Tahun 2022 : 5 perkara

Waktu Penyelesaian Perkara Pidana Biasa

1. Putus kurang dari 1 bulan : 104 perkara
2. Putus 1 s/d 2 bulan : 25 perkara
3. Putus diatas 2 bulan s/d 3 bulan : - perkara

Isi amar putusan perkara pidana biasa

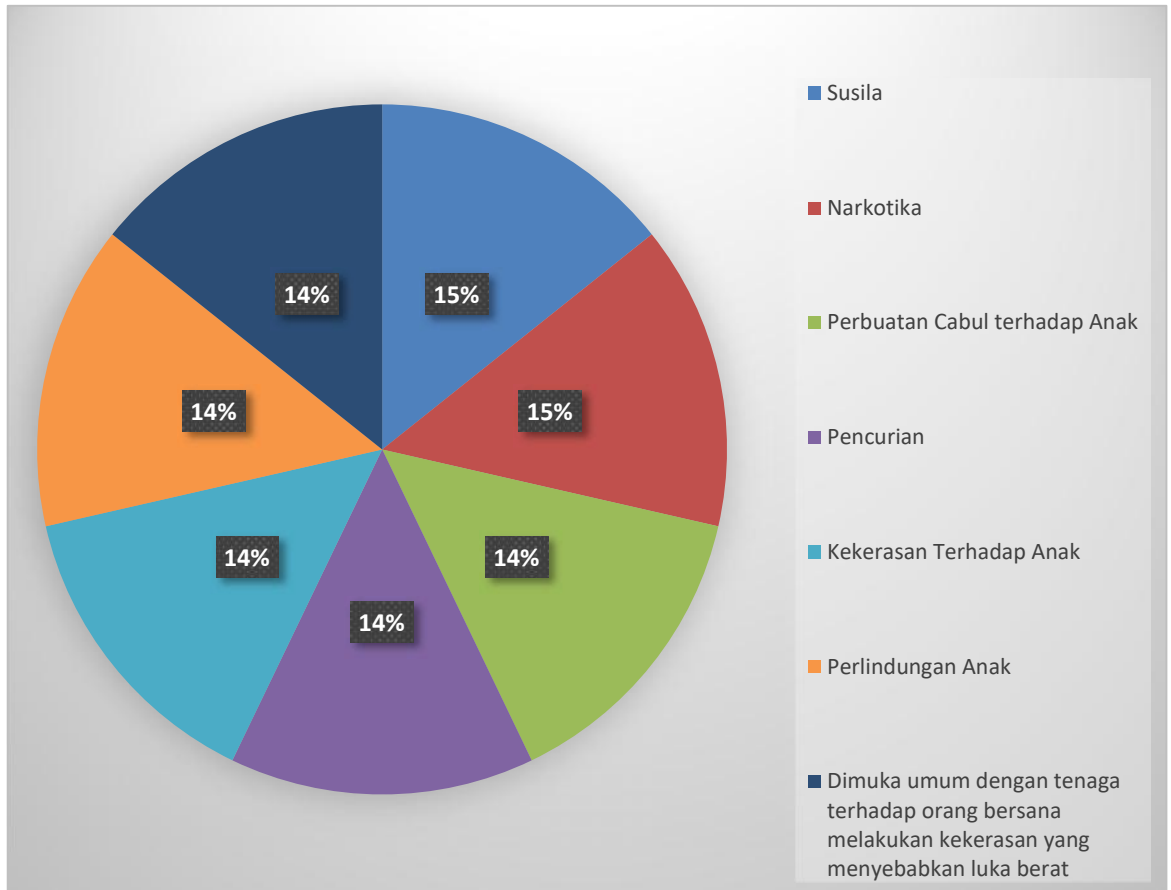
1. Memperbaiki : 100 perkara
2. Membatalkan : 5 perkara
3. Memperbaiki : 10 perkara
4. Mengubah : 14 perkara
5. Dicabut : - perkara

Isi Amar putusan akhir Perkara Pidana Anak

- Menguatkan : 5 perkara
- Membatalkan : 1 perkara
- Memperbaiki : 1 perkara

Keadaan Perkara Pidana Anak Berdasarkan Klasifikasi Perkara :

Grafik 2.3. : Persentase perkara pidana anak berdasarkan klasifikasi perkara di Pengadilan Tinggi Yogyakarta tahun 2022

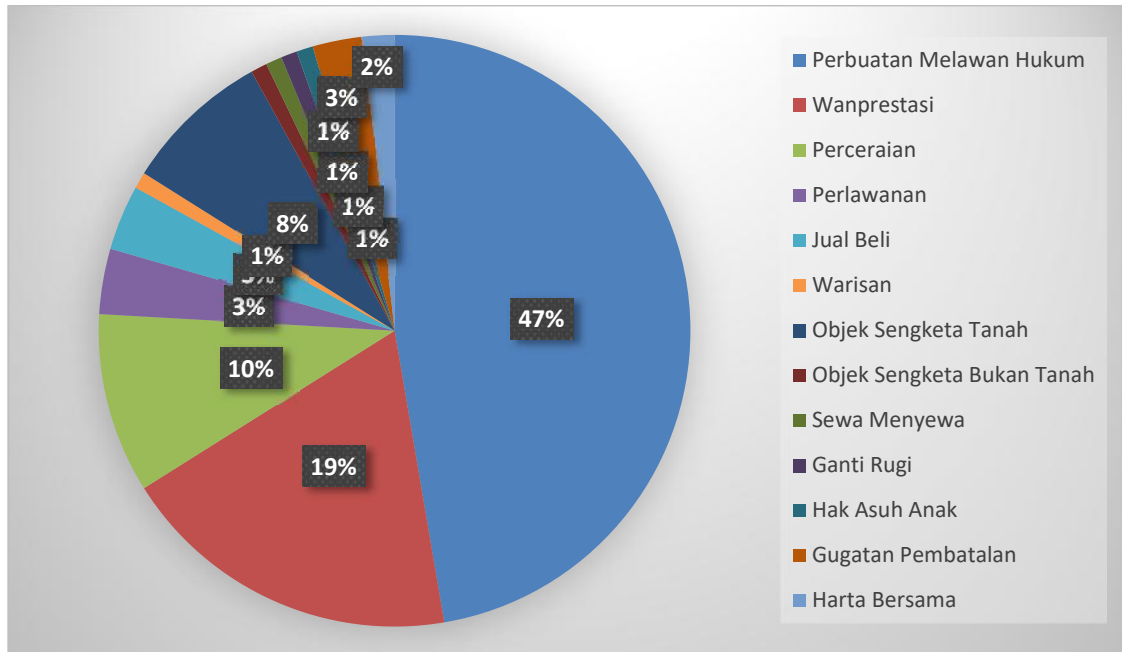


a. Keadaan Perkara Perdata

1. Sisa perkara tahun 2021 : 8 perkara
2. Perkara masuk tahun 2022 : 111 perkara
3. Perkara putus tahun 2022 : 110 perkara
4. Sisa tahun 2022 : 9 perkara

Keadaan Perkara Perdata Berdasarkan Klasifikasi Perkara :

Grafik 2.4. : Jumlah Perkara perdata berdasarkan Klasifikasi Perkara di Pengadilan Tinggi Yogyakarta tahun 2022



a. Keadaan Perkara TIPIKOR

1. Sisa Perkara Tahun 2021 : 0 Perkara
2. Perkara Masuk Tahun 2022 : 9 Perkara
3. Perkara Putus Tahun 2022 : 7 Perkara
4. Sisa Perkara Tahun 2022 : 2 Perkara

Keadaan Perkara Perdata Berdasarkan Klasifikasi Perkara :

Grafik 2.5. : Klasifikasi perkara Tipikor di Pengadilan Tinggi Yogyakarta tahun 2022



2. Keadaan Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama

Dalam kondisi pandemi karena merebaknya penyebaran wabah virus Corona Virus Disease 19 (Covid-19), tak dipungkiri hal ini sangat berpengaruh terhadap kinerja badan peradilan di Indonesia, termasuk lembaga peradilan umum di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada jajaran Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan Pengadilan Negeri di bawahnya. Akan tetapi dapat ditangani oleh aparat penegak hukum di lingkungan peradilan umum di wilayah Pengadilan Negeri di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Tabel 2.3. : Keadaan perkara di Pengadilan Tingkat Pertama se D.I. Yogyakarta tahun 2022

No	Pengadilan	Sisa 2021	TAHUN 2022				
			Masuk 2022	Beban 2022	Cabut 2022	Putus 2022	Sisa 2022
1	PN Yogyakarta	144	10249	9798	63	10211	149
2	PN Sleman	215	15330	15545	137	15227	181
3	PN Wates	51	10590	10626	32	10575	52
4	PN Bantul	105	12805	12913	7	12818	85
5	PN Wonosari	57	3800	3857	-	3814	43
JUMLAH		572	52774	52739	239	52645	510

Dari tabel diatas bisa diketahui bahwa keseluruhan perkara yang diterima pengadilan tingkat pertama di seluruh wilayah Pengadilan Tinggi Yogyakarta tahun 2022 sebanyak 52.774 perkara. Sisa perkara tahun 2021 sebanyak 572 perkara, sehingga beban penanganan perkara pada tahun 2022 sebanyak 52.209 perkara.

Perkara yang diputus tahun 2022 sebanyak 52.645 perkara dan sebanyak 239 perkara dicabut oleh para pihak sehingga sisa perkara pada akhir Desember 2022 sebanyak 510 perkara. Jumlah sisa perkara tahun 2022 dibanding sisa perkara tahun 2021 menurun sebanyak 62 perkara. Rincian keadaan perkara tingkat pertama di lingkungan peradilan umum sebagaimana penjelasan dibawah ini :

a. Perkara Perdata

Tabel 2.4 : Keadaan Perkara Perdata Tingkat Pertama Tahun 2022

Pengadilan/Perkara	Sisa 2021	Masuk 2022	Beban 2022	Cabut 2022	Putus 2022	Sisa 2022
Pengadilan Negeri Yogyakarta						
Perdata Gugatan	55	172	68	24	186	48
Perdata Permohonan	34	432	69	29	417	28
Gugatan Sederhana	0	25	0	9	9	0
Perlawanan/Derden Verzet	0	7	3	0	2	3
PHI	2	39	31	-	39	2
Jumlah	91	675	171	62	653	81
Pengadilan Negeri Sleman						
Perdata Gugatan	105	313	418	44	281	93
Perdata Permohonan	19	674	693	85	579	29
Gugatan Sederhana	0	26	26	8	18	0
Perlawanan/Derden Verzet	3	7	10	0	7	3
Perdata Konsinyasi	0	1	1	0	0	1
Jumlah	127	1021	1148	137	885	126
Pengadilan Negeri Wates						
Perdata Gugatan	-	30	30	2	21	7
Perdata Permohonan	19	397	416	17	394	8
Gugatan Sederhana	-	23	23	7	12	4
Perlawanan/Derden Verzet	-	-	-	-	-	-
PHI	-	-	-	-	-	-
Permohonan Konsinyasi	-	-	-	-	-	-
Eksekusi	7	8	-	6	4	5
Jumlah	26	458	469	32	431	24
Pengadilan Negeri Bantul						
Perdata Gugatan	48	98	143	3	115	28
Perdata Permohonan	13	194	203	4	197	6
Gugatan Sederhana	5	25	30	0	29	1

Pengadilan/Perkara	Sisa 2021	Masuk 2022	Beban 2022	Cabut 2022	Putus 2022	Sisa 2022
Perlawanan/Derden Verzet	0	0	0	0	0	0
PHI	-	-	-	-	-	-
Jumlah	66	317	383	7	341	35
Pengadilan Negeri Wonosari						
Perdata Gugatan	9	52	61		55	6
Perdata Permohonan	10	204	214		212	2
Gugatan Sederhana	4	42	46		42	4
Perlawanan / Bantahan	1	-	1		1	-
PHI	-	-	-		-	-
Jumlah	24	298	322		310	12

b. Perkara Pidana

Tabel 2.5. : Keadaan Perkara Pidana Tingkat Pertama Tahun 2022

Pengadilan/Perkara	Sisa 2021	Masuk 2022	Beban 2022	Cabut 2022	Putus 2022	Sisa 2022
Pengadilan Negeri Yogyakarta						
Pidana Biasa	39	332	371	0	314	57
Pidana Singkat	0	1	1	0	1	0
Pidana Cepat	0	190	190	0	190	0
Lalu lintas	0	9019	9019	0	9019	0
Pidana Anak	2	14	16	0	16	0
Pidana Praperadilan	0	2	2	1	1	0
Tindak Pidana Korupsi	12	16	28	0	17	11
Jumlah	53	9574	9627	1	9558	68
Pengadilan Negeri Sleman						
Pidana Biasa	88	653	741	0	689	52
Pidana Singkat	0	4	4	0	4	0
Pidana Cepat	0	44	44	0	44	0
Lalu lintas	0	13.555	13.555	0	13.555	0
Pidana Anak	0	40	40	0	39	1
Praperadilan	0	13	13	0	11	2
Jumlah	88	14.309	14.397	0	14.342	55

Pengadilan/Perkara	Sisa 2021	Masuk 2022	Beban 2022	Cabut 2022	Putus 2022	Sisa 2022
Pengadilan Negeri Wates						
Pidana Biasa	25	117	202	-	189	13
Pidana Singkat	-	22	22	-	22	-
Pidana Cepat	-	29	29	-	29	-
Lalu lintas	-	9887	9887	-	9887	-
Tindak Pidana Korupsi		-	-	-	-	-
Pidana Anak	-	15	15	-	15	15
Pidana Praperadilan	-	2	2	-	2	-
Jumlah	25	10.132	10.157	-	10.144	28
Pengadilan Negeri Bantul						
Pidana Biasa	38	330	368	0	321	47
Pidana Singkat	0	0	0	0	0	0
Pidana Cepat	0	21	21	0	21	0
Lalu lintas	0	12.105	12.105	0	12.105	0
Pidana Anak	0	30	33	0	27	3
Pidana Praperadilan	1	2	3	0	3	0
Jumlah	39	12.488	12.530	0	12.477	50
Pengadilan Negeri Wonosari						
Pidana Biasa	33	152	185		155	30
Pidana Singkat	-	-	-		-	-
Pidana Cepat	-	19	19		19	-
Lalu lintas	-	3325	3325		3325	-
Pidana Anak	-	5	5		4	1
Pidana Praperadilan	-	1	1		1	-
Jumlah	33	3502	3535		3504	31

c. Statistik Aktivasi E-Court Pengadilan Negeri

Tabel 2.6. : Statistik Aktivasi E-Court Pengadilan Negeri se Wil D.I. Yogyakarta Tahun 2022

Pengadilan	Jumlah Terdaftar	SKUM (Rp)	Gugatan	Permohonan	Bantahan	Gugatan Sederhana	Total
PN Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	-
PN Sleman	-	-	-	-	-	-	-
PN Wates	450	127.225.000	30	397	-	23	450
PN Bantul	-	-	-	-	-	-	-
PN Wonosari	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	450	127.225.000	30	397	-	23	450

3. Keadaan Perkara Tingkat Banding

a. Perkara Perdata

Tabel 2.7 : Keadaan Perkara Perdata Banding Tahun 2022

Pengadilan/Perkara	Sisa 2021	Masuk 2022	Jumlah Beban 2022	Cabut 2022	Putus 2022	Sisa 2022
Pengadilan Negeri Yogyakarta						
Perdata Gugatan	18	32	22	3	28	2
Gugatan Sederhana	0	1	1	0	1	0
Jumlah	18	33	23	3	29	2
Pengadilan Negeri Sleman						
Perdata Gugatan	7	52	59	2	47	10
Perlawanan (Derden Verzet)	0	2	2	0	2	0
Jumlah	7	54	61	2	49	10
Pengadilan Negeri Wates						
Perdata Gugatan	1	1	2	-	2	-
Perlawanan (Derden Verzet)	-	-	-	-	-	-
Jumlah	1	1	2	-	2	-
Pengadilan Negeri Bantul						
Perdata Gugatan	7	21	28	0	23	5
Perlawanan (Derden Verzet)	-	-	-	-	-	-
Jumlah	7	21	28	0	23	5
Pengadilan Negeri Wonosari						
Perdata Gugatan	-	8	8	-	8	-
Perlawanan (Derden Verzet)	-	-	-	-	-	-
Jumlah	-	8	8	-	8	-

b. Perkara Pidana

Tabel 2.8 : Keadaan Perkara Pidana Banding Tahun 2022

Pengadilan/Perkara	Sisa 2021	Masuk 2022	Jumlah Beban 2022	Cabut 2022	Putus 2022	Sisa 2022
Pengadilan Negeri Yogyakarta						
Pidana Biasa	2	21	23	3	18	2
Pidana Cepat	-	-	-	-	-	-
Pidana Anak	0	1	1	0	1	0
Tindak Pidana Korupsi	0	19	19	1	7	2
Jumlah	2	41	43	4	26	4
Pengadilan Negeri Sleman						
Pidana Biasa	32	40	72	1	36	35
Pidana Singkat	-	-	-	-	-	-
Pidana Cepat	-	-	-	-	-	-
Pidana Anak	1	1	2	0	2	0
Tindak Pidana Korupsi	-	-	-	-	-	-
Jumlah	33	41	74	1	38	35
Pengadilan Negeri Wates						
Pidana Biasa	1	10	11	-	9	2
Pidana Cepat	-	-	-	-	-	-
Pidana Anak	-	1	1	-	1	-
Tindak Pidana Korupsi	-	-	-	-	-	-
Jumlah	1	11	12	-	10	2
Pengadilan Negeri Bantul						
Pidana Biasa	2	45	47	0	40	7
Pidana Cepat	0	0	0	0	0	0
Pidana Anak	0	0	0	0	0	0
Tindak Pidana Korupsi	-	-	-	-	-	-
Jumlah	2	45	47	0	40	7
Pengadilan Negeri Wonosari						
Pidana Biasa	4	23	27		26	1
Pidana Cepat	-	-	-		-	-
Pidana Anak	-	2	2		2	-
Tindak Pidana Korupsi	-	-	-		-	-
Jumlah	4	25	29		28	1

4. Keadaan Perkara Tingkat Kasasi

a. Perkara Perdata

Tabel 2.9 : Keadaan Perkara Perdata Kasasi Tahun 2022

Pengadilan/Perkara	Sisa 2021	Masuk 2022	Jumlah Beban 2022	Cabut 2022	Putus 2022	Sisa 2022
Pengadilan Negeri Yogyakarta						
Perdata Gugatan	26	21	40	0	17	40
Perdata Permohonan	1	1	2	0	0	2
Perlawanan (Derden Verzet)	-	-	-	-	-	-
PHI	24	33	57	-	42	15
Jumlah	51	55	99	0	59	57
Pengadilan Negeri Sleman						
Perdata Gugatan	38	29	67	2	33	32
Perdata Permohonan	0	-	-	-	-	0
Perlawanan (Derden Verzet)	0	-	-	-	-	0
PHI	-	-	-	-	-	-
Jumlah	38	29	67	2	33	32
Pengadilan Negeri Wates						
Perdata Gugatan	3	2	5	-	3	2
Perdata Permohonan	-	-	-	-	-	-
Perlawanan (Derden Verzet)	-	-	-	-	-	-
PHI	-	-	-	-	-	-
Jumlah	3	2	5	-	3	2
Pengadilan Negeri Bantul						
Perdata Gugatan	3	20	23	0	12	11
Perdata Permohonan	0	0	0	0	0	0
Perlawanan (Derden Verzet)	0	0	0	0	0	0
PHI	-	-	-	-	-	-
Jumlah	3	20	23	0	12	11
Pengadilan Negeri Wonosari						
Perdata Gugatan	7	6	13	-	7	6
Perdata Permohonan	-	-	-	-	-	-
Perlawanan (Derden Verzet)	-	-	-	-	-	-
PHI	-	-	-	-	-	-
Jumlah	7	6	13	-	7	6

b. Perkara Pidana

Tabel 2.10 : Keadaan Perkara Pidana Kasasi Tahun 2022

Pengadilan/Perkara	Sisa 2021	Masuk 2022	Jumlah Beban 2022	Cabut 2022	Putus 2022	Sisa 2022
Pengadilan Negeri Yogyakarta						
Pidana Biasa	13	9	22	0	14	8
Pidana Anak	1	0	1	0	1	0
Tindak Pidana Korupsi	0	8	8	0	1	7
Jumlah	14	17	31	0	16	15
Pengadilan Negeri Sleman						
Pidana Biasa	21	24	32	1	14	17
Pidana Anak	1	0	0	0	1	0
Tindak Pidana Korupsi	-	-	-	-	-	-
Jumlah	22	24	32	1	15	17
Pengadilan Negeri Wates						
Pidana Biasa	6	3	9	-	-	9
Pidana Anak	-	-	-	-	-	-
Tindak Pidana Korupsi	-	-	-	-	-	-
Jumlah	6	3	9	-	-	9
Pengadilan Negeri Bantul						
Pidana Biasa	9	21	30	0	21	9
Pidana Anak	1	0	1	0	1	0
Tindak Pidana Korupsi	-	-	-	-	-	-
Pidana Praperadilan	1	2	3	0	3	0
Jumlah	11	23	34	0	25	9
Pengadilan Negeri Wonosari						
Pidana Biasa	8	12	20	-	14	6
Pidana Anak	-	1	1	-	1	-
Tindak Pidana Korupsi	-	-	-	-	-	-
Jumlah	8	13	21	-	15	6

5. Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali

a. Perkara Perdata

Tabel 2.11 : Keadaan Perkara Perdata Peninjauan Kembali Tahun 2022

Pengadilan/Perkara	Sisa 2021	Masuk 2022	Jumlah Beban 2022	Cabut 2022	Putus 2022	Sisa 2022
Pengadilan Negeri Yogyakarta						
Perdata Gugatan	3	8	9	0	2	9
Perlawanan/Derden Verzet	0	1	1	0	0	1
Jumlah	3	9	10	0	2	10
Pengadilan Negeri Sleman						
Perdata Gugatan	9	9	18	1	17	10
Jumlah	9	9	18	1	17	10
Pengadilan Negeri Wates						
Perdata Gugatan	-	-	-	-	-	-
Jumlah	-	-	-	-	-	-
Pengadilan Negeri Bantul						
Perdata Gugatan	2	4	6	0	2	4
Jumlah	2	4	6	0	2	4
Pengadilan Negeri Wonosari						
Perdata Gugatan	-	1	1	-	-	1
Jumlah	-	1	1	-	-	1

b. Perkara Pidana

Tabel 2.12 : Keadaan Perkara Pidana Peninjauan Kembali Tahun 2022

Pengadilan/Perkara	Sisa 2021	Masuk 2022	Jumlah Beban 2022	Cabut 2022	Putus 2022	Sisa 2022
Pengadilan Negeri Yogyakarta						
Pidana Biasa	0	0	0	0	0	0
Tindak Pidana Korupsi	1	5	6	0	0	6
Jumlah	1	5	6	0	0	6
Pengadilan Negeri Sleman						
Pidana Biasa	1	9	10	0	6	4
Jumlah	1	9	10	0	6	4
Pengadilan Negeri Wates						
Pidana Biasa	1	2	3	-	2	1
Jumlah	1	2	3	-	2	1
Pengadilan Negeri Bantul						
Pidana Biasa	1	0	1	0	0	1
Pidana Praperadilan	1	2	3	0	3	0
Jumlah	2	2	4	0	3	1

Pengadilan/Perkara	Sisa 2021	Masuk 2022	Jumlah Beban 2022	Cabut 2022	Putus 2022	Sisa 2022
Pengadilan Negeri Wonosari						
Pidana Biasa	-	-	-	-	-	-
Jumlah	-	-	-	-	-	-

B. Penyelesaian Perkara

1. Jumlah Sisa Perkara Yang Diputus

Jumlah Sisa Perkara Yang Diputus adalah jumlah sisa perkara tahun 2021 yang diputus pada tahun 2022

a. Perkara Perdata

Tabel 2.13 : Jumlah Sisa Perkara Perdata Tahun 2021 Yang Diputus Tahun 2022

Jenis Perkara	Sisa Perkara Tahun 2021	Sisa 2021 di Cabut 2022	Sisa Perkara Yang Diputus 2022	Sisa Perkara 2022
Pengadilan Negeri Yogyakarta				
Perdata Gugatan	55	-	55	-
Perdata Permohonan	34	-	34	-
Perdata Gugatan Sederhana	-	-	-	-
Perlawanan/bantahan	-	-	-	-
Konsinyasi	-	-	-	-
Eksekusi	6	-	6	-
PHI	2	-	2	-
Jumlah	97	-	97	-
Pengadilan Negeri Sleman				
Perdata Gugatan	105	10	95	-
Perdata Permohonan	19	3	16	-
Perdata Gugatan Sederhana	-	-	-	-
Perlawanan/bantahan	3	-	3	-
Konsinyasi	-	-	-	-
Eksekusi	-	-	-	-
Jumlah	124	13	114	-
Pengadilan Negeri Wates				
Perdata Gugatan	6	-	6	-
Perdata Permohonan	19	-	19	-
Perdata Gugatan Sederhana	-	-	-	-
Perlawanan/bantahan	-	-	-	-
Konsinyasi	-	-	-	-
Eksekusi	7	-	7	-
Jumlah	32	-	32	-

Pengadilan Negeri Bantul				
Perdata Gugatan	48	3	45	-
Perdata Permohonan	13	4	12	-
Perdata Gugatan Sederhana	5	-	5	-
Perlawanan/bantahan	-	-	-	-
Konsinyasi	-	-	-	-
Eksekusi	93	10	6	77
Jumlah	159	14	68	77
Pengadilan Negeri Wonosari				
Perdata Gugatan	9	-	9	-
Perdata Permohonan	10	-	10	-
Perdata Gugatan Sederhana	4	-	4	-
Perlawanan/bantahan	1	-	1	-
Konsinyasi	-	-	-	-
Eksekusi	-	-	-	-
Jumlah	24	-	24	-

b. Perkara Pidana

Tabel 2.14 : Jumlah Sisa Perkara Pidana Tahun 2021 Yang Diputus Tahun 2022

Jenis Perkara	Sisa Perkara Tahun 2021	Sisa 2021 di Cabut 2022	Sisa Perkara Yang Diputus 2022	Sisa Perkara 2022
Pengadilan Negeri Yogyakarta				
Pidana Biasa	39	-	39	-
Pidana Singkat	-	-	-	-
Pidana Cepat	-	-	-	-
Lalu Lintas	-	-	-	-
Pidana Anak	2	-	2	-
Praperadilan	-	-	-	-
Tipikor	12	-	12	-
Jumlah	53	-	53	-
Pengadilan Negeri Sleman				
Pidana Biasa	88	-	689	117
Pidana Singkat	-	-	-	-
Pidana Cepat	-	-	-	-
Lalu Lintas	-	-	-	-
Pidana Anak	-	-	39	1
Praperadilan	-	-	-	-
Jumlah	88	-	728	118

Pengadilan Negeri Wates				
Pidana Biasa	25	-	14	11
Pidana Singkat	-	-	-	-
Pidana Cepat	-	-	-	-
Lalu Lintas	-	-	-	-
Pidana Anak	-	-	-	-
Praperadilan				
Jumlah	25	-	14	11
Pengadilan Negeri Bantul				
Pidana Biasa	38	-	38	-
Pidana Singkat	-	-	-	-
Pidana Cepat	-	-	-	-
Pidana Anak	-	-	-	-
Lalu Lintas	-	-	-	-
Praperadilan	1	-	1	-
Jumlah	39	-	39	-
Pengadilan Negeri Wonosari				
Pidana Biasa	33	-	33	-
Pidana Singkat	-	-	-	-
Pidana Cepat	-	-	-	-
Pidana Anak	-	-	-	-
Lalu Lintas	-	-	-	-
Praperadilan	-	-	-	-
Jumlah	33	-	33	-

2. Jumlah Perkara Yang Diputus Tepat Waktu

Perkara Yang Diputus Tepat Waktu menurut SEMA No. 2 Tahun 2014 adalah penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan. Adapun jumlah perkara yang diputus tepat waktu tahun 2022 pada Pengadilan Negeri se D.I. Yogyakarta adalah sebagai berikut :

a. Perkara Perdata

Tabel 2.15 : Perkara Perdata Tingkat Pertama Yang Diputus Tepat Waktu Tahun 2022

Jenis Perkara	Perkara Yg Ditangani		Jumlah Putusan	Putusan Tepat Waktu	Putusan terlambat
	Sisa 2021	Masuk 2022			
Pengadilan Negeri Yogyakarta					
Perdata Gugatan	64	172	186	171	15
Perdata Permohonan	13	432	417	417	-
Perdata Gugatan Sederhana	-	25	25	-	-
PHI	2	39	39	39	-
Perlawanan / Bantahan	-	5	2	2	-
Jumlah	79	673	669	629	15
Pengadilan Negeri Sleman					
Perdata Gugatan	105	313	325	214	111
Perdata Permohonan	19	674	664	664	0
Perdata Gugatan Sederhana	0	26	26	26	0
Perlawanan / Bantahan	3	7	7	2	5
Jumlah	127	1020	1022	906	116
Pengadilan Negeri Wates					
Perdata Gugatan	6	30	29	28	1
Perdata Permohonan	19	397	408	408	-
Perdata Gugatan Sederhana	-	23	20	20	-
Perlawanan / Bantahan	-	-	-	-	-
Konsinyasi	-	-	-	-	-
Jumlah	25	450	457	456	1
Pengadilan Negeri Bantul					
Perdata Gugatan	28	98	115	97	18
Perdata Permohonan	6	194	197	171	26
Perdata Gugatan Sederhana	1	25	26	26	-
Perlawanan / Bantahan	-	-	-	-	-
Konsinyasi	-	-	-	-	-
Jumlah	35	317	338	294	44
Pengadilan Negeri Wonosari					
Perdata Gugatan	9	52	55	55	-
Perdata Permohonan	10	204	212	212	-
Perdata Gugatan Sederhana	4	42	42	42	-
Perlawanan / Bantahan	1	1	1	1	-
Jumlah	24	299	309	309	-

b. Perkara Pidana

Tabel 2.16 : Perkara Pidana Tingkat Pertama Yang Diputus Tepat Waktu Tahun 2022

Jenis Perkara	Perkara Yg Ditangani		Jumlah Putusan	Putusan Tepat Waktu	Putusan terlambat
	Sisa 2021	Masuk 2022			
Pengadilan Negeri Yogyakarta					
Pidana Biasa	39	332	314	310	4
Pidana Singkat	-	1	1	1	-
Pidana Tipiring / Cepat	-	190	190	190	-
Pidana Lalu-Lintas	-	9019	9019	9019	-
Tipikor	12	16	17	15	2
Pidana Anak	2	14	16	16	-
Pidana Praperadilan	-	2	2	2	-
Jumlah	53	9574	9559	9553	6
Pengadilan Negeri Sleman					
Pidana Biasa	88	653	741	689	117
Pidana Singkat	-	4	4	4	-
Pidana Tipiring / Cepat	-	44	4	44	-
Pidana Lalu-Lintas	-	13555	13555	13555	-
Pidana Anak	-	40	40	39	1
Pidana Praperadilan	-	13	13	11	2
Jumlah	88	14309	14357	14342	120
Pengadilan Negeri Wates					
Pidana Biasa	25	177	189	189	-
Pidana Singkat	-	22	22	22	-
Pidana Tipiring / Cepat	-	29	29	29	-
Pidana Lalu-Lintas	-	9887	9887	9887	-
Pidana Anak	-	15	15	15	-
Pidana Praperadilan	-	2	2	2	-
Jumlah	25	10132	10144	10144	-
Pengadilan Negeri Bantul					
Pidana Biasa	47	330	321	260	61
Pidana Singkat	-	-	-	-	-
Pidana Tipiring / Cepat	-	21	21	21	-
Pidana Lalu-Lintas	-	12105	12105	12105	-
Pidana Anak	-	30	27	27	-
Pidana Praperadilan	-	2	2	2	-
Jumlah	47	12488	12476	12415	61
Pengadilan Negeri Wonosari					
Pidana Biasa	33	155	188	188	-
Pidana Singkat	-	-	-	-	-
Pidana Tipiring / Cepat	-	19	19	19	-

Pidana Lalu-Lintas	-	3235	3235	3235	-
Pidana Anak	-	5	5	5	-
Pidana Praperadilan	-	1	1	1	-
Jumlah	33	3415	3448	3448	-

3. Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi Dan PK

Akseptabilitas putusan pengadilan adalah penerimaan pihak berperkara terhadap putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan terhadap kasus hukum atau sengketa yang dihadapinya. Akseptabilitas ditunjukkan dengan tidak dilakukannya upaya hukum terhadap putusan tersebut.

a. Akseptabilitas Putusan Pengadilan Tingkat Pertama

Berikut adalah jumlah perkara pada Pengadilan Negeri se D.I. Yogyakarta yang tidak mengajukan upaya hukum banding pada tahun 2022.

Tabel 2.17 : Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Tahun 2022

Jenis Perkara	Sisa Putusan PN 2021 Belum BHT	Putusan PN 2022 Contentius	Mengajukan Banding	Tidak Mengajukan Banding
Pengadilan Negeri Yogyakarta				
Perkara Perdata	77	631	33	594
Perkara Pidana	9	330	28	317
Perkara Anak	-	-	-	-
Perkara Tipikor	8	15	12	5
Jumlah	94	976	73	916
Pengadilan Negeri Sleman				
Perkara Perdata	16	332	54	294
Perkara Pidana	44	697	72	669
Perkara Anak	-	-	-	-
Jumlah	60	1028	126	963
Pengadilan Negeri Wates				
Perkara Perdata	-	457	-	457
Perkara Pidana	3	10146	11	10106
Perkara Anak	-	-	-	-
Jumlah	3	10603	11	10563
Pengadilan Negeri Bantul				
Perkara Perdata	4	341	21	324
Perkara Pidana	11	5969	18	5962
Perkara Anak	-	-	-	-
Jumlah	15	6310	39	6286
Pengadilan Negeri Wonosari				

Perkara Perdata	-	55	8	47
Perkara Pidana	-	160	25	135
Perkara Anak	-	-	-	-
Jumlah	-	215	33	182

b. Akseptabilitas Putusan Pengadilan Tingkat Banding

Berikut adalah jumlah perkara pada Pengadilan Negeri se D.I. Yogyakarta yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi pada tahun 2022.

Tabel 2.18 : Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2022

Jenis Perkara	Sisa Putusan Banding 2021 Belum BHT	Putusan Banding 2022	Mengajukan Kasasi	Tidak Mengajukan Kasasi
Pengadilan Negeri Yogyakarta				
Perkara Perdata	6	28	17	17
Perkara PHI	-	-	27	12
Perkara Pidana	1	19	9	11
Perkara Tipikor	8	7	8	1
Jumlah	15	54	61	41
Pengadilan Negeri Sleman				
Perkara Perdata	1	49	33	17
Perkara Pidana	-	39	24	15
Jumlah	1	86	57	32
Pengadilan Negeri Wates				
Perkara Perdata	1	-	-	-
Perkara Pidana	3	10	1	11
Jumlah	4	10	1	11
Pengadilan Negeri Bantul				
Perkara Perdata	1	17	8	10
Perkara Pidana	1	16	12	5
Jumlah	2	33	20	15
Pengadilan Negeri Wonosari				
Perkara Perdata	-	8	6	2
Perkara Pidana	-	28	13	18
Jumlah	-	36	19	20

c. Akseptabilitas Putusan Kasasi

Berikut adalah jumlah perkara pada Pengadilan Negeri se D.I. Yogyakarta yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali pada tahun 2022.

Tabel 2.19 : Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Peninjauan Kembali Tahun 2022

Jenis Perkara	Putusan PN 2021 Yang Telah BHT	Putusan Banding 2022 Telah BHT	Putusan Kasasi Tahun 2022	Permohonan PK Tahun 2022	Tidak Mengajukan PK
Pengadilan Negeri Yogyakarta					
Perkara Perdata	169	27	17	8	11
Perkara Pidana	9539	9	14	-	333
Perkara Tipikor	15	1	1	5	9
Jumlah	9723	37	32	13	353
Pengadilan Negeri Sleman					
Perkara Perdata	274	12	33	9	310
Perkara Pidana	653	34	13	6	647
Jumlah	927	46	46	15	957
Pengadilan Negeri Wates					
Perkara Perdata	-	-	-	-	-
Perkara Pidana	10125	5	8	1	7
Jumlah	10125	5	8	1	7
Pengadilan Negeri Bantul					
Perkara Perdata	403	17	2	1	402
Perkara Pidana	5969	16	5	-	5969
Jumlah	6372	33	7	1	6371
Pengadilan Negeri Wonosari					
Perkara Perdata	-	-	7	1	6
Perkara Pidana	-	-	-	-	-
Jumlah	-	-	7	1	6

4. Jumlah Perkara Perdata Yang Berhasil Di Mediasi

Berikut adalah jumlah perkara perdata pada Pengadilan Negeri se D.I. Yogyakarta yang berhasil di mediasi pada tahun 2022.

Tabel 2.20 : Jumlah Perkara Perdata Yang Berhasil Di Mediasi Tahun 2022

Pengadilan Negeri	Jumlah Perkara Mediasi	Status			
		Berhasil	Tidak Berhasil	Proses Mediasi	Tidak dapat dilaksanakan
PN Yogyakarta	92	2	80	4	6
PN Sleman	353	13	176	49	115
PN Wates	9	2	6	1	-
PN Bantul	78	8	54	13	3
PN Wonosari	28	5	22	1	-
Jumlah	560	30	338	68	124

5. Jumlah Perkara Anak Yang Berhasil Melalui Diversi

Berikut adalah jumlah perkara anak pada Pengadilan Negeri se D.I. Yogyakarta yang berhasil melalui diversi pada tahun 2022.

Tabel 2.21 : Jumlah Perkara Anak Yang Berhasil Melalui Diversi Tahun 2022

No	Pengadilan Negeri	Jumlah Perkara Pidana Anak	Jumlah Perkara Diversi	Status		
				Berhasil	Tidak Berhasil	Dalam Proses
1	Pengadilan Negeri Yogyakarta	14	-	-	-	-
2	Pengadilan Negeri Sleman	40	1	-	-	1
3	Pengadilan Negeri Wates	15	4	1	3	-
4	Pengadilan Negeri Bantul	16	-	-	-	-
5	Pengadilan Negeri Wonosari	5	2	1	1	-
Jumlah		90	7	2	4	1

C. Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikasi ISO Pengadilan)

1. Posbakum (Pos Bantuan Hukum)

Tabel 2.22 : Statistik Posbakum Pengadilan Negeri se Wilayah D.I. Yogyakarta Tahun 2022

Satuan Kerja	Organisasi Pemberi Layanan	Jumlah Layanan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran
PN Yogyakarta	LBH AFTA	903	48.000.000	48.000.000	0
PN Sleman	RBH AFTA	790	31.200.000	31.200.000	0
PN Bantul	1. LBH Sembada 2. PKBH FH UJB	301	31.200.000	31.200.000	0
PN Wates	Pusat Bantuan Hukum Nyi Ageng Serang	128	31.200.000	31.200.000	0
PN Wonosari	LBH Al Kautsar	89	40.800.000	40.800.000	0
Jumlah		2.211	182.400.000	182.400.000	0

Pos Bantuan Hukum merupakan layanan yang dibentuk oleh setiap Pengadilan Tingkat Pertama untuk memberikan layanan hukum berupa Informasi, Konsultasi, dan Advis Hukum yang diperuntukkan bagi masyarakat yang tidak mampu.

Menurut SEMA Nomor: 10 Tahun 2010, Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Umum diartikan sebagai ruang yang disediakan

oleh dan pada setiap Pengadilan Negeri bagi Advokat Piket dalam memberikan layanan bantuan hukum kepada Pemohon Bantuan Hukum.

Ruang Posbakum digunakan untuk pengisian formulir permohonan bantuan hukum, bantuan pembuatan dokumen hukum, advis atau konsultasi hukum, memberikan rujukan lebih lanjut tentang pembebasan biaya perkara, dan memberikan rujukan lebih lanjut tentang bantuan jasa Advokat. Posbakum diperuntukkan bagi masyarakat yang tidak tahu mengenai masalah hukum dan tidak mampu membayar pengacara untuk menyelesaikan persoalan hukum mereka.

- **Kegiatan yang telah dilaksanakan :**

1. Konsultasi
2. Pembuatan Dokumen Hukum
3. Pendampingan persidangan

- **Kendala yang dihadapi :**

1. Resiko Penyalahgunaan wewenang (sebagai lapak menjual jasa)
2. Resiko terhadap penyuapan

- **Langkah antisipasi dan penyelesaian :**

1. Pembuatan Pakta Integritas semua petugas pos bakum
2. Voice Warning System anti penyuapan dan anti gratifikasi
3. Banner / Informasi Mekanisme Pengaduan
4. Monitoring tiap bulan oleh hakim pengawas

2. Sidang Keliling / Pelayanan Terpadu

Sidang Keliling adalah sidang yang dilaksanakan secara tetap (berkala) atau sewaktu-waktu oleh pengadilan di suatu tempat yang ada di dalam wilayah hukumnya tetapi di luar tempat kedudukan pengadilan. Sidang keliling ini dimaksudkan untuk memberikan akses terhadap keadilan bagi masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil yang menghadapi masalah ongkos transportasi dari dan ke pengadilan.

Pada tahun 2022 tidak ada Pengadilan Negeri se Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang melakukan Sidang Keliling karena dipandang masih aksesibel untuk masyarakat, selain itu adanya

teknologi informasi cukup membantu untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan pengadilan.

3. Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara)

Tabel 2.23 : Statistik Perkara Prodeo Pengadilan Negeri se Wilayah D.I. Yogyakarta Tahun 2022

No	Satuan Kerja	Target Perkara	Jumlah Perkara	Pagu Anggaran	Jumlah Serapan	Sisa Anggaran	Ket
1	PN Yogyakarta	3 Perkara	4 Perkara	2.760.000	1.455.000	555.000	
	Jumlah	3 perkara	4 perkara	2.760.000	1.455.000	555.000	

Prodeo adalah proses berperkara di Pengadilan secara Cuma-Cuma atau gratis. Pada tahun 2022 hanya Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mendapatkan alokasi anggaran untuk menangani perkara prodeo.

Pengadilan Negeri Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA pada tahun anggaran 2022 ini mendapat alokasi anggaran dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum yang tertuang dalam DIPA No.005.03.099128/2021 untuk 3 (tiga) perkara prodeo (pembebasan biaya perkara) Rp. 2,760,000,-. terealisasi 4 (empat) perkara yaitu Rp. 1.455.000,-, sisa anggaran Rp. 555.000,-. hal ini disebabkan tidak adanya masyarakat yang mengajukan perkara baik perkara pidana maupun perdata yang dibiayai oleh pembebasan biaya perkara. Untuk perkara perdata, keseluruhan pendaftaran perkara dilakukan secara e-court sehingga penyerapan anggaran sangat minim. Pengadilan Negeri Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA telah melakukan sosialisasi dan public campaign ke masyarakat melalui desa- desa akan tetapi perkara yang ditangani melalui prodeo sangat minim.

- **Kegiatan yang dilaksanakan :**

Penyelesaian perkara di tingkat pertama baik dari pendaftaran perkara sampai dengan putusan, minutas, upaya hukum maupun eksekusi.

- **Kendala yang dihadapi :**

Pengguna layanan yang mendaftar perkara prodeo sangat sedikit, dikarenakan tingkat ekonomi masyarakat sudah baik

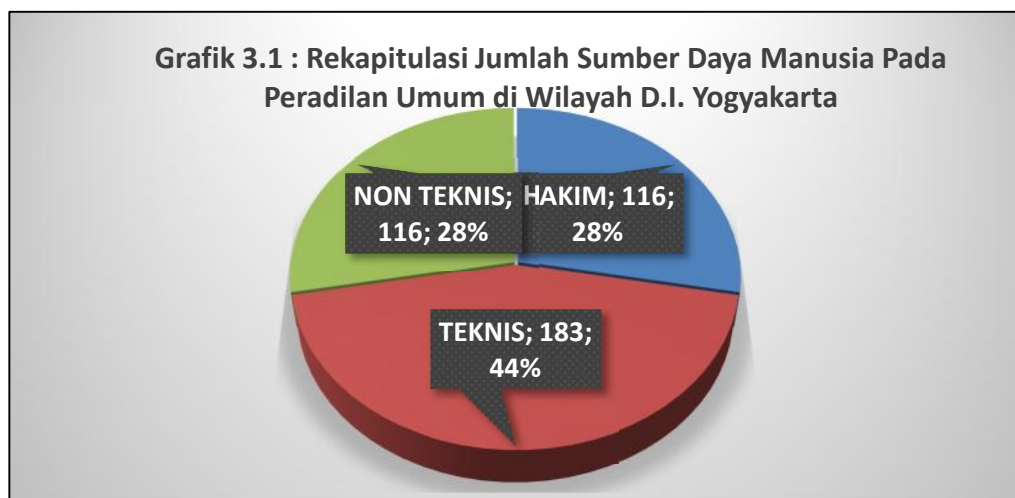
- **Langkah antisipasi dan penyelesaian :**

Sosialisasi kepada masyarakat baik melalui public campaign, media masa maupun *website*.

BAB III

SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan unsur yang menentukan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan. Dengan beban kerja yang ada dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai baik dari segi jumlah, pendidikan dan kompetensi. Adapun keadaan Sumber Daya Manusia pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan Pengadilan Negeri se D.I. Yogyakarta tahun 2022 adalah sebagai berikut :



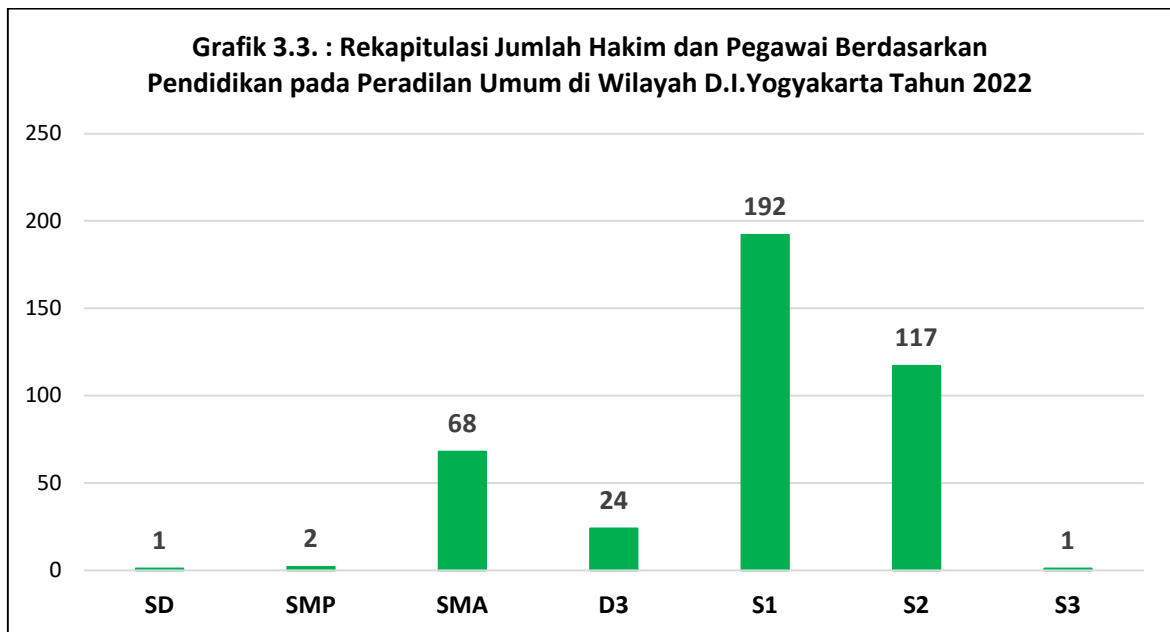
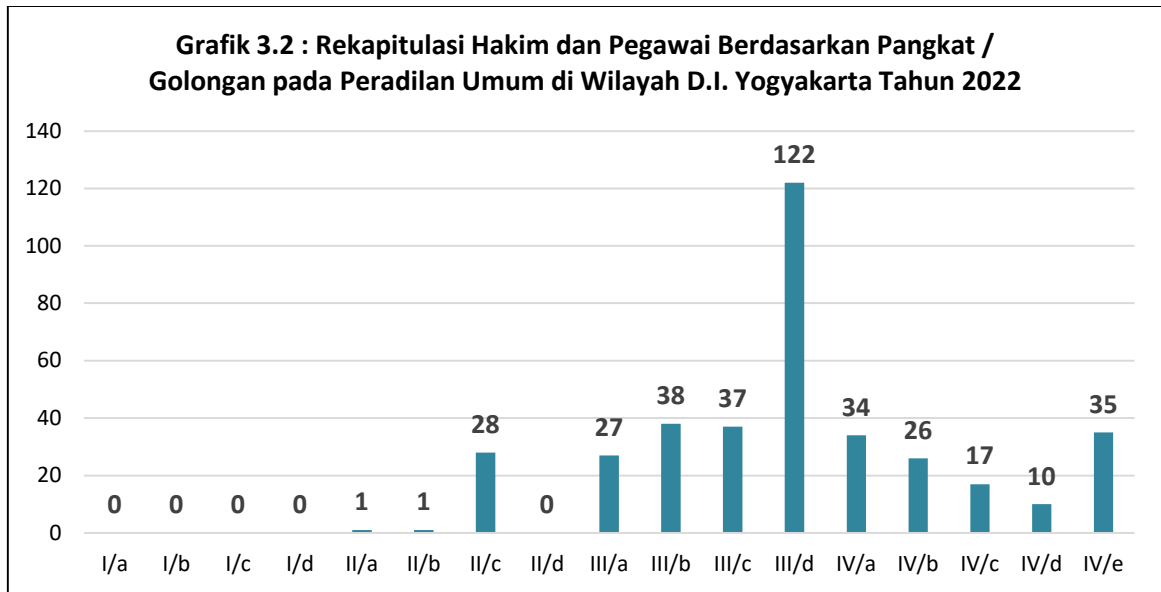
Dari grafik diatas dapat digambarkan bahwa keadaan Sumber Daya Manusia secara keseluruhan pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan Pengadilan Negeri se D.I. Yogyakarta secara terperinci adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1 : Rekapitulasi Jumlah Sumber Daya Manusia pada Peradilan Umum di Wilayah D.I. Yogyakarta Tahun 2022

NO	Satuan Kerja	Tipe/Kelas	Hakim					Teknis					Non Teknis				Jumlah		
			Ketua	Wakil Ketua	Hakim	Hakim Ad Hoc Tipikor	Hakim Ad Hoc P-I	Hakim Yustisiel	Paripera	Panitera Muda	Panitera Pengganti	Jurusita	Jurusita Pengganti	Sekretaris	Ka. Bag	Ka. Sub. Bag		Fungsional	Pelaksana
1	PT Yogyakarta	B	1	0	29	3	0	10	1	4	27	0	0	1	2	4	5	25	113
2	PN Yogyakarta	A	1	1	21	2	2	0	1	5	26	7	5	1	0	3	2	13	90
3	PN Sleman	A	1	0	22	0	0	0	1	3	16	8	9	1	0	2	3	10	76
4	PN Bantul	IB	1	1	6	0	0	0	1	3	16	4	5	1	0	3	2	8	51
5	PN Wates	IB	1	1	7	0	0	0	1	3	6	4	9	1	0	2	0	12	47
6	PN Wonorejo	I	1	1	4	0	0	0	1	3	7	3	4	1	0	3	0	10	38
J.M. AH			6	4	69	5	2	10	6	21	98	26	32	6	2	17	12	79	415

Keterangan : Untuk Jabatan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta kosong sejak 18 Mei 2022 karena pejabat terakhir promosi menjadi Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak.

Secara lebih terperinci, keadaan Sumber Daya Manusia pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan Pengadilan Negeri se D.I. Yogyakarta berdasarkan Pangkat / Golongan dan Pendidikan adalah sebagai berikut :



1. Mutasi

Rekapitulasi mutasi Hakim dan Pegawai pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan Pengadilan Negeri se D.I. Yogyakarta tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2 : Rekapitulasi Mutasi Hakim dan Pegawai Tahun 2022

NO	Satuan Kerja	Tipe/Kelas	Mutasi Masuk				Mutasi Keluar			
			Hakim	Teknis	Non Teknis	Jumlah	Hakim	Teknis	Non Teknis	Jumlah
1	PT Yogyakarta	B	14	5	3	22	4	2	4	10
2	PN Yogyakarta	IA	1	3	3	7	5	1	0	6
3	PN Sleman	IA	6	4	4	14	6	5	3	14
4	PN Bantul	IB	1	6	5	12	3	7	0	10
5	PN Wates	IB	1	2	2	5	2	1	3	6
6	PN Wonosari	II	3	2	4	9	3	1	1	5
Jumlah			26	22	21	69	23	17	11	51

2. Promosi

Rekapitulasi promosi Hakim dan Pegawai pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan Pengadilan Negeri se D.I. Yogyakarta tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3 : Rekapitulasi Promosi Hakim dan Pegawai Tahun 2022

No	Satuan Kerja	Tipe / Kelas	Promosi Sebagai								Jumlah	
			Ketua	Wakil Ketua	Panitera	Sekretaris	Kabag	PanMud	Ka Sub Bag	PP		JF
1	PT Yogyakarta	B	1	0	0	1	0	1	1	1	0	6
2	PN Yogyakarta	IA	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2
3	PN Sleman	IA	0	2	0	0	0	1	0	0	0	3
4	PN Bantul	IB	0	1	1	0	0	3	0	3	0	8
5	PN Wates	IB	1	0	0	0	0	1	0	0	0	2
6	PN Wonosari	II	1	0	0	2	0	2	0	1	0	6
Jumlah			2	4	1	3	0	8	1	6	0	27

3. Pensiun

Rekapitulasi pensiun Hakim dan Pegawai pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan Pengadilan Negeri se D.I. Yogyakarta tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4 : Rekapitulasi Pensiun Hakim dan Pegawai Tahun 2022

No	Satuan Kerja	Tipe/Kelas	Batas Usia Pensiun	Meninggal	Pensiun Dini	Jumlah
1	PT Yogyakarta	B	18	2	0	20
2	PN Yogyakarta	IA	2	1	0	3
3	PN Sleman	IA	1	1	0	2
4	PN Bantul	IB	1	0	0	1
5	PN Wates	IB	2	0	0	2
6	PN Wonosari	II	0	0	0	0
Jumlah				4	0	28

d. Diklat

Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Hakim dan Pegawai pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan Pengadilan Negeri se D.I.Yogyakarta Tahun 2022 terdiri dari diklat yang dilaksanakan secara daring maupun secara langsung. Adapun rekapitulasinya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5 : Rekapitulasi Diklat Hakim dan Pegawai Tahun 2022

No	Satuan Kerja	Tipe/Kelas	Jenis Diklat						Jumlah
			Diklat PKA	Diklat PKP	Diklat Teknis	Diklat Fungsional	Diklat Pra Jabatan	Diklat Lain-Lain	
1	PT Yogyakarta	B	1	0	59	5	5	0	70
2	PN Yogyakarta	IA	0	0	22	1	4	7	34
3	PN Sleman	IA	0	0	13	2	0	15	30
4	PN Bantul	IB	0	0	42	0	7	0	49
5	PN Wates	IB	0	0	12	2	6	0	20
6	PN Wonosari	II	0	0	18	3	3	0	24
Jumlah			1	0	166	13	25	22	227

BAB IV

PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA DAN TEKNOLOGI INFORMASI

A. Pengelolaan Keuangan

1. Realisasi Anggaran Belanja

Anggaran Pengadilan Tinggi Yogyakarta tertuang dalam 2 (dua) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2022, yaitu :

1. DIPA 01, Nomor DIPA-005.01.2.400342/2022 Tanggal 17 November 2021 dengan satu Program Kerja yaitu Program Dukungan Manajemen yang memiliki 2 kegiatan pokok yaitu, Pertama Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi dan yang Kedua Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung. DIPA 01 mendapatkan alokasi pagu anggaran sebesar Rp. 38.229.398.000,- (tiga puluh delapan milyar dua ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah).

Dalam masa pelaksanaan anggaran, dalam DIPA 01 Pengadilan Tinggi Yogyakarta telah mendapatkan penurunan anggaran belanja sebesar Rp. 71.637.000,- sehingga pagu anggaran akhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp.38.157.761,- (tiga puluh delapan milyar seratus lima puluh juta tujuh ratus enam puluh satu rupiah).

2. DIPA 03, Nomor DIPA-005.03.2.400343/2022 Tanggal 17 November 2021 dengan satu Program kerja yaitu Program Penegakan dan Pelayanan Hukum yang memiliki satu kegiatan pokok yaitu Peningkatan Manajemen Peradilan Umum, dengan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 241.605.000,- (dua ratus empat puluh satu juta enam ratus lima ribu rupiah).
3. Dalam masa pelaksanaan anggaran, dalam DIPA 03 Pengadilan Tinggi Yogyakarta tidak mendapatkan penambahan atau pengurangan anggaran sehingga pagu anggaran akhir sampai dengan tanggal 31

Desember 2022 adalah sebesar Rp.241.605.000,- (dua ratus empat puluh satu juta enam ratus lima ribu rupiah).

Jumlah keseluruhan alokasi Pagu Anggaran akhir Pengadilan Tinggi Yogyakarta Tahun 2022 adalah Rp.38.399.366.000,- (tiga puluh delapan milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah). Dari pagu anggaran akhir tersebut telah terealisasi sebesar **Rp. 38.335.836.318,-** (tiga puluh delapan milyar tiga ratus tiga puluh lima juta delapan ratus tiga puluh enam tiga ratus delapan belas rupiah) dengan serapan sebesar 99,83%.

Sedangkan untuk seluruh satker Pengadilan Negeri di wilayah Pengadilan Tinggi Yogyakarta mendapat alokasi anggaran sebesar **Rp. 52.518.179.000,-** (lima puluh dua milyar lima ratus delapan belas juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar **Rp. 52.296.144.701,-** (lima puluh dua milyar dua ratus sembilan puluh enam juta seratus empat puluh empat ribu tujuh ratus satu rupiah) dengan persentase penyerapan sebesar **99,58%**, sehingga jumlah alokasi seluruhnya untuk wilayah Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan satker dibawahnya sebesar **Rp 90.917.545.000,- (sembilan puluh milyar sembilan ratus tujuh belas juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)** dengan realisasi sebesar **Rp 90.631.981.019,- (sembilan puluh milyar enam ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu sembilan belas rupiah)** sehingga daya serap sebesar **99.69%**.

- a. Rekapitulasi Realisasi Penyerapan Anggaran DIPA PT Yogyakarta Dan PN Se Wilayah D.I. Yogyakarta Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021 dapat dijelaskan pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.1 : Rekapitulasi Realisasi Penyerapan Anggaran DIPA pada Peradilan Umum se Wilayah D.I. Yogyakarta Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2022

JENIS BELANJA	TAHUN 2021			TAHUN 2022			PERUBAHAN REALISASI
	PAGU DIPA	REALISASI		PAGU DIPA	REALISASI		
	Rp	Rp	%	Rp	Rp	%	
PENGADILAN SE WILAYAH YOGYAKARTA							
Bel. Pegawai	78.139.236.000	77.468.039.188	99,14	74.524.288.000	74.327.278.229	99,74	(4,05)
Bel. Barang Operasional	10.750.724.000	10.685.541.390	99,39	12.159.133.000	12.093.993.192	99,46	13,18
Bel. Barang Non Operasional	249.958.000	249.533.470	99,83	231.966.000	227.964.417	98,27	(8,64)
Bel. Modal	2.277.965.000	2.274.050.560	99,83	2.800.259.000	2.795.942.820	99,85	22,95
Jumlah DIPA 01	91.417.883.000	90.677.164.608	99,19	89.715.646.000	89.445.178.658	99,70	(1,36)
Bel. Barang	1.148.705.000	1.114.704.905	97,04	1.201.899.000	1.186.802.361	98,74	6,47
Jumlah DIPA 03	1.148.705.000	1.114.704.905	97,04	1.201.899.000	1.186.802.361	98,74	6,47

b. Rekapitulasi Realisasi Penyerapan Anggaran DIPA PT Yogyakarta Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2022 dapat dijelaskan pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.2 : Rekapitulasi Realisasi Penyerapan Anggaran DIPA PT Yogyakarta Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2022

JENIS BELANJA	TAHUN 2021				TAHUN 2022				PERUBAHAN REALISASI
	PAGU DIPA	REALISASI		SISA DANA	PAGU DIPA	REALISASI		SISA DANA	
	Rp	Rp	%	Rp	Rp	Rp	%	Rp	
PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA									
Bel. Pegawai	35.642.913.000	35.333.888.351	99,13	309.024.649	33.746.587.000	33.694.450.332	99,85	52.136.668	(4,64)
Bel. Barang Operasional	2.863.845.000	2.861.273.369	99,91	2.571.631	3.161.509.000	3.154.929.909	99,79	6.579.091	10,26
Bel. Barang Non Operasional	234.958.000	234.661.470	99,87	296.530	189.466.000	189.058.277	99,78	407.723	(19,43)
Bel. Modal	1.477.500.000	1.477.466.560	100	33.440	1.060.199.000	1.057.961.000	99,79	2.238.000	(28,39)
Jumlah DIPA 01	40.219.216.000	39.907.289.750	99,22	311.926.250	38.157.761.000	38.096.399.518	99,84	61.361.482	(4,54)
Bel. Barang	255.275.000	254.260.383	99,6	1.014.617	241.605.000	239.436.800	99,10	2.168.200	(5,83)
Jumlah DIPA 03	255.275.000	254.260.383	99,6	1.014.617	241.605.000	239.436.800	99,10	2.168.200	(5,83)
Total DIPA 01 dan DIPA 03	40.474.491.000	40.161.550.133	99,23	312.940.867	38.399.366.000	38.335.836.318	99,83	63.529.682	(4,55)

Keterangan :

a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya

1. Belanja Pegawai

Pagu belanja pegawai di tahun 2022 masih terdapat sisa anggaran sebesar **Rp52.136.668,-** dikarenakan adanya hakim dan pegawai yang mutasi keluar dan pensiun lebih banyak daripada yang masuk.

2. Belanja Barang Operasional

Belanja barang operasional telah dilakukan penyerapan anggaran secara maksimal sehingga hanya terdapat sisa anggaran sebesar **Rp 6.579.091,-**. Meskipun demikian jumlah alokasi pagu anggaran belanja barang operasional tahun 2022 naik dibanding tahun 2021 tetapi hal ini telah diimbangi dengan optimalisasi realisasi anggaran.

3. Belanja Barang Non Operasional

Belanja barang Non operasional telah dilakukan penyerapan anggaran secara maksimal sehingga hanya terdapat sisa anggaran sebesar **Rp 407.723,-**. Meskipun jumlah alokasi pagu anggaran belanja barang non operasional tahun 2022 mengalami dibanding tahun 2020 tetapi hal ini telah diimbangi dengan optimalisasi realisasi anggaran.

b. Program Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Belanja Modal tahun anggaran 2022 mengalami penambahan pagu sehingga masih menyisakan anggaran sebesar **Rp 2.238.000,-** karena optimalisasi penyerapan anggaran.

c. Program Peningkatan Manajemen Peradilan DIPA 03

Belanja Barang

Terdapat sisa pagu anggaran sebesar **Rp 2.168.200,-** dalam manajemen peradilan DIPA 03 Badan Peradilan Umum karena terdapat sisa dalam penyelesaian perkara, dimana perkara yang masuk ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada tahun 2022 berada dibawah target penyelesaian perkara dalam DIPA 03

- c. Rekapitulasi Realisasi Penyerapan Anggaran DIPA Pengadilan Negeri Yogyakarta Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2022 dapat dijelaskan pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.3 : Rekapitulasi Realisasi Penyerapan Anggaran DIPA PN Yogyakarta
Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2022

JENIS BELANJA	TAHUN 2021				TAHUN 2022				PERUBAHAN REALISASI
	PAGU DIPA	REALISASI		SISA DANA	PAGU DIPA	REALISASI		SISA DANA	
	Rp	Rp	%	Rp	Rp	Rp	%	Rp	
PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA									
Bel. Pegawai	16.560.475.000	16.336.600.498	98,65	223.874.502	13.610.257.000	13.566.611.638	99,68	43.645.362	(16,96)
Bel. Barang Operasional	2.609.652.000	2.586.338.786	99,11	23.313.214	2.985.721.000	2.970.163.342	99,48	15.557.658	14,84
Bel. Barang Non Operasional	-	-	-	-	27.500.000	24.328.140	88,47	3.171.860	-
Bel. Modal	262.965.000	262.926.000	99,99	39.000	361.000.000	360.840.000	99,96	160.000	37,24
Jumlah DIPA 01	19.433.092.000	19.185.865.284	98,73	247.226.716	16.984.478.000	16.921.943.120	99,63	62.534.880	(11,80)
Bel. Barang	226.904.000	224.610.819	98,99	2.293.181	300.860.000	295.291.810	98,15	5.568.190	31,47
Jumlah DIPA 03	226.904.000	224.610.819	98,99	2.293.181	300.860.000	295.291.810	98,15	5.568.190	31,47
Total DIPA 01 dan DIPA 03	19.659.996.000	19.410.476.103	98,73	249.519.897	17.285.338.000	17.217.234.930	99,61	68.103.070	(11,30)

Keterangan :

a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya

1. Belanja Pegawai

Terdapat sisa pagu dalam penyerapan anggaran sebesar Rp43.645.362,- untuk belanja pegawai karena pagu tersebut sudah dialokasikan untuk tambahan pegawai pindah yang masuk ke PN Yogyakarta, namun sampai dengan pembayaran gaji Desember 2022, tidak ada pegawai yang masuk ke PN Yogyakarta

2. Belanja Barang Operasional

Terdapat sisa pagu dalam penyerapan anggaran sebesar Rp15.557.658,- untuk Belanja Barang Operasional karena :

a) Anggaran perjalanan dinas masih tersisa, dikarenakan tidak banyak perjalanan dinas

b) Anggaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin masih tersisa.

3. Belanja Barang Non Operasional

Terdapat sisa pagu dalam penyerapan anggaran sebesar Rp3.171.860,- untuk belanja pegawai karena semua belanja telah di maksimalkan.

b. Program Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Terdapat sisa pagu penyerapan anggaran sebesar Rp160.000,- untuk belanja modal karena belanja Sarana dan Prasarana telah dibelanjakan semua.

c. Program Peningkatan Manajemen Peradilan

Terdapat sisa pagu anggaran sebesar Rp 5.640.190,- dalam manajemen peradilan (DIPA Badan Peradilan Umum)/ Belanja Barang karena terdapat sisa dalam penyelesaian perkara karena hal-hal sebagai berikut :

1 1049.EAE.001.051 : Dalam belanja rapat koordinasi teknis penyelesaian perkara sebesar Rp35.000,- dikarenakan seluruh kegiatan telah dilaksanakan

2 1049.EAE.001.052 : Dalam belanja rapat Dukungan Penyelesaian perkara sebesar Rp 0,- dikarenakan seluruh kegiatan telah dilaksanakan

- 3 1049.BCA.003.051 : Dalam belanja rapat pendaftaran berkas perkara sebesar Rp 22.700,- dikarenakan seluruh kegiatan telah dilaksanakan
- 4 1049.BCA.003.052 : Dalam belanja penetapan hari sidang sebesar Rp 80.000,- dikarenakan seluruh kegiatan telah dilaksanakan
- 5 1049.BCA.003.053 : Dalam belanja pengiriman surat penahanan dan perpanjangan penahanan sebesar Rp 99.900,- dikarenakan seluruh kegiatan telah dilaksanakan
- 6 1049.BCA.003.054 : Dalam belanja pemeriksaan di sidang pengadilan sebesar Rp 165.000,- dikarenakan seluruh kegiatan telah dilaksanakan
- 7 1049.BCA.003.055 : Dalam belanja pengiriman petikan/Salinan putusan sebesar Rp 500,- dikarenakan seluruh kegiatan telah dilaksanakan
- 8 1049.BCA.003.056 : Dalam belanja Minutasi/Upaya hukum sebesar Rp 172.500,- dikarenakan seluruh kegiatan telah dilaksanakan
- 9 1049.BCA.003.057 : Dalam belanja Penanganan perkara banding sebesar Rp 732.600,- dikarenakan seluruh kegiatan telah dilaksanakan
- 10 1049.BCA.003.058 : Dalam belanja penanganan perkara kasasi dan peninjauan kembali perkara sebesar Rp 7000,- dikarenakan seluruh kegiatan telah dilaksanakan
- 11 1049.BCA.U04.051 : Dalam belanja pendaftaran berkas perkara sebesar Rp 7.950,- dikarenakan seluruh kegiatan telah dilaksanakan
- 12 1049.BCA.U04.052 : Dalam belanja penetapan hari sidang sebesar Rp 0,- dikarenakan seluruh kegiatan telah dilaksanakan
- 13 1049.BCA.U04.053 : Dalam belanja Pengiriman surat penahanan dan perpanjangan penahanan sebesar Rp 32.500,- dikarenakan seluruh kegiatan telah dilaksanakan

- 14 1049.BCA.U04.054 : Dalam belanja pemeriksaan di sidang pengadilan sebesar Rp 140.000,- dikarenakan seluruh kegiatan telah dilaksanakan
- 15 1049.BCA.U04.055 : Dalam belanja pengiriman petikan/Salinan putusan sebesar Rp 1.010.500,- dikarenakan seluruh kegiatan telah dilaksanakan
- 16 1049.BCA.U04.056 : Dalam belanja minutas/upaya hukum sebesar Rp 178.700,- dikarenakan seluruh kegiatan telah dilaksanakan
- 17 1049.BCA.U04.057 : Dalam belanja penanganan perkara banding perkara sebesar Rp 26.500,- dikarenakan seluruh kegiatan telah dilaksanakan
- 18 1049.BCA.U04.058 : Dalam belanja penanganan perkara kasasi sebesar Rp 3.040,- dikarenakan seluruh kegiatan telah dilaksanakan
- 19 1049.BCA.U05.051 : Dalam belanja pendaftaran berkas perkara sebesar Rp 44.300,- dikarenakan seluruh kegiatan telah dilaksanakan
- 20 1049.BCA.U05.052 : Dalam belanja penetapan majelis hakim sebesar Rp 0,- dikarenakan seluruh kegiatan telah dilaksanakan
- 21 1049.BCA.U05.053 : Dalam belanja pemeriksaan di sidang pengadilan sebesar Rp 30.000,- dikarenakan seluruh kegiatan telah dilaksanakan
- 22 1049.BCA.U05.054 : Dalam belanja minutas upaya hukum sebesar Rp 1.050,- dikarenakan seluruh kegiatan telah dilaksanakan
- 23 1049.BCA.U05.055 : Dalam belanja pengiriman pemberitahuan putusan kepada pihak sebesar Rp 0,- dikarenakan seluruh kegiatan telah dilaksanakan
- 24 1049.BCA.U05.056 : Dalam belanja penanganan berkas kasasi sebesar Rp 6.850,- dikarenakan seluruh kegiatan telah dilaksanakan

- 25 1049.BCA.U05.057 : Dalam belanja Eksekusi putusan pengadilan sebesar Rp 785.000,- dikarenakan seluruh kegiatan telah dilaksanakan
- 26 1049.QBA.U32.051 : Dalam belanja Pos Bantuan Hukum sebesar Rp 753.600,- dikarenakan seluruh kegiatan telah dilaksanakan
- 27 1049.QCA.001.051 : Dalam belanja Perkara peradilan umum yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara biaya perkara sebesar Rp 555.000,- dikarenakan seluruh kegiatan telah dilaksanakan
- 28 1049.QCA.001.052 : Dalam belanja Perkara peradilan umum yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara sebesar Rp 750.000,- dikarenakan seluruh kegiatan telah dilaksanakan

- d. Rekapitulasi Realisasi Penyerapan Anggaran DIPA Pengadilan Negeri Sleman Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2022 dapat dijelaskan pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.4 : Rekapitulasi Realisasi Penyerapan Anggaran DIPA PN Sleman
Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2022

JENIS BELANJA	TAHUN 2021				TAHUN 2022				PERUBAHAN REALISASI
	PAGU DIPA	REALISASI		SISA DANA	PAGU DIPA	REALISASI		SISA DANA	
	Rp	Rp	%	Rp	Rp	Rp	%	Rp	
PENGADILAN NEGERI SLEMAN									
Bel. Pegawai	11.882.486.000	11.840.706.850	99,65	41.779.150	12.524.756.000	12.504.276.737	99,84	20.479.263	5,60
Bel. Barang Operasional	1.661.558.000	1.633.489.057	98,31	28.068.943	1.931.737.000	1.895.395.636	98,12	36.341.364	16,03
Bel. Barang Non Operasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bel. Modal	65.000.000	64.950.000	99,92	50.000	409.060.000	409.060.000	100,00	-	529,81
Jumlah DIPA 01	13.609.044.000	13.539.145.907	99,49	69.898.093	14.865.553.000	14.808.732.373	99,62	56.820.627	9,38
Bel. Barang	328.942.000	304.138.260	92,46	24.803.740	300.860.000	295.219.810	98,13	5.640.190	(2,93)
Jumlah DIPA 03	328.942.000	304.138.260	92,46	24.803.740	300.860.000	295.219.810	98,13	5.640.190	(2,93)
Total DIPA 01 dan DIPA 03	13.937.986.000	13.843.284.167	99,32	94.701.833	15.166.413.000	15.103.952.183	99,59	62.460.817	9,11

Keterangan :

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya

a. Belanja Pegawai

Pagu tahun 2022 telah terealisasi anggaran sebesar Rp.12.504.276.737,00 dari anggaran DIPA sebesar Rp.12.524.756.000,00 atau di presentasikan sebesar 99,84%, jika dibandingkan dengan realisasi 2021 sebesar 99,65% maka terjadi kenaikan sebesar 0,19%, hal ini diakibatkan banyaknya mutasi pegawai dan penambahan pagu minus belanja pegawai.

b. Belanja Barang Operasional

Terjadi kenaikan penyerapan anggaran sebesar 0,10% untuk belanja barang operasional 2022.

c. Belanja Barang Non Operasional

Pada tahun 2022 Pengadilan Negeri Sleman tidak ada anggaran untuk Belanja Barang Non Operasional

2. Program Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Belanja Modal Terjadi penurunan penyerapan anggaran sebesar 2,35% untuk belanja modal tahun 2022 karena spesifikasi sudah terpenuhi tetapi untuk harga dibawah Pagu.

3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan

Belanja Barang Terjadi penurunan penyerapan anggaran sebesar 0,08% untuk belanja barang pada program peningkatan manajemen peradilan (dipa badan peradilan umum) pada tahun 2022.

Pada tahun 2022 realisasi anggaran mengalami penurunan pada DIPA Badan Urusan Administrasi (01) dan kenaikan pada DIPA Badan Peradilan Umum (03).

- e. Rekapitulasi Realisasi Penyerapan Anggaran DIPA Pengadilan Negeri Wates Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2022 dapat dijelaskan pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.5 : Rekapitulasi Realisasi Penyerapan Anggaran DIPA PN Wates
Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2022

JENIS BELANJA	TAHUN 2021				TAHUN 2022				PERUBAHAN REALISASI
	PAGU DIPA 2021	REALISASI		SISA DANA	PAGU DIPA 2022	REALISASI		SISA DANA	
	Rp	Rp	%	Rp	Rp	Rp	%	Rp	
PENGADILAN NEGERI WATES									
Bel. Pegawai	4.908.635.000	4.842.320.917	98,65	66.314.083	5.407.419.000	5.372.135.150	99,35	35.283.850	10,94
Bel. Barang Operasional	1.209.724.000	1.204.375.570	99,56	5.348.430	1.365.743.000	1.364.297.149	99,89	1.445.851	13,28
Bel. Barang Non Operasional	5.000.000	4.872.000	97,44	128.000	5.000.000	4.578.000	91,56	422.000	(6,03)
Bel. Modal	37.500.000	37.482.000	99,95	18.000	253.500.000	252.511.820	99,61	988.180	573,69
Jumlah DIPA 01	6.160.859.000	6.089.050.487	98,83	71.808.513	7.031.662.000	6.993.522.119	99,46	37.039.087	14,85
Bel. Barang	109.585.000	103.954.775	94,86	5.630.225	121.585.000	119.975.400	98,68	1.609.600	15,41
Jumlah DIPA 03	109.585.000	103.954.775	94,86	5.630.225	121.585.000	119.975.400	98,68	1.609.600	15,41
Total DIPA 01 dan DIPA 03	6.270.444.000	6.193.005.262	98,77	77.438.738	7.153.247.000	7.113.497.519	99,44	38.648.687	14,86

Keterangan :

a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya

1. Belanja Pegawai

Terdapat sisa pagu dalam penyerapan anggaran sebesar Rp. 35.283.850,- untuk belanja pegawai karena gaji dan tunjangan telah dibayarkan seluruhnya.

2. Belanja Barang Operasional

Terdapat sisa pagu dalam penyerapan anggaran sebesar Rp. 1.445.851,- untuk Belanja Barang Operasional karena :

a) Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran Rp. 363.057,- semua belanja telah terbayarkan seluruhnya.

b) Langganan Daya dan Jasa Rp. 469.515,- semua belanja telah terbayarkan seluruhnya.

c) Pemeliharaan Kantor Rp. 283.079,- semua belanja telah terbayarkan seluruhnya.

d) Rapat Koordinasi Internal Rp. 6.000,- semua belanja telah terbayarkan seluruhnya.

e) Koordinasi ke Pusat/ Tingkat Banding/ Tingkat Pertama Rp. 150.000,- semua belanja telah terbayarkan seluruhnya.

f) Konsultasi ke KPPN/ Kanwil/ KPKNL Rp. 170.000,- semua belanja telah terbayarkan seluruhnya.

g) Penanganan Covid Rp. 4.200,- semua belanja telah terbayarkan seluruhnya.

3. Belanja Barang Non Operasional

Terdapat sisa pagu dalam penyerapan anggaran sebesar Rp. 422.000,- untuk belanja Barang Non Operasional (Penanganan Covid-19) karena tidak dilakukan belanja barang non operasional Penanganan Covid-19 di Pengadilan Negeri Wates.

b. Program Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Terdapat sisa pagu penyerapan anggaran sebesar Rp. 988.180,- untuk belanja modal karena semua belanja telah terbayarkan seluruhnya.

c. Program Peningkatan Manajemen Peradilan

Terdapat sisa pagu anggaran sebesar Rp. 1.609.600,- dalam manajemen peradilan (DIPA Badan Peradilan Umum) / Belanja Barang karena terdapat sisa dalam penyelesaian perkara karena hal-hal sebagai berikut :

- 29 BF.1049.BCA.051 : Dalam belanja Pendaftaran Berkas Perkara sebesar Rp. 10.600,-
karena semua belanja telah terbayarkan seluruhnya.
- 30 BF.1049.BCA.052 : Dalam belanja Penetapan Hari Sidang sebesar Rp. 250.000,-
karena semua belanja telah terbayarkan seluruhnya.
- 31 BF.1049.BCA.055 : Dalam belanja Pengiriman Petikan/ Salinan Putusan kepada JPU dan Terdakwa sebesar Rp. 20.000,-
karena semua belanja telah terbayarkan seluruhnya.
- 32 BF.1049.BCA.056 : Dalam belanja Minutasi/ upaya hukum sebesar Rp. 10.000,-
karena semua belanja telah terbayarkan seluruhnya.
- 33 BF.1049.BCA.058 : Dalam belanja Penanganan Perkara Kasasi dan peninjauan kembali di Pengadilan Tingkat pertama sebesar Rp. 919.000,-
karena semua belanja telah terbayarkan seluruhnya.
- 34 BF.1049.QBA.051 : Dalam belanja Pos Bantuan Hukum sebesar Rp. 400.000,- karena semua belanja telah terbayarkan seluruhnya.

- f. Rekapitulasi Realisasi Penyerapan Anggaran DIPA Pengadilan Negeri Bantul Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2022 dapat dijelaskan pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.6 : Rekapitulasi Realisasi Penyerapan Anggaran DIPA PN Bantul
Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2022

JENIS BELANJA	TAHUN 2021				TAHUN 2022				PERUBAHAN REALISASI
	PAGU DIPA 2021	REALISASI		SISA DANA	PAGU DIPA 2022	REALISASI		SISA DANA	
	Rp	Rp	%	Rp	Rp	Rp	%	Rp	
PENGADILAN NEGERI BANTUL									
Bel. Pegawai	5.427.571.000	5.421.970.319	99,9	5.600.681	5.608.756.000	5.602.620.636	99,89	6.135.364	3,33
Bel. Barang Operasional	1.236.594.000	1.233.404.017	99,74	3.189.983	1.395.634.000	1.391.497.637	99,7	4.136.363	12,82
Bel. Barang Non Operasional	5.000.000	5.000.000	100	-	5.000.000	5.000.000	100	0	0,00
Bel. Modal	37.500.000	37.482.000	99,95	18.000	652.500.000	651.570.000	99,86	930.000	1638,35
Jumlah DIPA 01	6.706.665.000	6.697.856.336	99,79	13.808.664	7.661.890.000	7.650.688.273	99,85	11.201.727	14,23
Bel. Barang	129.455.000	129.266.168	99,85	188.832	136.945.000	136.919.842	99,98	25.158	5,92
Jumlah DIPA 03	129.455.000	129.266.168	99,85	188.832	136.945.000	136.919.842	99,98	25.158	5,92
Total DIPA 01 dan DIPA 03	6.836.120.000	6.827.122.504	99,79	13.997.496	7.798.835.000	7.787.608.115	99,86	11.226.885	14,07

Keterangan :

a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya

1. Belanja Pegawai

Terdapat sisa pagu dalam penyerapan anggaran sebesar Rp 6.135.364,- untuk belanja pegawai karena pada tahun 2022 terdapat pegawai yang mutasi pindah dan pensiun.

2. Belanja Barang Operasional

Terdapat sisa pagu dalam penyerapan anggaran sebesar Rp 4.136.363,- untuk belanja barang operasional karena tidak terdapat kegiatan dari kantor pusat sehingga anggaran yang tersedia tidak bisa terserap dengan maksimal.

3. Belanja Barang Non Operasional

Tidak terdapat sisa pagu dalam penyerapan anggaran belanja barang non operasional.

b. Program Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Terdapat sisa pagu penyerapan anggaran sebesar Rp 930.000,- untuk belanja modal karena terdapat perbedaan harga pada pagu dan harga pasar.

c. Program Peningkatan Manajemen Peradilan

Terdapat sisa pagu anggaran sebesar Rp 25.158,- dalam manajemen peradilan (DIPA Badan Peradilan Umum)/ Belanja Barang karena terdapat sisa dalam penyelesaian perkara karena hal-hal sebagai berikut :

1. 1049.005.003.051 : Dalam belanja bahan dan beban barang persediaan

barang konsumsi sebesar Rp 4.646,- karena tidak

terdapat lagi tagihan belanja.

2. 1049.005.004.053 : Dalam belanja pengiriman surat dinas pos pusat sebesar Rp 1.500,- karena tidak terdapat lagi tagihan belanja.

3. 1049.005.004.055 : Dalam belanja pengiriman surat dinas pos pusat sebesar Rp 1.000,- karena tidak terdapat lagi tagihan belanja.
4. 1049.005.004.056 : Dalam belanja bahan minutasasi/upaya hukum sebesar Rp 512,- karena tidak terdapat lagi tagihan belanja.
5. 1049.005.004.057 : Dalam belanja penanganan perkara banding di Pengadilan Tingkat Pertama sebesar Rp 8.000- karena tidak terdapat lagi tagihan belanja.
6. 1049.005.004.058 : Dalam belanja penanganan perkara kasasi dan PK di Pengadilan Tinggi sebesar Rp 9.500,- karena tidak terdapat lagi tagihan belanja.

- g. Rekapitulasi Realisasi Penyerapan Anggaran DIPA Pengadilan Negeri Wonosari Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2022 dapat dijelaskan pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.7 : Rekapitulasi Realisasi Penyerapan Anggaran DIPA PN Wonosari
Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2022

JENIS BELANJA	TAHUN 2021				TAHUN 2022				PERUBAHAN REALISASI
	PAGU DIPA	REALISASI		SISA DANA	PAGU DIPA	REALISASI		SISA DANA	
	Rp	Rp	%	Rp	Rp	Rp	%	Rp	
PENGADILAN NEGERI WONOSARI									
Bel. Pegawai	3.717.156.000	3.692.552.253	99,34	24.603.747	3.626.513.000	3.587.183.736	98,92	39.329.264	(2,85)
Bel. Barang Operasional	1.169.351.000	1.166.660.591	99,77	2.690.409	1.318.789.000	1.317.709.519	99,92	1.079.481	12,95
Bel. Barang Non Operasional	5.000.000	5.000.000	100,00	0	5.000.000	5.000.000	100,00	-	0,00
Bel. Modal	397.500.000	393.744.000	99,06	3.756.000	64.000.000	64.000.000	100,00	-	(83,75)
Jumlah DIPA 01	5.289.007.000	5.257.956.844	99,41	31.050.156	5.014.302.000	4.973.893.255	99,19	40.408.745	(5,40)
Bel. Barang	98.544.000	98.474.500	99,93	69.500	100.044.000	99.958.699	99,91	85.301	1,51
Jumlah DIPA 03	98.544.000	98.474.500	99,93	69.500	100.044.000	99.958.699	99,91	85.301	1,51
Total DIPA 01 dan DIPA 03	5.387.551.000	5.356.431.344	99,79	31.119.656	5.114.346.000	5.073.851.954	99,86	40.494.046	(5,28)

Keterangan :

a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya

1. Belanja Pegawai

Terdapat sisa pagu dalam penyerapan anggaran sebesar Rp 39.329.264,- untuk belanja pegawai karena adanya pegawai yang mutasi keluar.

2. Belanja Barang Operasional

Terdapat sisa pagu dalam penyerapan anggaran sebesar Rp 1.079.481,- untuk Belanja Barang Operasional karena terdapat sisa anggaran pada belanja perkantoran sehari-hari

3. Belanja Barang Non Operasional

Terdapat sisa pagu dalam penyerapan anggaran sebesar Rp 0,- untuk belanja barang non operasional terserap 100%.

b. Program Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Terdapat sisa pagu penyerapan anggaran sebesar Rp 0,- untuk belanja modal karena terealisasi 100%.

c. Program Peningkatan Manajemen Peradilan

Terdapat sisa pagu anggaran sebesar Rp 85.301,- dalam manajemen peradilan (DIPA Badan Peradilan Umum)/ Belanja Barang karena terdapat sisa dalam penyelesaian perkara karena hal-hal sebagai berikut :

1. 1049.005.003.051 : Dalam belanja 521211 sebesar Rp 186,-
Dalam belanja 521811 sebesar Rp 1.025,-
2. 1049.005.004.053 : Dalam belanja 521114. sebesar Rp..1.500,-
3. 1049.005.004.054 : Dalam belanja 521211 sebesar Rp 50.000,-
4. 1049.005.005.055 : Dalam belanja 521114. sebesar Rp..11.000
5. 1049.005.004.056 : Dalam belanja 521211 sebesar Rp 6.800,-.
6. 1049.005.005.057 : Dalam belanja 521114. sebesar Rp. 5.000,-.
7. 1049.005.006.058 : Dalam belanja 521114. sebesar Rp. 9.790,-

- h. Rekapitulasi Prosentase Kenaikan Realisasi Anggaran seluruh Satker di Wilayah D.I. Yogyakarta DIPA Badan Urusan Administras (01) dan DIPA Dirjen Badan Peradilan Umum (03)

Tabel 4.8 : Rekapitulasi Prosentase Kenaikan Realisasi Anggaran DIPA 01 Peradilan Umum se Wilayah D.I. Yogyakarta Tahun Anggaran 2022

NO	SATKER	2021	2022	PROSENTASE KENAIKAN/ PENURUNAN
1	Pengadilan Tinggi Yogyakarta	99,22%	99,84%	(4,64%)
2	Pengadilan Negeri Yogyakarta	98,73%	99,63%	(11,80%)
3	Pengadilan Negeri Sleman	99,49%	99,62%	9,38%
4	Pengadilan Negeri Wates	98,83%	99,46%	14,85%
6	Pengadilan Negeri Bantul	99,79%	99,85%	14,23%
5	Pengadilan Negeri Wonosari	99,41%	99,91%	(5,40%)

Tabel 4.9 : Rekapitulasi Prosentase Kenaikan Realisasi Anggaran DIPA 03 Pada Peradilan Umum se Wilayah D.I. Yogyakarta Tahun Anggaran 2022

NO	SATKER	2021	2022	PROSENTASE KENAIKAN/ PENURUNAN
1	Pengadilan Tinggi Yogyakarta	99,60%	99,10%	-5,83%
2	Pengadilan Negeri Yogyakarta	98,99%	98,15%	31,47%
3	Pengadilan Negeri Sleman	92,46%	98,13%	-2,93%
4	Pengadilan Negeri Wates	94,86%	99,68%	15,41%
5	Pengadilan Negeri Bantul	99,85%	99,98%	5,92%
6	Pengadilan Negeri Wonosari	99,93%	99,91%	1,51%

Secara umum prosentase penyerapan anggaran diseluruh Satker Se wilayah hukum Pengadilan Tinggi Yogyakarta mengalami penurunan untuk DIPA Badan Urusan Administrasi (01), tetapi pada

DIPA Badan Peradilan Umum (03) terjadi kenaikan penyerapan anggaran.

2. Anggaran Belanja Tambahan (ABT)

Rekapitulasi pagu awal anggaran belanja Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan Pengadilan Negeri se Wilayah D.I. Yogyakarta DIPA Badan Urusan Administras (01) dan DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (03) dijelaskan dibawah ini :

Tabel 4.10 : Rekapitulasi Pagu Awal dan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) DIPA 01 BUA Pada Peradilan Umum se Wilayah D.I. Yogyakarta Tahun 2022

NO	JENIS BELANJA	2021	2022	KENAIKAN
A	PAGU DIPA AWAL	PAGU	PAGU	KENAIKAN
1	GAJI DAN TUNJANGAN	78.139.236.000	78.935.462.000	796.226.000
2	DUKUNGAN MANAJEMEN (NON OPERASIONAL	249.958.000	231.966.000	(17.992.000)
3	OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN KANTOR	10.750.724.000	12.157.687.149	1.406.963.149
4	BELANJA MODAL	2.277.965.000	2.800.259.000	522.294.000
	JUMLAH I	91.417.883.000	94.125.374.149	2.707.491.149
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA TAMBAHAN (ABT) PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA DAN PENGADILAN NEGERI SE WILAYAH D.I. YOGYAKARTA DIPA 01				
B	PAGU MINUS	ABT 2021	ABT 2022	KENAIKAN
1	GAJI DAN TUNJANGAN	525.018.000	-	(525.018.000)
	JUMLAH II	525.018.000	-	(525.018.000)
TAMBAHAN ANGGARAN (ABT)				
		ABT 2021	ABT 2022	KENAIKAN
1	OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN KANTOR	525.018.000	162.550.000	(362.468.000)
2	DUKUNGAN MANAJEMEN (NON	516.800.000	-	(516.800.000)
3	BELANJA MODAL	-	394.312.000	394.312.000
	JUMLAH III	1.041.818.000	556.862.000	(484.956.000)
TOTAL (I + II + III) = PAGU AKHIR				
		92.984.719.000	94.682.236.149	(484.956.000)

Tabel 4.11 : Rekapitulasi Pagu Awal dan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) DIPA 03 BADILUM Pada Peradilan Umum se Wilayah D.I. Yogyakarta Tahun 2022

NO	JENIS BELANJA	2021	2022	KENAIKAN
	PAGU AWAL	PAGU	PAGU	KENAIKAN
1	BELANJA BARANG	1.171.185.000	-	(1.171.185.000)
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA TAMBAHAN (ABT) PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA DAN PENGADILAN NEGERI SE WILAYAH D.I. YOGYAKARTA DIPA 03				
TAMBAHAN ANGGARAN (ABT)				
		ABT 2021	ABT 2022	KENAIKAN
1	BELANJA BARANG	(22.480.000)	-	22.480.000
TOTAL (I + II + III) = PAGU REVISI				
		1.148.705.000	-	(1.148.705.000)

Untuk DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi) Anggaran Belanja Tambahan (ABT) tahun 2022 yaitu belanja barang mendapatkan anggaran belanja tambahan sebesar Rp. 162.550.000,- sedangkan untuk anggaran belanja modal mendapatkan tambahan anggaran belanja sebesar Rp 394.312.000,-.

Sedangkan untuk DIPA 03 (Badan Peradilan Umum) tidak ada alokasi Anggaran Belanja Tambahan (ABT) untuk tahun anggaran 2022.

3. Anggaran Pencegahan dan Penanganan COVID-19

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2020 (COVID-19) telah meminta Kementerian / Lembaga untuk mengutamakan alokasi anggaran yang ada untuk mempercepat penanganan COVID-19 sesuai protokol penanganan,

Pemerintah Indonesia telah menempuh langkah untuk melakukan refocussing kegiatan, realokasi anggaran dan pengadaan barang dan jasa sebagai upaya Pemerintah dalam percepatan penanganan COVID-19, Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah diminta untuk segera merevisi anggaran dan mengajukan kepada Menteri Keuangan,

Kemudian, Inpres ini juga mengatur agar K/L mempercepat pelaksanaan pengadaan barang dan jasa untuk penanggulangan COVID-19 dengan memperluas dan mempermudah akses sesuai UU Penanggulangan Bencana dan aturan turunannya,

Sesuai dengan kebijakan pemerintah tersebut, Pengadilan Tinggi Yogyakarta bersama jajaran Pengadilan Negeri dibawahnya telah mengambil langkah yang pasti dalam melaksanakan refocussing kegiatan, realokasi anggaran dan percepatan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa untuk penanggulangan COVID-19,

Langkah ditempuh sesuai dengan regulasi adalah dengan menyesuaikan postur anggaran yang digunakan untuk penanganan dan pencegahan pandemi Covid-19, Beberapa mata anggaran perjalanan dinas dan rapat-rapat dialihkan untuk pengadaan belanja sarana dan prasarana untuk penanganan dan pencegahan Covid-19 yang meliputi pelaksanaan rapid test dan swab test secara berkala, melakukan penyemprotan desinfektan secara rutin, pengadaan hand sanitizer, pengadaan multivitamin, pengadaan masker, sarung tangan, dan berbagai hal lain terkait Covid-19,

Penyesuaian postur anggaran yang telah dilakukan adalah mengalokasikan anggaran khusus untuk penanganan Corona Virus Disease 2020 (COVID-19) ke dalam klasifikasi akun-akun khusus Covid-19, yaitu :

Tabel 4.12 : Alokasi dan Realisasi Anggaran Khusus Penanganan COVID-19 pada Peradilan Umum se Wilayah D.I. Yogyakarta Tahun 2022

AKUN	URAIAN	PAGU BELANJA	REALISASI 2021	%
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	57.814.000	43.289.022	74,87
521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	5.000.000	4.970.000	99,40
521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	5.000.000	4.965.645	99,31
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	35.072.000	33.712.772	96,12
	JUMLAH	102.886.000	86.937.439	84,49

B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

1. SARANA DAN PRASARANA TANAH, GEDUNG DAN KENDARAAN

a. Keadaan Sarana dan Prasarana Tanah, Gedung dan Kendaraan

Seluruh pengadilan di wilayah D.I. Yogyakarta menempati tanah dan bangunan sendiri dimana status kepemilikan sudah atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Dibawah ini adalah daftar luas tanah dan bangunan gedung pengadilan di Wilayah Di. Yogyakarta :

1. Tanah dan Bangunan Gedung

Tabel 4.13 : Daftar Tanah dan Bangunan Gedung Tahun 2022

No	Satker	Luas Tanah (m ²)	Bangunan (m ²)	Peruntukan	Pemegang Hak Atas Tanah
1	PT Yogyakarta	5.086	2.623	Gedung Kantor	Pemerintah RI Cq. MA RI
			545	Gedung Kantor, Perpustakaan dan Arsip	
2	PN Yogyakarta	7.385	3.610	Gedung Kantor	Pemerintah RI Cq. MA RI
		3.163	1.900	Gedung Tipikor dan PHI	Pemerintah RI Cq. MA RI

No	Satker	Luas Tanah (m ²)	Bangunan (m ²)	Peruntukan	Pemegang Hak Atas Tanah
3	PN Sleman	2.730	3.195	Gedung Kantor	Pemerintah RI Cq. MA RI
4	PN Bantul	2.759	2.284	Gedung Kantor	Pemerintah RI Cq. MA RI
5	PN Wates	2.850	2.264	Gedung Kantor	Pemerintah RI Cq. MA RI
6	PN Wonosari	2.891	2.290	Gedung Kantor	Pemerintah RI Cq. MA RI

2. Rumah Negara

Tabel 4.14 : Daftar Rumah Negara Tahun 2022

No	Satker	Jumlah	Kondisi			Pemegang Hak Atas Tanah
			Baik	Rusak Sedang	Rusak Berat	
1	PT Yogyakarta	10	9	1	-	Pemerintah RI Cq. MA RI
		4	4	-	-	Sultan Ground
2	PN Yogyakarta	19	8	11	-	Pemerintah RI Cq. MA RI
3	PN Sleman	12	11	0	1	Pemerintah RI Cq. MA RI
4	PN Bantul	8	8	-	-	Pemerintah RI Cq. MA RI
5	PN Wates	8	8	-	-	Pemerintah RI Cq. MA RI
6	PN Wonosari	10	10	-	-	Pemerintah RI Cq. MA RI

3. Kendaraan Dinas Roda 2

Tabel 4.15 : Daftar Kendaraan Roda 2 Tahun 2022

No	Satker	Merk	Type	Jumlah	Kondisi
1	PT Yogyakarta	Honda	Supra100	4	Baik
		Honda	Supra 125	4	Baik
		Honda	GLIII	3	Baik
		Honda	NF125	1	Baik
2	PN Yogyakarta	Honda	Supra 125	3	Baik
		Honda	Honda GL. III Sport	1	Baik
		Honda	Honda Supra Fit X	1	Baik
		Honda	Honda Supra Fit	4	Baik
		Honda	Honda GP III Mega Pro	2	Baik
		Honda	Honda NF 100 D	1	Baik
3	PN Sleman	Honda	Vario	1	Baik
4	PN Bantul	Suzuki	A 100	1	Rusak
		Honda	GL-100	1	Rusak
		Honda	Grand C100	1	Baik
		Honda	Supra X	1	Baik

No	Satker	Merk	Type	Jumlah	Kondisi
		Honda	Supra X125	6	Baik
		Honda	Mega Pro	2	Baik
		Honda	Supra Fit	1	Baik
5	PN Wates	Honda	GL	1	Rusak Ringan
		Honda	NF100	2	Baik
		Honda	GL Pro III	2	Baik
		Honda	NF 125 SD	1	Baik
		Suzuki	Smash	4	Baik
		Honda	Supra 125	2	Baik
		Honda	Revo	3	Baik
		Kawasaki	KLX BF	2	Baik
		Honda	CBR 150	2	Baik
		Honda	Vario 110	2	Baik
6	PN Wonosari	Honda	GLP III	5	Baik
		Honda	Supra X125	2	Baik

4. Kendaraan Dinas Roda 4

Tabel 4.16 : Daftar Kendaraan Dinas Roda 4 Tahun 2022

No	Satker	Merk	Type	Jumlah	Kondisi	Keterangan
1	PT Yogyakarta	Toyota	Altis	2	Baik	
		Toyota	Vios	1	Baik	
		Toyota	Innova	2	Baik	
		Toyota	Camry	1	Baik	Sewa
		Toyota	Fortuner	1	Baik	Sewa
		Toyota	Hiace	1	Baik	Sewa
2	PN Yogyakarta	Toyota	Altis	2	Baik	1 unit Sewa
		Toyota	Vios	2	Baik	
		Toyota	Innova G	1	Baik	
		Toyota	Innova V	1	Baik	
		Toyota	Kijang KF 40	1	Baik	Pinja Pakai dari Pemkot Yogyakarta
		Toyota	Kijang LGX	1	Baik	
3	PN Sleman	Toyota	Innova	2	Baik	
		Toyota	Innova	1	Baik	Pinjam Pakai dari Pemda Sleman
4	PN Wates	Toyota	Innova	1	Baik	
		Toyota	Kijang LX	1	Rusak Ringan	
		Isuzu	Panther	1	Baik	
		Toyota	Kijang Innova Venturer 2.0 A/T	1	Baik	
		Toyota	All New Rush TRD A/T	1	Baik	

No	Satker	Merk	Type	Jumlah	Kondisi	Keterangan
5	PN Bantul	Toyota	Innova	2	Baik	
		Toyota	Avanza	1	Baik	
		Toyota	Kijang KF	1	Baik	
6	PN Wonosari	Toyota	Innova	2	Baik	1 unit Pinjam Pakai dari Pemda
		Toyota	Avanza	1	Baik	

b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung

Tabel 4.17 : Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Tahun 2022

No	Satker	Jenis Pengadaan
1	PT Yogyakarta	Penggantian Atap Gedung Sisi Luar
2	PN Yogyakarta	-
3	PN Sleman	-
4	PN Bantul	-
5	PN Wates	-
6	PN Wonosari	-

c. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung

Tabel 4.18 : Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Tahun 2022

No	Satker	Jenis pemeliharaan	Keterangan
1.	PT Yogyakarta	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeliharaan Ruang Kerja Lantai 2 (Hakim Tinggi, Panitera, Sekretaris, Kabag) berupa Pemasangan Wallpaper 2. Pemeliharaan Saluran Air Bersih dan Sumber Air Bersih 3. Pemeliharaan Saluran Air Kotor dan Pembuangan 4. Pemeliharaan Pintu Utama 5. Pemeliharaan Area Ruang Tunggu PTSP, Ruang Kesehatan, Ruang Laktasi 6. Pemeliharaan Gudang 7. Perbaikan Plafon dan pengecatan Dinding Bagian Dalam Gedung Kantor 8. Pengecatan Paving, Pos Satpam dan Pagar Sisi Timur 9. Pemeliharaan Ruang Tamu Utama dan Penutup Panel Listrik 10. Pemeliharaan Toilet Publik 11. Pemeliharaan Rumah Dinas 	
2	PN Yogyakarta	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengecatan Pos Satpam Gedung Tipikor 2. Pemeliharaan Atap Selasar Gedung Kantor 	

No	Satker	Jenis pemeliharaan	Keterangan
		Pengadilan 3. Pemeliharaan Ruang Jaksa 4. Pemeliharaan Toilet 5. Pemeliharaan Ruang Rapat berupa penggantian wallpaper 6. Pemeliharaan Tower Air dan Ruang Genset 7. Pemeliharaan PTSP (Meja e-Berpadu & Layanan disabilitas) 8. Pemeliharaan Keramik Selasar Lantai Dua 9. Pengecatan Gedung Aula 10. Pemeliharaan Parkir Gedung Tipikor 11. Pemeliharaan Atap Tangga 12. Pemeliharaan Ruang Mediasi berupa penggantian Wallpaper 13. Pemeliharaan PTSP (Sekat Ruang Tunggu) 14. Pemeliharaan Kantin Selatan 15. Pemeliharaan PTSP (Backdrop panel listrik) 16. Penggantian Keramik Aula 17. Pekerjaan Ruang Sidang Candra	
3	PN Sleman	1. Pemeliharaan Rumah Dinas Ketua dan Wakil Ketua 2. Pemeliharaan Kebocoran Atap Gedung Pengadilan 3. Pemeliharaan Gedung Pengadilan Anak 4. Pengecatan Lahan Parkir dan Titik Kumpul	
4	PN Bantul	1. Perbaikan dan pavingblock halaman kantor 2. Perbaikan kebocoran atap dan plafon 3. Perbaikan area parkir pegawai 4. Perbaikan tulang tembok 5. Pembuatan <i>dropzone</i> 6. Pembuatan <i>pavingblock</i> taman 7. Ramp / jalur disabilitas ruang sidang	
5	PN Wates	1. Pemeliharaan Ruang Sidang 2. Pemeliharaan Rumah Dinas	
6	PN Wonosari	1. Penataan Halaman Kantor 2. Pengecatan Dinding Depan dan Samping kantor 3. Renovasi Atap Gedung Kantor 4. Renovasi Tempat Parkir Roda 2	

d. Penghapusan Sarana dan Prasarana Gedung

Tabel 4.19 : Penghapusan Sarana dan Prasarana Gedung Tahun 2022

No	Satker	Tanggal	Jenis Barang	Keterangan
1	PT Yogyakarta	28 Juli 2022	Genteng Metal	Sisa Bongkaran
2	PN Yogyakarta	-	-	-
3	PN Sleman	-	-	-
4	PN Bantul			
5	PN Wates	-	-	-
6	PN Wonosari	-	-	-

b. SARANA DAN PRASARANA FASILITAS GEDUNG

Hal-hal yang dapat menunjang dalam pelaksanaan tugas Pengadilan antara lain adanya sarana dan prasarana fasilitas penunjang yang memadai. Dalam hal ini sarana dan prasarana fasilitas Gedung pada Wilayah Pengadilan Tinggi Yogyakarta Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

a. Keadaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung

Tabel 4.20 : Keadaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung Tahun 2022

No	Nama Barang	Jumlah Sarana dan Prasarana					
		PT Yogyakarta	PN Yogyakarta	PN Sleman	PN Bantul	PN Wates	PN Wonosari
1	Komputer	62	121	68	54	74	52
2	Laptop	27	58	26	26	21	26
3	Infokus/LCD	5	2	5	1	15	2
4	PABX	1	3	1	1	1	3
5	Mesin Ketik	3	25	-	-	1	9
6	Mesin Stensil	1	-	1	-	-	1
7	Mesin Fotokopi	2	2	1	-	1	1
8	AC	62	64	50	25	37	27
9	Faximile	4	6	1	1	1	3
10	Brankas	3	5	4	2	1	2
11	Sound system	7	8	4	2	11	3
12	Mesin Absensi	2	3	2	2	2	2
13	Tabung Pemadam Api	20	1	-	-	5	10
14	CCTV	32	5	2	1	8	1
15	UPS	49	5	9	6	7	10
16	Genset	1	2	1	2	1	1
17	Handy Cam	1	2	1	-	-	-
18	Pesawat telepon	35	8	15	3	1	13
19	Printer	30	43	41	28	48	33
20	Scanner	8	8	7	3	4	4
21	Server	3	3	3	3	2	3
22	Lemari Kayu	26	73	49	34	60	28
23	Lemari Besi	67	30	10	2	6	25
24	Filling Kabinet Kayu	4	-	2	1	-	-
25	Filling Kabinet Besi	45	25	24	27	8	3
26	Buffet	4	8	-	2	-	-

27	Rak	5	74	36	52	19	21
28	Meja Kerja Kayu	134	233	250	116	115	143
29	Kursi Kayu	33	68	128	42	115	48
30	Kursi Besi Metal	264	544	298	220	174	31
31	Sice	27	17	23	11	13	16
32	Bangku Panjang Kayu	3	64	67	26	-	25
33	Meja Rapat	22	3	1	2	6	-
34	Meja Komputer	23	12	6	5	20	9
35	Meja Resepsionis	2	5	2	1	1	1
37	Kamera	4	2	1	1	1	1
38	HT	5	4	6	2	4	4
39	Sekat	-	7	10	3	4	3
40	Meja Sidang	-	-	6	4	4	3
41	Kursi Hakim	-	-	20	12	12	7
42	Meja Telepon	-	3	10	-	-	2
43	Mesin Hitung	-	1	5	-	-	4
44	Kipas Angin	-	28	33	14	-	10
45	Televisi	6	19	1	3	2	14
46	RIG	1	-	-	-	-	-
47	Kulkas	1	2	-	-	-	-
48	External Hardisk	3	-	1	-	-	5
49	Hardisk	2	-	-	-	-	5
50	Anti Virus	-	-	-	-	1	5
51	Acces Point	9	9	2	2	5	13
52	Rak Server	1	1	1	1	1	3
53	Router	1	4	2	2	1	2
54	Air Curtain	-	0	3	-	-	-
55	Switch Hub	3			1	3	-

b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung

Tabel 4.21 : Pengadaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung Tahun 2022

No	Satker	Jenis Pengadaan
1	PT Yogyakarta	<ul style="list-style-type: none"> - 8 unit Sewa Mesin Fotocopy untuk PT dan PN se D.I. Yogyakarta - 34 unit PC - 2 unit Printer

No	Satker	Jenis Pengadaan
		<ul style="list-style-type: none"> - 3 unit Mesin Penghancur Kertas - 20 unit Lemari Arsip - 21 unit AC Split - 1 unit Barrier Gate - 3 unit Kamera Mirrorles - 1 unit Lensa Kamera - 1 unit Gimbal Stabilizer Kamera - 5 unit Meja Biro - 5 unit Kursi Kerja - 1 unit Drone - 1 paket CCTV 16 titik - Pengadaan Pakaian Dinas
2	PN Yogyakarta	<ul style="list-style-type: none"> - 26 unit PC - 2 unit Printer
3	PN Sleman	<ul style="list-style-type: none"> - 30 unit Meja Kerja Kayu - 30 unit Kursi Besi/Metal - 1 unit Sice - 4 unit Loudspeaker - 7 unit Microphone - 1 unit Bracket Standing - 1 unit Audio Mixing Portable - 1 unit UPS - 1 unit LCD Monitor - 1 unit Camera Conference - 24 unit PC - 4 unit Laptop - 2 unit Printer
4	PN Bantul	<ul style="list-style-type: none"> - 13 unit PC - 1 unit Genset - 5 unit Printer - 1 unit Video Conference Set
5	PN Wates	-
6	PN Wonosari	<ul style="list-style-type: none"> - 4 unit Loudspeaker - 1 unit Bracket Standing - 1 unit Audio Mixing Portable - 1 unit UPS - 5 unit PC - 4 unit Laptop - 2 unit Printer

c. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung

Tabel 4.22 : Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung Tahun 2022

No	Satker	Jenis Pemeliharaan
1	PT Yogyakarta	1. Pemeliharaan peralatan mesin : <ul style="list-style-type: none"> - Perawatan kendaraan dinas - Perawatan genset - Perawatan AC, PC, Printer, sound, elektrikal, dll 2. Pemeliharaan jaringan : <ul style="list-style-type: none"> - Jaringan listrik - Jaringan telpon - Jaringan internet
2	PN Yogyakarta	1. Pemeliharaan peralatan mesin : <ul style="list-style-type: none"> - Perawatan kendaraan dinas - Perawatan genset - Perawatan AC, PC, Printer, Fax, soundsystem, proyektor, 2. Pemeliharaan jaringan : <ul style="list-style-type: none"> - Jaringan CCTV - Jaringan internet
3	PN Sleman	1. Pemeliharaan peralatan mesin : <ul style="list-style-type: none"> - Perawatan Kendaraan Dinas - Perawatan Genset - Perawatan AC, PC, Printer, Fax, Fotokopi, Sound, Elektrikal, dll 2. Pemeliharaan jaringan : <ul style="list-style-type: none"> - Jaringan Listrik - Jaringan Telepon, PABX - Jaringan Internet - CCTV
4	PN Bantul	1. Pemeliharaan peralatan mesin : <ul style="list-style-type: none"> - Perawatan kendaraan dinas - Perawatan AC, laptop, PC, Printer, 2. Pemeliharaan jaringan : <ul style="list-style-type: none"> - Listrik, - Internet
5	PN Wates	1. Pemeliharaan peralatan mesin : <ul style="list-style-type: none"> - Perawatan kendaraan dinas - Perawatan genset - AC, Laptop, PC, Printer, Fotocopy, sound system, elektrikal, dll 2. Pemeliharaan jaringan : <ul style="list-style-type: none"> - Jaringan listrik - Jaringan telpon - Jaringan internet
6	PN Wonosari	1. Pemeliharaan peralatan mesin : <ul style="list-style-type: none"> - Perawatan kendaraan dinas - Perawatan AC, Laptop, PC, Printer, Fax, Fotocopy, sound system, elektrikal, dll 2. Pemeliharaan jaringan : <ul style="list-style-type: none"> - Jaringan listrik - Jaringan internet

d. Penghapusan Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung

Tabel 4.23 : Penghapusan Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung Tahun 2022

No	Satker	Tanggal	Jenis Barang	Keterangan
1	PT Yogyakarta	-	-	-
2	PN Yogyakarta	-	-	-
3	PN Sleman	-	-	-
4	PN Bantul			
5	PN Wates	-	-	-
6	PN Wonosari	20 Mei 2022	Sepeda Motor	2 unit
		24 Agustus 2022	Software Komputer	13 buah Aset Tak Berwujud

2. SARANA DAN PRASARANA PENCEGAHAN COVID 19.

Adanya pandemi virus Covid-19 berdampak pada pelaksanaan kegiatan perkantoran Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan Pengadilan Negeri se Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Yogyakarta.

Dalam upaya mencegah penyebaran virus Covid-19, telah dilakukan upaya pencegahan yang meliputi :

a. Kesiapan Sumber Daya Manusia

Kegiatan ini diwujudkan dalam penerapan perilaku sesuai protokol pencegahan penyebaran covid-19 yaitu :

1. Menerbitkan kebijakan pimpinan tentang pembentukan Satgas Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Satuan Kerja masing-masing.
2. Vaksinasi Booster Covid-19 bagi Hakim, ASN dan PPNPN.
3. Persidangan Perkara Pidana pada Pengadilan Negeri dilakukan secara *online* dengan memanfaatkan *Video Conference*.
4. Sosialisasi dan edukasi penerapan protokol kesehatan oleh pimpinan pada setiap kesempatan, dan menyerahkan kepada panitera, sekretaris serta panmud dan kasubbag untuk melakukan monitoring pada bagian masing-masing atas penerapan protokol kesehatan, diantaranya adalah kewajiban menggunakan masker, selalu mencuci tangan/

menggunakan hand sanitizer, menjaga jarak/ membatasi frekuensi bertemu secara fisik antar pegawai.

b. Sarana dan Prasarana Preventif

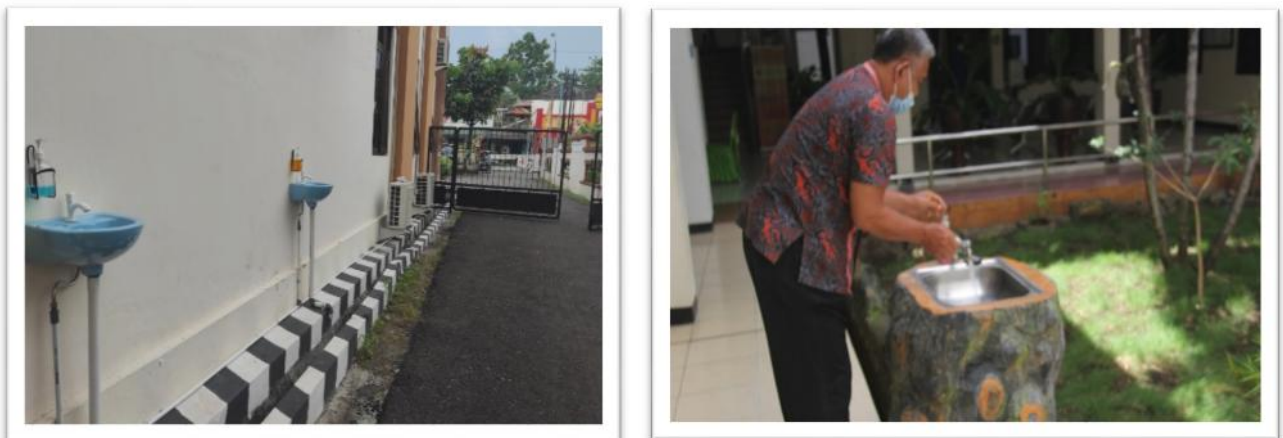
Sarana dan prasarana preventif yang disediakan Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan Pengadilan Negeri se Wilayah D.I. Yogyakarta, antara lain :

- Thermogun dan Thermodetektor



Gambar 4.1 : Thermogun dan Thermodetektor

- Washtafel dan sabun cuci tangan



Gambar 4.2 : Pemasangan Washtafel dan sabun cuci tangan

- Handsanitizer, ditempatkan disetiap ruang sidang dan pintu masuk Gedung



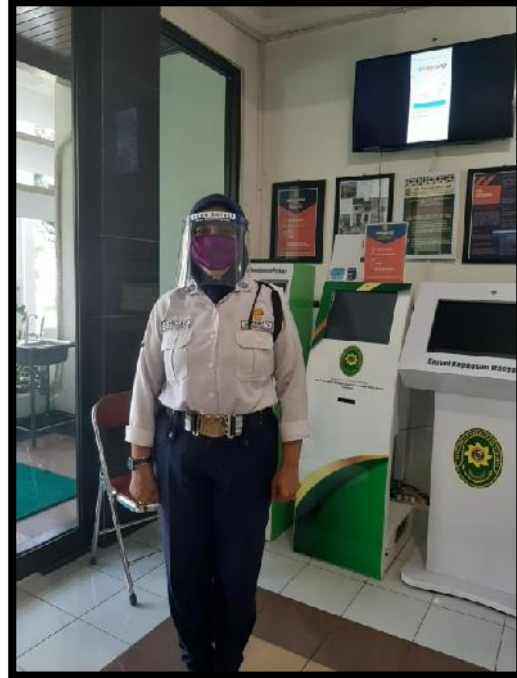
Gambar 4.3 : Penyediaan dan Pemasangan Handsanitizer

- Droplet Protektor atau Penyekat Akrilik PTSP (Devider) di PTSP, Ruang Sidang dan ruang publik lainnya



Gambar 4.4 : Droplet Protektor atau Penyekat Akrilik PTSP dan Ruang Sidang

- Masker
- Sarung Tangan
- Face shield



Gambar 4.5 : Petugas menggunakan face shield

- Kursi berjarak pada lobi dan pada ruang tunggu



Gambar 4.6 : Pemasangan Kursi Berjarak Pada Lobi dan Ruang Tunggu

- Desinfektan dan Ozonisasi



Gambar 4.7 : Desinfektan Aerosol untuk berkas dan Alat Ozonisasi

- Sarana edukasi seperti leaflet, banner dan poster di lingkungan Pengadilan



Gambar 4.8 : Sarana Edukasi Seperti Leaflet, Banner Dan Poster

- Sarana sidang online.

c. Tindakan Pencegahan

- Setiap pengunjung yang masuk melakukan cuci tangan dan cek suhu tubuh terlebih dahulu serta harus menggunakan masker, menjaga jarak, serta terdapat tanda untuk physical distancing.

- Pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Wates, Pintu Utama menggunakan Pintu Otomatis untuk meminimalisir sentuhan.



Gambar 4.9 : Pemeriksaan suhu pengunjung

- Untuk memelihara dan atau membantu meningkatkan kekebalan tubuh aparatur pengadilan maka diberikan paket suplemen / multivitamin kepada seluruh aparatur pengadilan.
- Dilakukan penyemprotan secara rutin menggunakan cairan disinfektan maupun ozonisasi untuk seluruh lingkungan kantor, terutama sarana publik.



Gambar 4.10 : Penyemprotan Desinfektan dan Ozonosasi

- Rapid Test / Swabtest



Gambar 4.11 : Pelaksanaan Rapid Test dan Swabtest

- Melaksanakan sidang secara online, Mediasi Online dan Rapat Online



Gambar 4.12 : Pelaksanaan Persidangan Secara Daring/Online di Pengadilan Negeri

- Vaksinasi



Gambar 4.13 : Pelaksanaan Vaksinasi

C. Pengelolaan Teknologi Informasi

Dalam rangka mendukung administrasi perkara berbasis elektronik khususnya pelaksanaan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan E-Court serta E-Office, dukungan teknologi informasi mutlak dibutuhkan. Pembenahan dan peningkatan teknologi informasi merupakan salah satu prioritas demi terwujudnya keterbukaan informasi, akuntabilitas, kredibilitas dan transparansi serta menjadi Pengadilan yang modern dengan berbasis teknologi informasi terpadu.

Untuk mewujudkan pelaksanaan administrasi pengelolaan yang tertib, modern dan akuntabel, Mahkamah Agung dan jajaran dibawahnya telah berkomitmen bahwa seluruh Badan Peradilan di Mahkamah Agung akan beralih dari administrasi Pengadilan yang dilakukan secara manual ke administrasi yang berbasis teknologi informasi.

Pengadilan Tinggi Yogyakarta memiliki komitmen dan kebijakan yang salah satunya adalah dengan pendampingan secara terus menerus baik dari tingkat supervisi, operator maupun user baik ke dalam instansi Pengadilan Tinggi Yogyakarta maupun kepada seluruh Pengadilan Negeri di bawahnya dalam melakukan implementasi terhadap setiap aplikasi yang dilakukan secara rutin.

Keadaan perangkat teknologi informasi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan Pengadilan Negeri se D.I. Yogyakarta Tahun 2022, adalah sebagai berikut :

Tabel 4. 24. Keadaan Teknologi Informasi dan Pendukungnya Tahun 2022

No	Satuan Kerja	Keadaan Teknologi Informasi dan pendukungnya									
		Internet	Server	PC	Laptop	Printer	Access Point	Router	Switch Hub	LCD Informasi	KiosK
1	PT Yogyakarta	140 Mbps	4	48	30	18	9	1	4	2	-
2	PN Yogyakarta	180 Mbps	3	121	58	43	9	2	16	5	5
3	PN Sleman	120 Mbps	3	68	41	41	22	2	5	11	3
4	PN Bantul	120 Mbps	3	46	30	24	5	2	1	1	1
5	PN Wates	150 Mbps	2	74	21	48	9	2	10	3	1
6	PN Wonosari	100 Mbps	4	56	26	33	13	2	11	5	1



Gambar 4. 14. Server Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri se Wilayah D.I. Yogyakarta

1. Implementasi e-Court

Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan Pengadilan Negeri se D.I. Yogyakarta telah melaksanakan E-Court sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Secara garis besar, proses E-Court dimulai pendaftaran perkara (*e-filling*), pembayaran elektronik (*e-payment*), pemanggilan (*e-summons*) dan persidangan secara elektronik (*e-litigation*). Dalam implementasinya pada

tingkat banding, dilakukan verifikasi terhadap Pengguna Terdaftar yaitu Advokat yang telah melakukan pendaftaran secara mandiri. Adapun jumlah Advokat yang sudah terdaftar dan terverifikasi di E-Court Pengadilan Tinggi Yogyakarta adalah:

Tabel 4. 25. Keadaan Verifikasi Advokat pada aplikasi E-Court Pengadilan Tinggi Yogyakarta

No	Akun Advokat	Jumlah
1	Data advokat yang terdaftar di database	2233
2	Jumlah data advokat yang sudah diverifikasi Pengadilan Tinggi	1307
3	Jumlah data advokat yang sudah diverifikasi namun Data Masih salah (belum diperbaiki)	94

Data diatas merupakan data keadaan verifikasi Advokat pada aplikasi E-Court Pengadilan Tinggi Yogyakarta. Data advokat yang ada di aplikasi E-Court sebanyak 2.233 advokat. Data Advokat yang sudah mendaftar akun dan telah ter-verifikasi sebanyak 1.307 akun dan data yang sudah diverifikasi namun Data Masih salah (belum diperbaiki) sebanyak 94 akun.

Adapun statistik implementasi E-Court pada Pengadilan Negeri se D.I.Yogyakarta adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 26. Jumlah Perkara E-Court Pengadilan Se Wilayah Yogyakarta Tahun 2022

No	Satker	Sisa Perkara 2021	Perkara Masuk	Cabut	Putus	Sisa Perkara 2022
1	Pengadilan Tinggi Yogyakarta	0	48	0	45	3
2	Pengadilan Negeri Yogyakarta	89	629	62	580	76
3	Pengadilan Negeri Sleman	127	1020	0	1022	125
4	Pengadilan Negeri Bantul	0	191	0	162	29
5	Pengadilan Negeri Wates	0	450	0	433	17
6	Pengadilan Negeri Wonosari	21	298	0	286	33
Jumlah		237	2636	62	2935	283



Gambar 4. 15. Pojok e-court corner Pada Peradilan Umum se Wilayah D.I. Yogyakarta

2. Implementasi SIPP

SIPP dari waktu ke waktu terus mengalami pembenahan serta peningkatan fasilitas. Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan seluruh Pengadilan Negeri se D.I. Yogyakarta telah menerapkan SIPP, dimana data perkara pada SIPP Tingkat Banding dan SIPP Pengadilan Negeri saling terkoneksi sehingga informasi perkara dapat diakses masyarakat cukup melalui SIPP Pengadilan Negeri, baik itu proses pada tingkat pertama maupun banding. Disamping itu, putusan yang diupload ke SIPP secara otomatis juga terupload ke Direktori Putusan Mahkamah Agung RI.

Secara rutin, database SIPP pada Pengadilan Negeri dilakukan sinkronisasi, baik ke Mahkamah Agung, website masing-masing Pengadilan Negeri juga ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta. Terdapat 4 (empat) Pengadilan Negeri yang menjadi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) Sistem Peradilan Pidana Terpadu, yaitu:

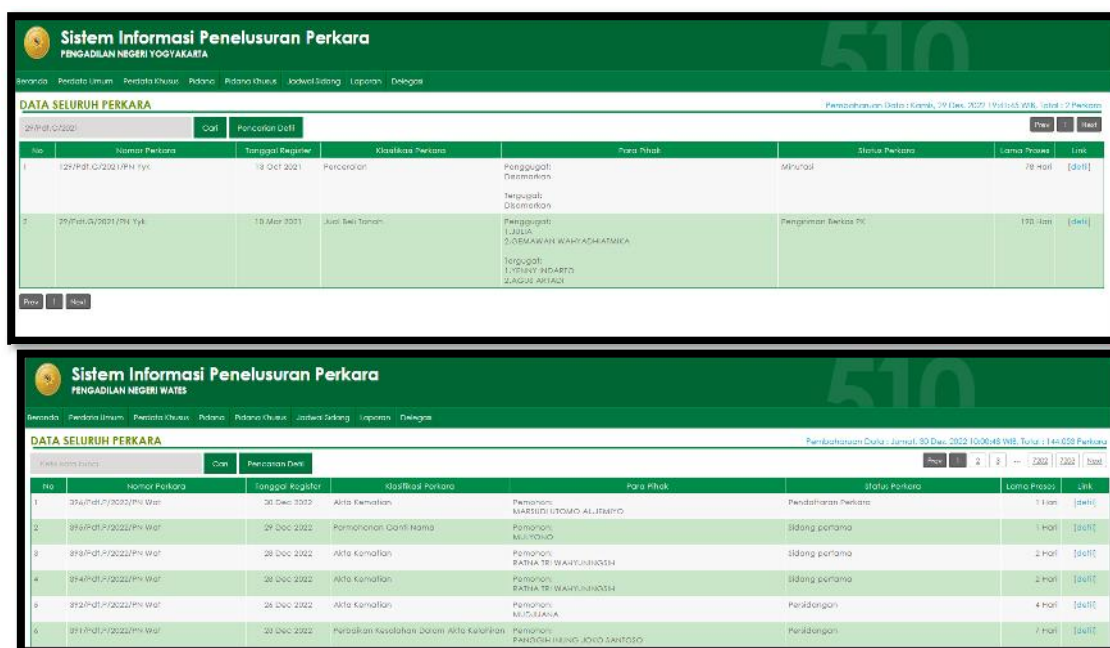
1. Pengadilan Negeri Yogyakarta
2. Pengadilan Negeri Sleman
3. Pengadilan Negeri Bantul
4. Pengadilan Negeri Wates

Pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta menggunakan SIPP versi 4.1.1, sedangkan pada Pengadilan Negeri menggunakan SIPP versi 5.1.0.

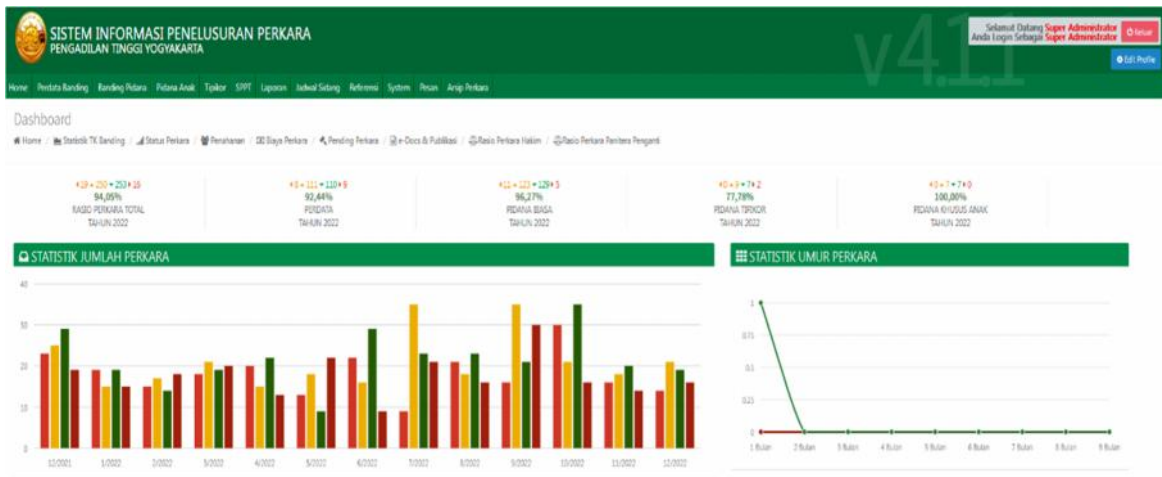
Alamat SIPP Web pada Pengadilan Negeri se D.I. Yogyakarta adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 27. Alamat SIPP Pengadilan Negeri se Wilayah D.I. Yogyakarta

No	Satker	Alamat SIPP
1	PT Yogyakarta	banding.mahkamahagung.go.id
2	PN Yogyakarta	sipp.pn-yogyakarta.go.id
3	PN Sleman	pn-sleman.go.id/sipp
4	PN Bantul	sipp.pn-bantul.go.id
5	PN Wates	sipp.pn-wates.go.id
6	PN Wonosari	sipp.pn-wonosari.go.id



Gambar 4. 16 Tampilan SIPP Web Pengadilan Negeri



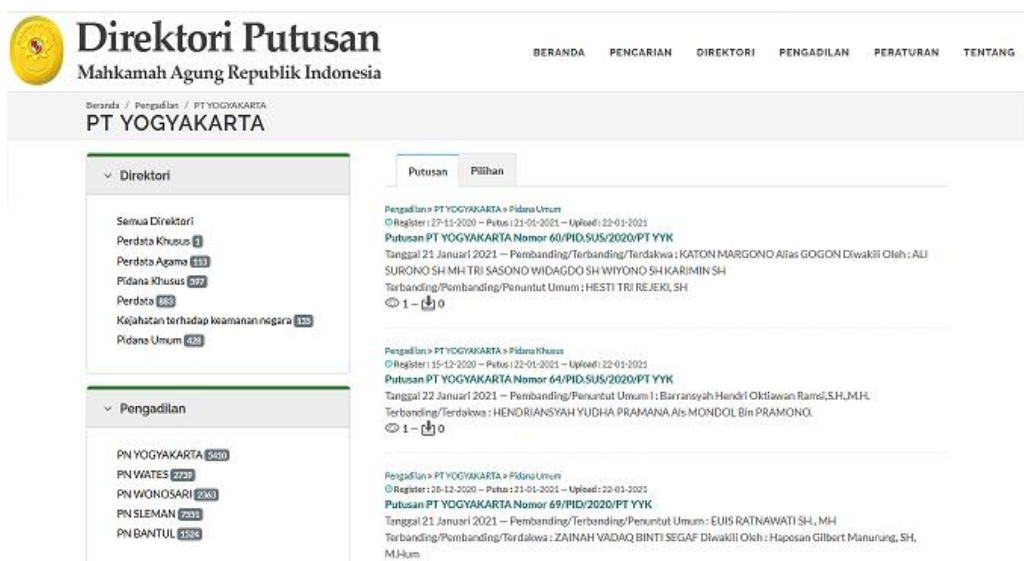
Gambar 4. 17. Tampilan SIPP Web Pengadilan Tingkat Banding

3. Implementasi Aplikasi Pendukung

1. Direktori Putusan Mahkamah Agung RI

Direktori Putusan merupakan aplikasi yang digunakan untuk mengupload perkara yang menempuh upaya hukum baik banding, kasasi maupun PK dan perkara tingkat pertama yang telah berkekuatan hukum tetap. Namun setelah implementasi SIPP versi 3.2.0, data putusan merupakan hasil sinkronisasi dari SIPP pengadilan. Direktori Putusan Mahkamah Agung RI untuk Peradilan Umum Wilayah D.I. Yogyakarta dapat diakses di:

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/pengadilan/profil/pengadilan/pt-yogyakarta.html>



Gambar 4. 18. Tampilan Direktori Putusan Web Pengadilan Tinggi Yogyakarta

2. Aplikasi Eraterang

ERATERANG atau elektronik surat keterangan merupakan produk aplikasi dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, dan berlaku di semua Pengadilan Negeri / Tingkat Pertama di seluruh Indonesia. Eraterang sebagai media elektronik dalam memberikan pelayanan permohonan Surat Keterangan pada Pengadilan Negeri yang dapat diakses oleh pemohon dimanapun ia berada (selama ada akses internet via HP/ Gawai dan Komputer/ PC).

Jenis Surat Keterangan yang bisa dilayani melalui aplikasi Eraterang :

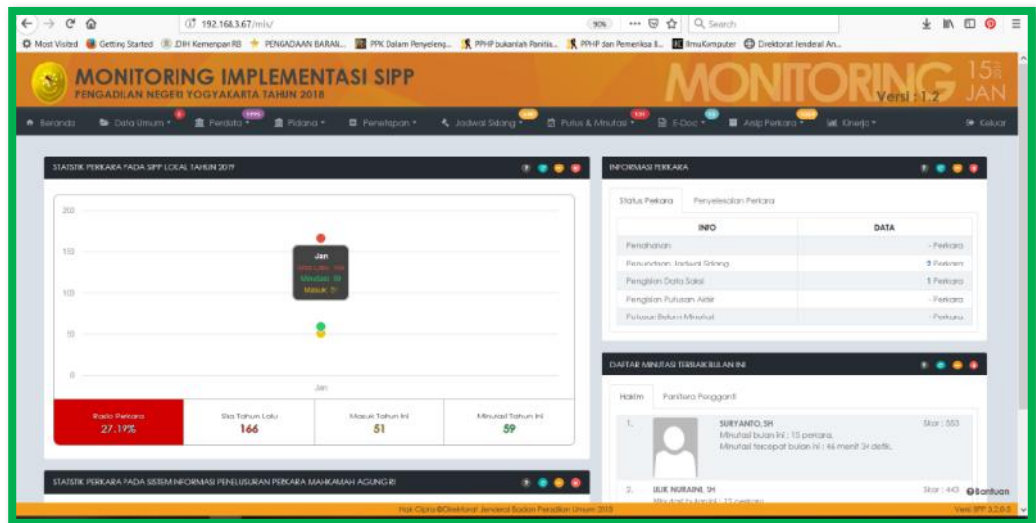
- Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit;
- Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana;
- Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya;
- Surat Keterangan di Pidana karena Kealpaan Ringan atau Alasan Politik;
- Surat Keterangan Tidak memiliki tanggungan Utang Secara Perorangan dan/atau Secara Badan Hukum yang menjadi Tanggung Jawabnya yang Merugikan Keuangan Negara.



Gambar 4. 19 Tampilan Web Aplikasi Eraterang Peradilan Tingkat Pertama

3. Aplikasi Monitoring SIPP

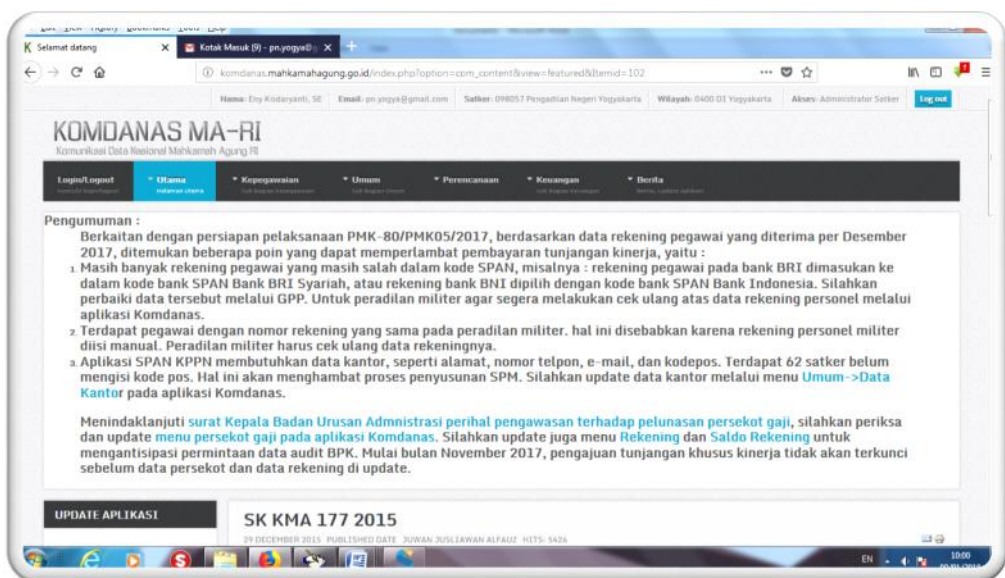
Aplikasi Monitoring adalah sebuah aplikasi turunan dari SIPP yang digunakan untuk memonitoring dan evaluasi implementasi SIPP di pengadilan. Fitur-fitur aplikasi monitoring cukup membantu dalam evaluasi dan pengawasan internal, namun sangat perlu dikembangkan lagi sesuai kebutuhan terhadap informasi pengawasan SIPP.



Gambar 4.20. Tampilan Web Aplikasi Monitoring SIPP Peradilan Tingkat Pertama

4. Aplikasi KOMDANAS

KOMDANAS atau Komunikasi Data Nasional merupakan sebuah sistem aplikasi komputasi terpadu yang berfungsi sebagai media penyimpanan dan database sentral berisi data-data aset, kepegawaian, keuangan, dan remunerasi. Penggunaan teknologi informasi yang diterapkan dalam bentuk aplikasi KOMDANAS ini akan mampu meningkatkan efisiensi dan produktivitas seluruh satuan kerja di lingkungan Mahkamah Agung.



Gambar 4. 21 Tampilan Web Aplikasi Komdanas bagi semua Peradilan

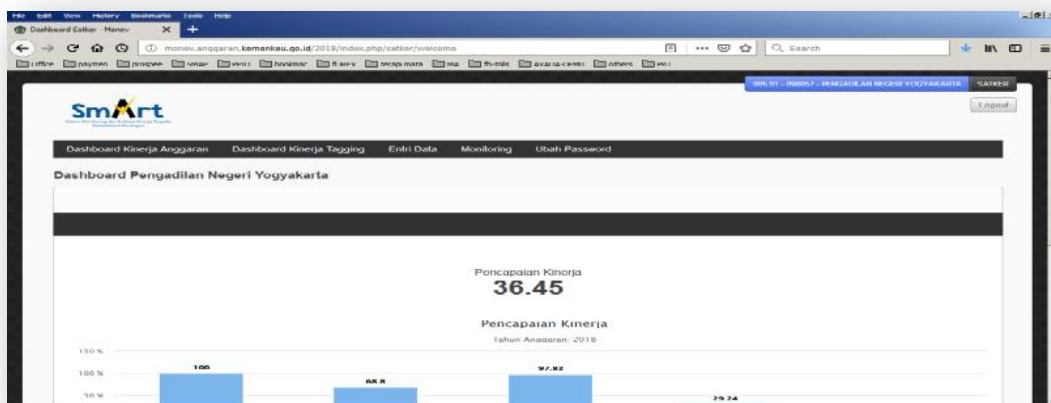
5. Aplikasi SIKEP dan aplikasi kepegawaian dari BKN
Sistem Informasi Kepegawaian Mahkamah Agung RI.



Gambar 4. 22 Tampilan Web Aplikasi SIKEP bagi semua Peradilan

6. Aplikasi Monev SMART

Sistem monitoring dan evaluasi kinerja terpadu atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran.



Gambar 4. 23 Tampilan Web Aplikasi Monev SMART bagi semua Peradilan

7. Aplikasi SIMARI MA RI

System Informasi Mahkamah Agung RI yang terintegrasi, baik dari system informasi perkara, system informasi keuangan dsb.



Gambar 4. 24 Tampilan Web Aplikasi SIMARI MA RI bagi semua Peradilan

8. Aplikasi SIMPONI

System informasi penerimaan negara bukan pajak secara on line.



Gambar 4. 25 Tampilan Web Aplikasi SIMPONI

9. Aplikasi OMSPAN

Aplikasi yang digunakan dalam rangka memantau transaksi dalam system perbendaharaan dan anggaran Negara (SPAN) yang menyajikan informasi sesuai kebutuhan / reporting.

No	Nomor SP2D	Tanggal Sesi SP2D	Tanggal SP2D	Nilai SP2D	Nomor Invoice	Tanggal Invoice	Jenis SPM	Jenis SP2D	Deskripsi	Cek Akun	Data SP2D (PKB)
1	1703017010001566	04-01-2018	31-12-2017	0	001307,098057/2017	31-12-2017	GTLP NB-HL	LAINNYA	Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan Untuk Keperluan Belanja Modal Sebagai Pengesahan Atas Pertanggungjawaban TUP Tahun Anggaran 2017 sesuai SPP No. 00139 tanggal 31-12-2017	Cek Akun	<input type="checkbox"/>
2	1703017010001565	04-01-2018	31-12-2017	0	001381,098057/2017	31-12-2017	GTLP NB-HL	LAINNYA	Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan Untuk Keperluan Belanja Barang Sebagai Pengesahan Atas Pertanggungjawaban TUP Tahun Anggaran 2017 sesuai SPP No. 00138 tanggal 31-12-2017	Cek Akun	<input type="checkbox"/>
3	1703017010001564	04-01-2018	31-12-2017	0	001377,098057/2017	31-12-2017	GTLP NB-HL	LAINNYA	Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan Untuk Keperluan Belanja Barang Sebagai Pengesahan Atas Pertanggungjawaban TUP Tahun Anggaran 2017 sesuai SPP No. 00137 tanggal 31-12-2017	Cek Akun	<input type="checkbox"/>
4	1703017010001567	04-01-2018	31-12-2017	0	001407,098057/2017	31-12-2017	GTLP NB-HL	LAINNYA	Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan Untuk Keperluan Belanja Barang Sebagai Pengesahan Atas Pertanggungjawaban TUP Tahun Anggaran 2017 sesuai SPP No. 00140 tanggal 31-12-2017	Cek Akun	<input type="checkbox"/>

Gambar 4. 26 Tampilan Web Aplikasi OMSPAN

10. Aplikasi MONEV BAPPENAS PP. 39

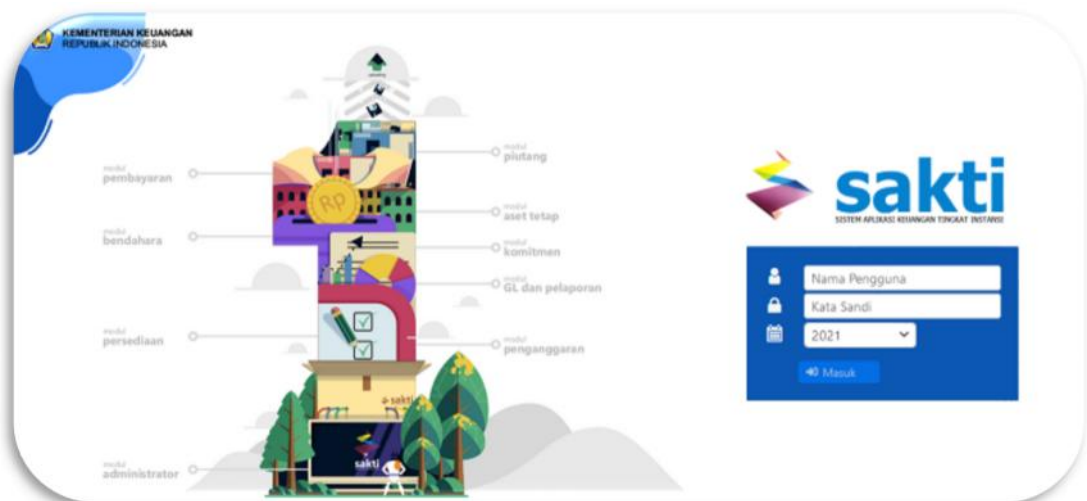
Aplikasi e-Monev Bappenas merupakan aplikasi pelaporan data realisasi hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan tahun berjalan. Aplikasi ini berfungsi sebagai alat pelaporan data realisasi hasil pemantauan yang berjenjang dengan satuan kerja (Satker) sebagai ujung tombak penyedia data realisasi. Level KL/Biro Perencanaan, UKE-I, dan UKE-II dapat memanfaatkan data pemantauan satker di level komponen untuk menetapkan realisasi di level output serta indikator-indikator kinerjanya.



Gambar 4. 27 Tampilan Web Aplikasi MONEV BAPPENAS PP. 39

11. Aplikasi SAKTI Kemenkeu

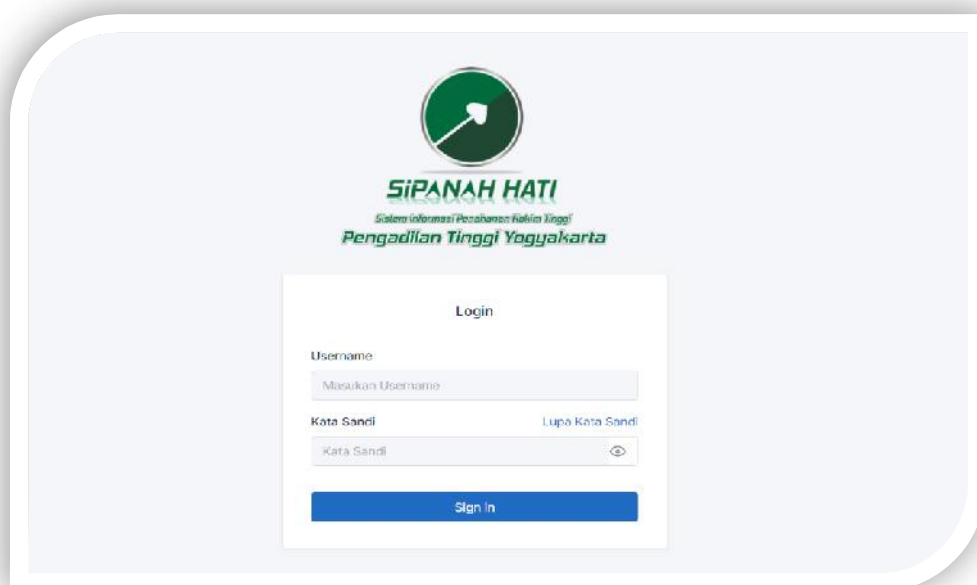
Aplikasi SAKTI atau Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi adalah aplikasi yang mengintegrasikan dari berbagai aplikasi yang telah digunakan oleh Satuan Kerja (Satker) dalam pengelolaan anggaran keuangan pemerintah. Saat ini satker menggunakan sekitar 8 (delapan) aplikasi dalam pelaksanaan anggaran. Penggunaan aplikasi-aplikasi tersebut tidak jarang harus melakukan input data yang sama secara manual dan berulang-ulang. Kondisi ini tidak efektif dan menyita banyak waktu dalam melakukan pekerjaan administratif. Melalui aplikasi SAKTI, aplikasi-aplikasi tersebut akan mengakses database yang sama (single database) sehingga menghindari duplikasi data dan mengurangi pekerjaan administratif.



Gambar 4. 28 Tampilan Web Aplikasi SAKTI Kemenkeu

12. Aplikasi Sipanah Hati

Aplikasi Sipanah Hati (Sistem Penahanan Hakim Tinggi) merupakan sebuah sistem untuk mengajukan perpanjangan penahanan di Pengadilan Tinggi Yogyakarta. Sistem ini sesuai dengan Pasal 29 ayat 1 dan ayat 2. Pihak yang terlibat dalam sistem ini adalah Pengadilan Tinggi Yogyakarta, Pengadilan Negeri Se-wilayah DIY, Kejaksaan Negeri Se-Wilayah DIY dan Rutan/Lapas Se-wilayah DIY. Sistem ini dapat mempercepat proses penyampaian informasi perpanjangan penahanan. Aplikasi Sipanah Hati dapat diakses melalui alamat *website* <https://sipanahhati.pt-yogyakarta.go.id/>.



. Gambar 4. 29 Tampilan Aplikasi Sipanah Hati

13. Aplikasi Angkringan

Aplikasi Angkringan (Ajang konsultasi Masyarakat Ingin Keadilan) merupakan portal layanan Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang digunakan untuk konsultasi online, edukasi serta talk show interaktif untuk menampung aspirasi masyarakat. Masyarakat bisa mendaftar akun dan konsultasi secara gratis. Masyarakat akan dilayani oleh Petugas Pos Bantuan Hukum (Posbakum) yang bertugas di seluruh Pengadilan Negeri di D.I. Yogyakarta pada Jam Pelayanan yang berlaku. Masyarakat tidak perlu data ke Pengadilan Negeri, cukup dengan membuka alamat *website* <https://angkringan.pt-yogyakarta.go.id/> dari gadget/gawai masing-masing



Gambar 4. 30 Tampilan Aplikasi Angkringan

14. Formulir Digital e-Primari

e-Primari (Permohonan Izin Magang dan Riset secara elektronik) merupakan formulir digital yang digunakan untuk mengajukan permohonan izin magang dan riset di Pengadilan Tinggi Yogyakarta. Formulir Digital e-Primari dapat diakses melalui alamat *website* <https://bit.ly/izinmagangdanriset>. Tujuan dari e-primari adalah sebagai berikut:

-) Mempermudah mahasiswa dalam mengajukan permohonan izin magang dan riset,
-) Mempercepat proses permohonan izin magang dan riset,
-) Mempermudah lembaga dan mahasiswa untuk mengetahui persetujuan adanya izin magang dan riset dari Pengadilan Tinggi Yogyakarta.



Gambar 4. 31 Tampilan Formulir Digital e-Primari

15. Aplikasi EMOSA

Elektronik Permohonan Sumpah Advokat merupakan Portal Layanan Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang digunakan untuk pengajuan permohonan sumpah advokat secara online dan dapat diakses melalui alamat website <https://www.emosa.pt-yogyakarta.go.id>



Gambar 4. 32 Tampilan Aplikasi EMOSA

16. Aplikasi e-Berpadu

Elektronik Berkas Pidana Terpadu (e-Berpadu) adalah Integrasi Berkas Pidana antar Penegak Hukum untuk Layanan Permohonan Izin Pengeledahan, Izin Penyitaan, Perpanjangan Penahanan, Penangguhan Penahanan, Pelimpahan Berkas Pidana Elektronik, Permohonan Penetapan Diversi, Izin Besuk Tahanan Online oleh Masyarakat tanpa harus datang ke Pengadilan.



Gambar 4. 33 Tampilan Aplikasi e-BERPADU

BAB V

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

A. Akreditasi Penjaminan Mutu

Program Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum yang diterapkan di Pengadilan Tinggi Yogyakarta merupakan bentuk pembinaan yang inovatif, terstruktur, sistematis dan berkelanjutan. Program akreditasi mendorong optimalisasi sarana, prasarana dan sistem manajemen untuk mewujudkan performa, kinerja dan pelayanan publik yang prima.

Pengadilan sebagai benteng terakhir penegak hukum harus terus menerus memperbaiki sistem Peradilan guna meningkatkan kepercayaan publik, salah satu wujud dari Badan peradilan yang Agung adalah Pengadilan yang berorientasi pada pelayanan publik yang prima.

Memberikan pelayanan publik kepada masyarakat atau pencari keadilan merupakan salah satu elemen dalam standar sertifikasi penjaminan mutu. Program ini terus dikelola agar proses dan dampaknya dapat diarahkan pada hasil yang positif terutama dalam perbaikan sistem, kinerja, pelayanan publik, kerjasama dan kepemimpinan.

Dasar Pelaksanaan Akreditasi Penjaminan Mutu adalah Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI nomor 1639/DJU/SK/OT.01/9/2015, sesuai dengan standar sertifikasi ISO 9001 : 2015.

Kebijakan Mutu Pengadilan Tinggi Yogyakarta :

- Memberikan Pelayanan yang berkualitas bagi pencari keadilan dan masyarakat dengan tulus dan ikhlas
- Memberikan kepuasan bagi masyarakat pencari keadilan
- Melakukan peningkatan pelayanan dengan tepat waktu
- Memenuhi persyaratan dan peraturan yang terkait dengan kegiatan Pengadilan Tinggi Yogyakarta
- Meningkatkan profesionalisme aparat Pengadilan
- Menyediakan sarana dan prasarana yang nyaman dan memudahkan masyarakat pencari keadilan

- Memahami permasalahan pencari keadilan dan memberikan solusi secara tepat
- Melakukan evaluasi secara berkala dan berkesinambungan terhadap sistem Manajemen Mutu dan pelaksanaannya.

Untuk Pengadilan Tinggi Yogyakarta telah mendapatkan penilaian akreditasi dengan nilai A (Excelent) dan 4 (empat) satuan kerja wilayah Pengadilan Tinggi Yogyakarta juga sudah terakreditasi dengan mendapatkan nilai A (Excelent) yaitu Pengadilan Negeri Yogyakarta, Pengadilan Negeri Wates, Pengadilan Negeri Bantul, Pengadilan Negeri Wonosari, sedangkan 1 (satu) satuan kerja yang mendapatkan nilai B yaitu Pengadilan Negeri Sleman.

Adapun kriteria penilaian yang digunakan meliputi tujuh area yaitu: 1) Kepemimpinan (leadership); 2) Perencanaan Strategis (strategic planning); 3) Fokus Pelanggan (customer focus); 4) Sistem Dokumentasi (document system); 5) Manajemen Sumber Daya (resource management); 6) Manajemen Proses (process management); dan 7) Hasil Kinerja (performance results).

Dibawah ini adalah hasil penilaian yang telah diraih oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan Pengadilan Negeri se wilayah Pengadilan Tinggi Yogyakarta :

1. Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada tahun 2022 masih menyandang predikat terakreditasi dengan nilai A (Excellent) sesuai dengan Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum Nomor : TAPM.030/QMR/SERTIFIKAT/3/2021
2. Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tahun 2022 masih menyandang predikat terakreditasi dengan nilai A (Excellent) sesuai dengan Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum Nomor : TAPM.007/QMR/SERTIFIKAT/4/2022
3. Pengadilan Negeri Sleman pada tahun 2022 menyandang predikat terakreditasi dengan nilai A (Excellent) sesuai dengan Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum Nomor : TAPM.005/QMR/SERTIFIKAT/09/2016
4. Pengadilan Negeri Wates pada tahun 2022 mendapatkan juara 1 Lomba Akreditasi Penjamin Mutu Terbaik Tingkat Nasional dengan kategori

Pengadilan negeri Kelas IB. Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI, Nomor 2474/DJU/SK/HM 02.3/12/2022 tentang penetapan Pemenang Lomba Bagi Satuan Kerja di Lingkungan Badan Peradilan Umum.

5. Pengadilan Negeri Bantul pada tahun 2022 masih menyandang predikat terakreditasi dengan nilai A (Excellent) sesuai dengan Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum Nomor : TAPM.381/QMR/SERTIFIKAT/3/2021
6. Pengadilan Negeri Wonosari pada tahun 2022 masih menyandang predikat terakreditasi dengan nilai A (Excellent) sesuai dengan Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum Nomor : TAPM.391/QMR/SERTIFIKAT/7/2021.



Gambar 5.1 : Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Umum se Wilayah D.I. Yogyakarta

B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Pelayanan Publik di setiap Instansi terus ditingkatkan dan di permudah. Saat ini, Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan jajaran Pengadilan di bawahnya senantiasa berupaya menata, meningkatkan, dan menyederhanakan pelayanan publik dengan cara menerapkan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Melalui PTSP ini Pengadilan Tinggi Yogyakarta telah memberikan pelayanan prima dalam hal pelayanan publik yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap awal permohonan sampai akhir/ diterbitkannya sebuah dokumen dilakukan di dalam satu tempat. Wujud keseriusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan jajaran Pengadilan di bawahnya terhadap penerapan PTSP tersebut dilakukan dengan dikeluarkannya Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi Dan Pengadilan Negeri.

PTSP tersebut dilakukan dengan memberikan pelayanan yang terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan pengadilan melalui satu pintu. Penyelenggaraan PTSP ini senantiasa dilaksanakan dengan prinsip-prinsip dasar berupa keterpaduan, efektif, efisien, ekonomis, koordinasi, akuntabilitas, dan aksesibilitas. Ruang lingkup PTSP di Pengadilan Tinggi Yogyakarta ini meliputi seluruh pelayanan administrasi yang menjadi lingkup kompetensi/kewenangannya sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan dan peraturan perundangan lainnya yang berlaku.

Penerapan PTSP sendiri tidak lain memiliki tujuan untuk:

- 1) Mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur sesuai dengan standar yang telah ditetapkan,
- 2) Memberikan pelayanan yang prima, akuntabel, dan anti korupsi, kolusi, nepotisme.

Selain itu, aspek penting dilaksanakannya program PTSP ini merupakan wujud dari pelayanan publik yang prima dalam rangka melaksanakan kegiatan-kegiatan atau kebutuhan-kebutuhan yang diselenggarakan oleh lembaga

Pengadilan terhadap seluruh masyarakat yang mencari keadilan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Layanan pokok PTSP di lingkungan peradilan umum di Wilayah D.I. Yogyakarta meliputi :

- 1) permohonan informasi;
- 2) pendaftaran perkara;
- 3) pembayaran biaya;
- 4) penyerahan produk pengadilan; dan
- 5) pengajuan keluhan/pengaduan.

Sedangkan untuk layanan penunjang PTSP dilakukan oleh Penyedia Jasa Eksternal, meliputi posbakum; bank; PT Pos dan pihak lainnya yang telah mengadakan kerja sama secara resmi dengan Pengadilan.

C. Zona Integritas Menuju WBK/WBBM

Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM merupakan salah satu upaya pencegahan korupsi sebagaimana telah diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Kegiatan ini merupakan salah satu kebijakan Mahkamah Agung yang harus dilaksanakan oleh seluruh pengadilan pada empat lingkungan peradilan, termasuk di lingkungan Pengadilan Tinggi Yogyakarta.

Pembangunan Zona Integritas pada satuan kerja di lingkungan peradilan umum di wilayah D.I. Yogyakarta mengacu pada beberapa aturan diantaranya:

- a. Permenpan RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- c. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 58/KMA/SK/III/2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi

dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya;

Zona integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Pembangunan Zona Integritas dianggap sebagai role model Reformasi Birokrasi dalam penegakan integritas dan pelayanan berkualitas.

Pada tahun 2019, dari lingkungan peradilan umum di wilayah D.I. Yogyakarta terdapat 3 satker yang telah meraih predikat WBK dari Kemenpan & RB yaitu Pengadilan Tinggi Yogyakarta, Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Wates. Untuk tahun 2020, dari lingkungan peradilan umum di wilayah D.I. Yogyakarta terdapat 1 satker yang memperoleh predikat WBK yaitu Pengadilan Negeri Wonosari dan 1 satker yang memperoleh predikat WBBM yaitu Pengadilan Negeri Wates. pada tahun 2021 terdapat satu (1) satker di wilayah D.I. Yogyakarta yang memperoleh predikat WBK yaitu Pengadilan Negeri Bantul.



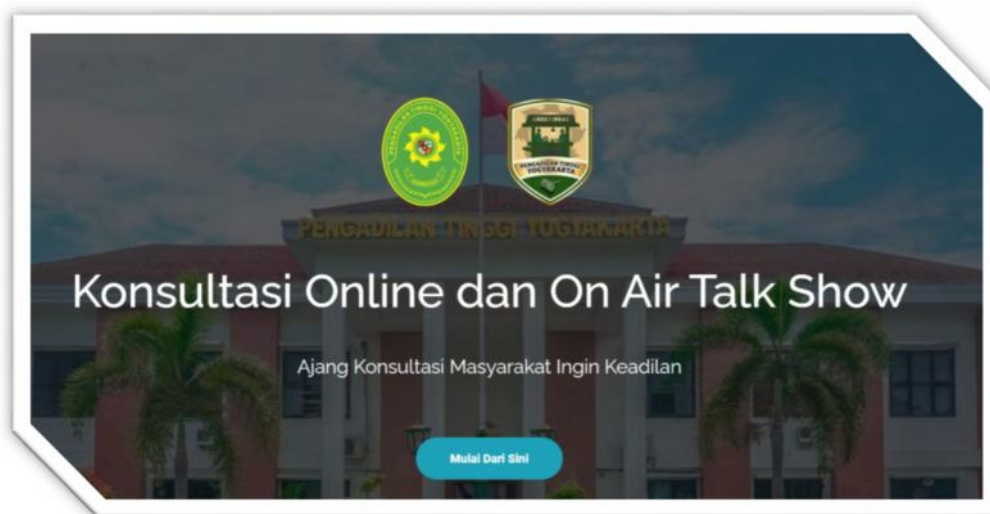
Gambar 5.2 : Sertifikat Predikat WBK dan WBBM 2 Peradilan Umum di Wilayah D.I. Yogyakarta

D. Inovasi Pelayanan Publik

1. ANGKRINGAN Pengadilan Tinggi Yogyakarta

Aplikasi Angkringan adalah portal informasi sebagai ajang konsultasi secara online seputar masalah Hukum dan keadilan dengan para

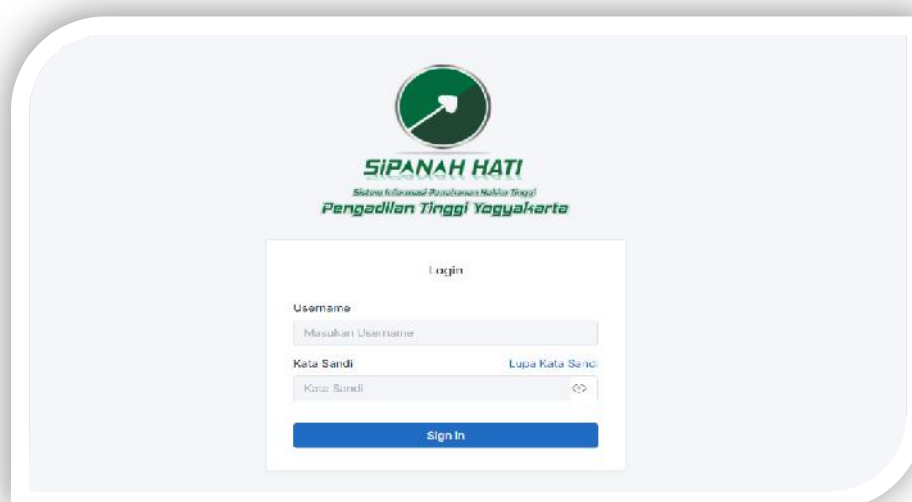
petugas POSBANKUM khususnya yang terdaftar di Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Yogyakarta , Masyarakat dapat mengakses melalui . <https://angkringan.pt-yogyakarta.go.id>



Gambar 5.3 : Aplikasi Angkringan Pengadilan Tinggi Yogyakarta

2. SIPANAH HATI

Aplikasi Sipanah Hati adalah merupakan portal layanan perpanjangan Penahanan Hakim Tinggi yang dapat diakses oleh Pengadilan Negeri Pengaju permohonan perpanjangan penahanan dan stakeholder pengadilan Tinggiim Yogyakarta yaitu Kejaksaan dan Lembaga Pemasyarakatan maupun rutan sewilayah D.I. Yogyakarta.



Gambar 5.4 : Aplikasi Sipanah Hati Pengadilan Tinggi Yogyakarta

3. e-Primari dan emosa

e-primari (Permohonan Izin Magang dan Riset Secara Elektronik) merupakan formulir digital yang digunakan untuk mengajukan permohonan izin magang dan riset di Pengadilan Tinggi Yogyakarta.

emosa (elektronik permohonan sumpah advokat) merupakan permohonan elektronik yang dapat digunakan oleh organisasi advokat yang ingin mendaftarkan anggotanya untuk bisa di sumpah. E- primari dan emosa dapat diakses melalui web Pengadilan Tinggi Yogyakarta.



Gambar 5.5 : Tampilan e-Primari dan emosa Pada Website Pengadilan Tinggi Yogyakarta

4. Ruang Command Center

Command Center adalah sebuah ruangan khusus yang difungsikan sebagai Ruang Pusat Komando, Pembinaan, Pengawasan ataupun kegiatan lain yang dilakukan secara Daring. Tanpa harus berkunjung ke satuan kerja, Pimpinan Pengadilan Tinggi Yogyakarta bisa memantau langsung kinerja pegawai di setiap Pengadilan Negeri. Melalui tatap muka saecara online, pimpinan bisa memastikan kedisiplinan pegawai dan mengevaluasi apakah program-program yang sudah direncanakan sudah dijalankan dengan baik.

Disamping itu, masing-masing satker bisa memaparkan capaian yang telah dilakukan berikut kendala apa saja yang sedang dihadapi. Inventarisasi masalah tersebut nantinya menjadi data primer untuk pengambilan kebijakan bagi pimpinan tingkat wilayah ke depan.

Dengan difungsikannya inovasi ini maka diharapkan tugas pokok Pengadilan Tinggi Yogyakarta sebagai salah satu kawal depan Mahkamah

Agung di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dapat terlaksana secara maksimal.



Gambar 5.6 : Ruang Command Center pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta

5. Media Center

Pengadilan Negeri Sleman dan Pengadilan Negeri Wates membuat inovasi ruangan Media Center, ruangan tersebut di peruntukan sebagai tempat media conference. Dengan ruangan Media Center akan memberikan kenyamanan dalam melakukan Konferensi Pers dengan Wartawan ataupun public.



Gambar 5.7 : Ruang Media Center Pengadilan Negeri Wates dan Sleman

6. Antrian Sidang

Antrian Sidang adalah layanan kepada Pencari Keadilan dimana Para Pihak yang berperkara akan dipanggil dan disebut nama pihak untuk memasuki ruang sidang dengan sistem yang sudah terkoneksi dengan Aplikasi Absensi Pihak (Roll Sidang) di Meja Informasi dan Terkoneksi dengan data perkara di SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara). Aplikasi ini berdasarkan kedatangan dan kelengkapan para pihak, yaitu dengan cara para pihak melaporkan kedatangan ke meja informasi. Para pihak yang sudah lengkap akan disidangkan terlebih dahulu, disamping itu masyarakat dapat mengetahui persidangan suatu perkara berkaitan dengan

ruang sidang, status persidangan atau sudah selesai sidang. Pemanggilan Pihak dapat dilakukan dengan menggunakan Personal Komputer, Laptop atau Handphone Android.

Dengan adanya aplikasi ini diharapkan adanya peningkatan kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap layanan pengadilan.



Gambar 5.8 : Tampilan Inovasi Layanan Antrian Sidang di Pengadilan Negeri Yogyakarta

Di Pengadilan Negeri Bantul juga ada inovasi Locket konfirmasi dan antrian sidang, yaitu sebuah loket bagi para pihak yang terjadwal bersidang di hari tersebut untuk melakukan konfirmasi/ laporan kehadiran kepada petugas. Apabila para pihak telah hadir semua, maka petugas akan lapor kepada panitera pengganti untuk disampaikan majelis hakim dan kemudian pihak-pihak dengan nomor perkara tersebut akan masuk dalam antrian sidang. Setelah majelis siap di ruang sidang, maka petugas memanggil pihak-pihak dalam perkara tersebut untuk memasuki ruang sidang menggunakan teknologi panggilan suara pada aplikasi konfirmasi dan antrian sidang tersebut.

Fasilitas ini berguna untuk memudahkan, mempercepat dan menertibkan proses persidangan baik untuk pihak yang akan bersidang maupun untuk aparat peradilan. Hal juga mendukung pengembangan zona integritas karena para pihak tidak akan bertemu langsung dengan panitera atau hakim secara langsung sebelum persidangan.



Gambar 5.9 : Inovasi Loker konfirmasi dan Antrian Sidang di Pengadilan Negeri Bantul

7. Antrian PTSP

Antrian PTSP Pengadilan Negeri adalah layanan kepada Pencari Keadilan dimana Para Pihak yang berperkara akan dipanggil dan disebut nama pihak untuk memasuki Meja PTSP dengan sistem yang sudah terkoneksi dengan Mesin Antrian dan Media Informasi. Dengan adanya aplikasi ini diharapkan adanya peningkatan kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap layanan pengadilan di Pengadilan Negeri se Wilayah D.I. Yogyakarta.

) Sebelum adanya inovasi

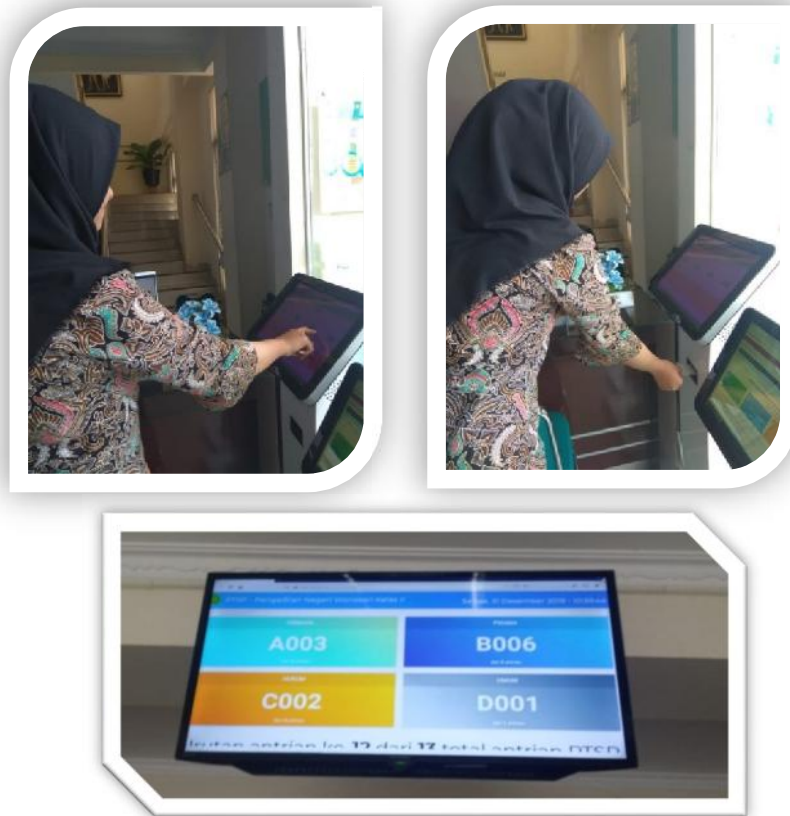
Pengunjung datang ke pengadilan langsung menuju meja PTSP, petugas tidak dapat mengetahui layanan mana yang dituju oleh pengunjung tersebut, harus bertanya lisan terlebih dahulu. Pelayanan PTSP belum tertata dengan baik & belum dapat dilakukan rekapitulasi pengunjung.

) Sesudah adanya inovasi

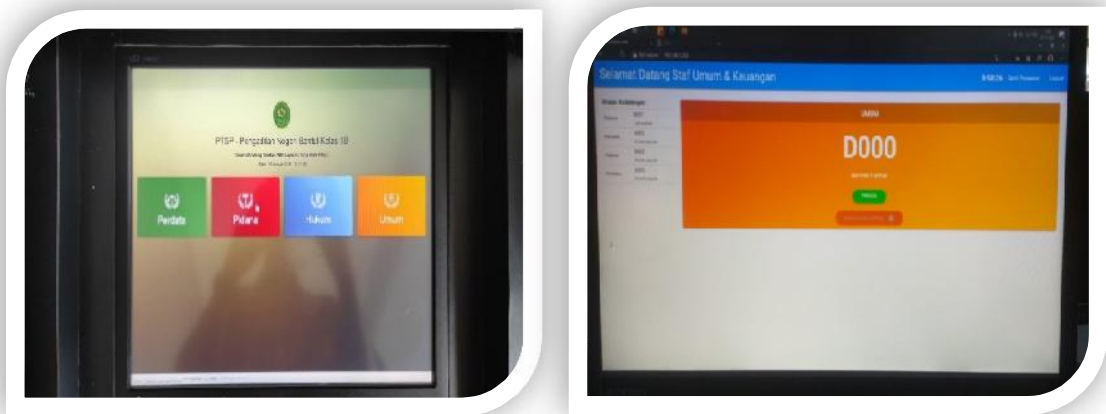
Pelayanan PTSP menjadi lebih tertata dengan baik, pengguna pengadilan mengambil nomor antrian sesuai dengan layanan yang dituju (pidana/perdata/hukum/umum) sesuai dengan keperluannya. Pada ruang tunggu disediakan TV LED untuk menampilkan urutan antrian dan panggilan dilakukan oleh system dengan audio yang jelas. Laporan rekapitulasi pengunjung juga dapat dilihat dengan jelas.



Gambar 5.10 : Inovasi Antrian PTSP di Pengadilan Negeri Yogyakarta



Gambar 5.11 : Inovasi Antrian PTSP di Pengadilan Negeri Wates



Gambar 5.12 : Inovasi Antrian PTSP di Pengadilan Negeri Bantul



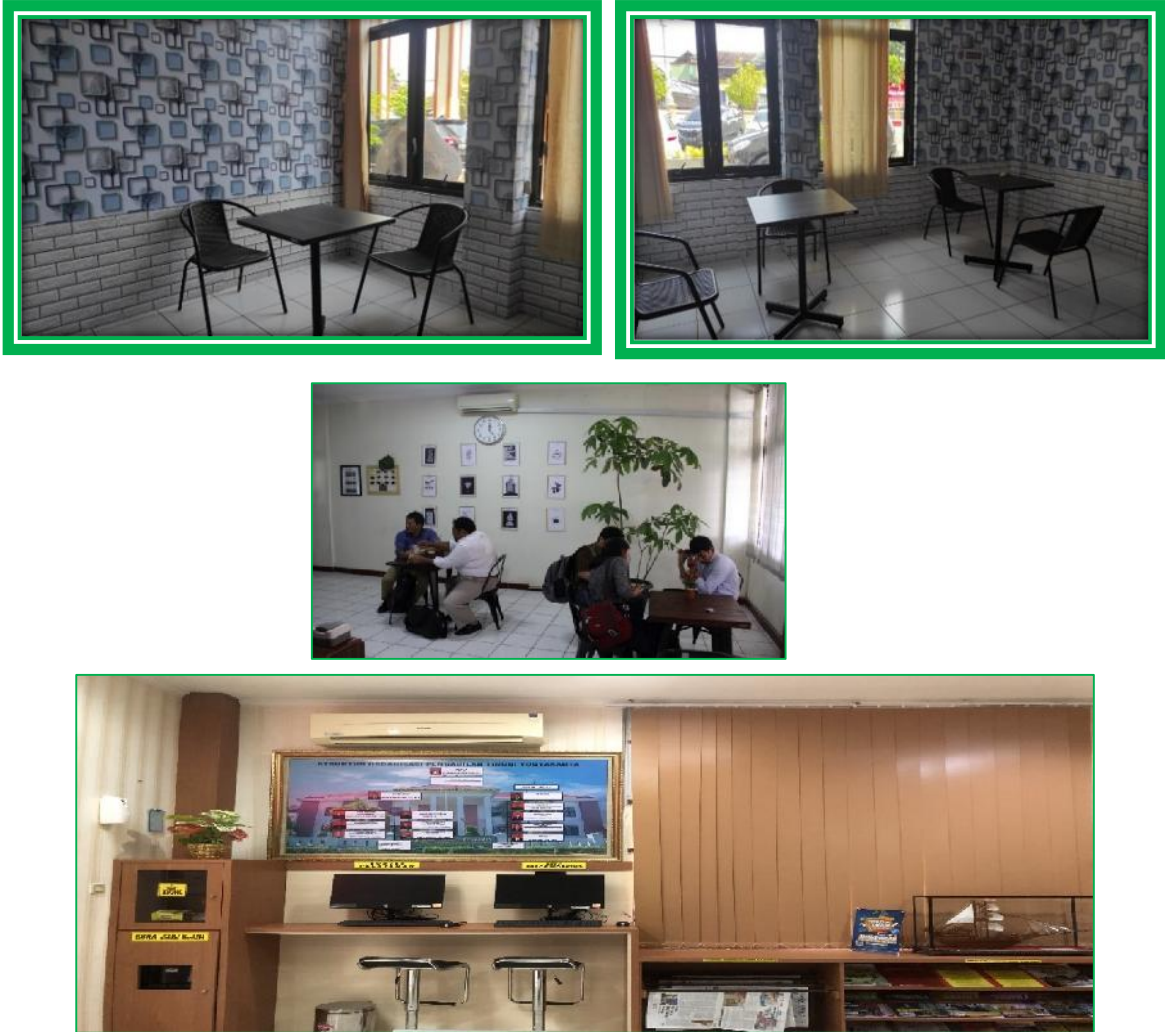
Gambar 5.13 : Inovasi Antrian PTSP di Pengadilan Negeri Sleman



Gambar 5.14 : Inovasi Antrian PTSP di Pengadilan Negeri Wonosari

8. Co-working space

Co-working space merupakan inovasi yang ada di Pengadilan Tinggi Yogyakarta, Pengadilan Negeri Yogyakarta, Pengadilan Negeri Bantul yang merupakan sebuah area/ ruang yang disediakan bagi pengunjung pengadilan Negeri Bantul yang ingin tetap dapat mengerjakan tugas lainnya sembari menunggu persidangan atau hasil layanan. Di area ini disediakan fasilitas meja kursi dan free wifi



Gambar 5.15 : Inovasi Co-working Space di Pengadilan Tinggi Yogyakarta, Pengadilan Negeri Yogyakarta, dan Pengadilan Negeri Bantul

Sedangkan di Pengadilan Negeri Wates, pengunjung dapat sambil bekerja ketika menunggu persidangan di Media Edukasi.



Gambar 5.16 : Inovasi Media Edukasi di Pengadilan Negeri Wates

9. Ruang Pengasuhan Anak

Ruang Pengasuhan Anak di Pengadilan Negeri Yogyakarta melayani pengasuhan anak selama orang tuanya di ruang pemeriksaan/ persidangan. Layanan ini bekerjasama dengan Fak. Psikologi UAD (MoU ditandatangani sejak 14 Juli 2015). Khusus petugas Psikolog dan konselor setiap hari selasa dan kamis jam 11.00-13.00 WIB. Hal ini juga sekaligus bisa untuk tempat praktik kuliah lapangan dan obyek penelitian bagi mahasiswa.



Gambar 5.17 : Ruang Pengasuhan Anak di Pengadilan Negeri Yogyakarta

Di Pengadilan Negeri Sleman juga sudah meluncurkan inovasi Tempat Pengasuhan Anak, dan Pengadilan Negeri Wates anak-anak yang ikut orang tua datang ke Pengadilan dapat menunggu sambil bermain di Tempat Pengasuhan Anak.



Gambar 5.18 : Ruang Edukasi Anak di Pengadilan Negeri Wates dan Sleman

10. Ruang Menyusui

Ruang menyusui bagi para pencari keadilan / pengunjung di Pengadilan Negeri Yogyakarta, Pengadilan Negeri Sleman dan Pengadilan Negeri Wates

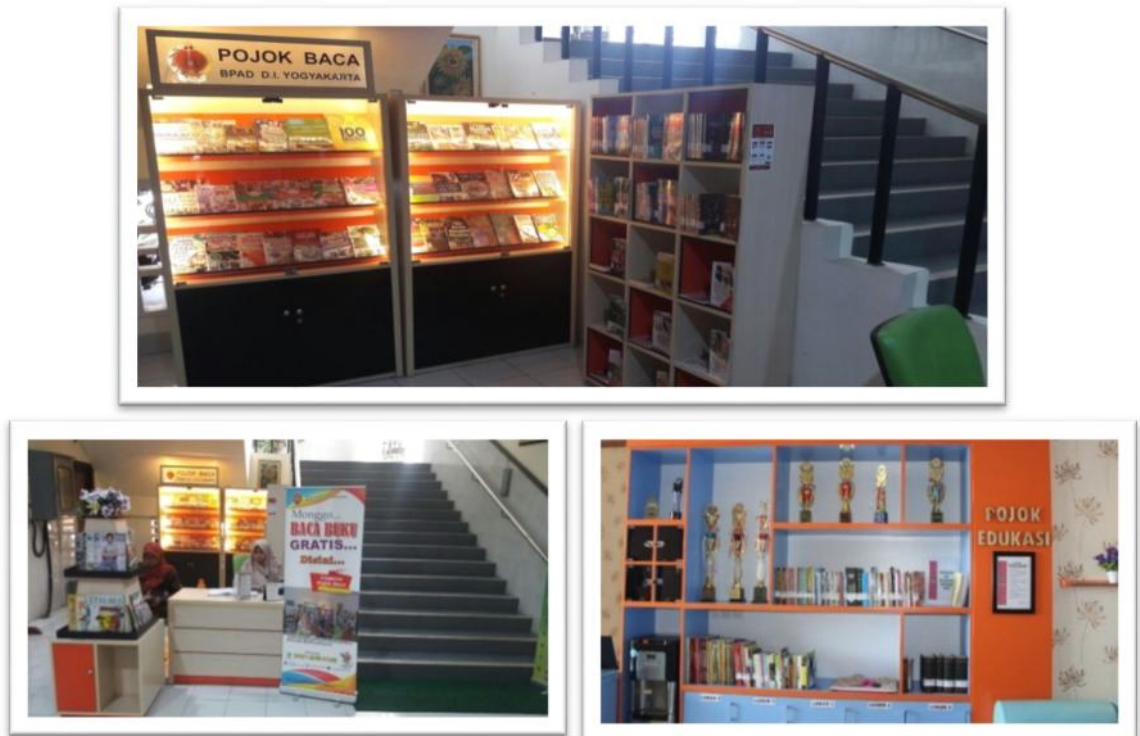


Gambar 5.19 : Ruang Menyusui di Pengadilan Negeri Yogyakarta, Wates dan Sleman

11. Pojok Baca

Pojok baca merupakan Inovasi dari Pengadilan Negeri Yogyakarta, diharapkan dapat mengeliminasi rasa jenuh masyarakat saat menunggu dengan menyediakan bahan pustaka yang ringan, rekreatif dan menghibur, maupun bahan pustaka yang dapat menjadi sumber inspirasi dan semangat bagi pembacanya. Layanan Pojok Baca ini bekerja sama dengan BPAD DIY. Masing-masing pojok baca akan dilengkapi 100 eksemplar buku yang setiap dua bulan sekali akan diganti. Buku-buku yang disediakan meliputi berbagai subjek seperti kesehatan, pengetahuan umum populer, buku-buku praktis, keagamaan serta fiksi.

Sedangkan di Pengadilan Negeri Wates ada inovasi Pojok Edukasi, dimana pengunjung pengadilan dapat menambah ilmu pengetahuan dengan membaca buku yang sudah disediakan oleh pengadilan sambil menunggu layanan di pojok edukasi.

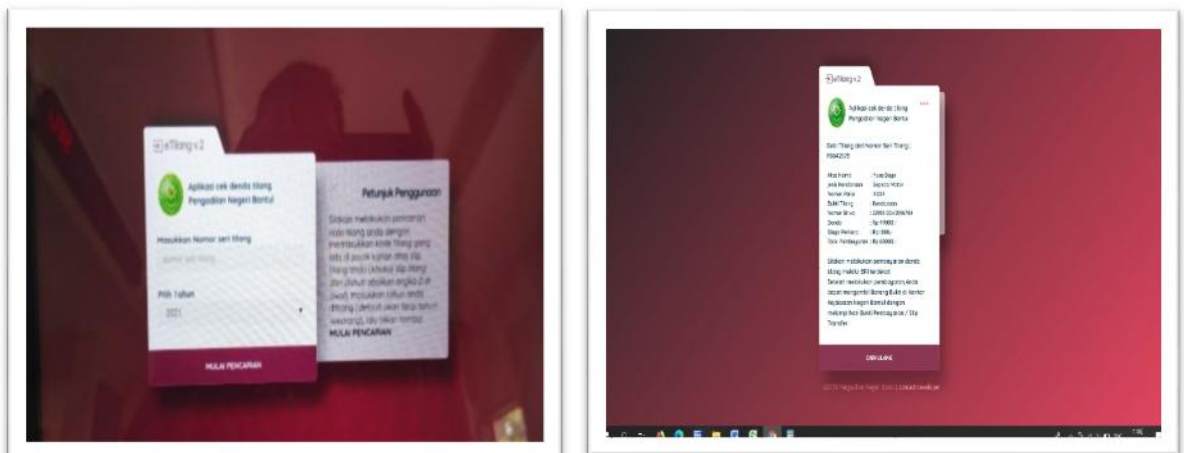


Gambar 5.20 : Inovasi Pojok Baca dan Media Edukasi di PN Yogyakarta dan PN Wates

12. E-tilang

Adalah sebuah aplikasi yang digunakan oleh masyarakat pelanggar lalu lintas untuk mengetahui besaran denda yang harus dibayar tanpa harus datang ke kantor pengadilan. Aplikasi ini dapat diakses pada website Pengadilan Negeri Bantul.

Cara kerja aplikasi ini adalah cukup dengan memasukkan nomor seri surat tilang, maka akan muncul informasi nama pelanggar, barang bukti dan besaran denda yang harus dibayar.



Gambar 5.21 : Inovasi Aplikasi E-tilang di Pengadilan Negeri Bantul

13. Syarat Layanan

Merupakan aplikasi informasi tentang syarat-syarat atas layanan yang ada di pengadilan. Bagi masyarakat yang belum mengetahui syarat apa saja yang harus diserahkan untuk mendapatkan suatu layanan dapat menggunakan aplikasi ini secara mandiri. Aplikasi ini disediakan di portal aplikasi komputer kiosk layar sentuh di bagian depan/ pintu masuk kantor pengadilan.



Gambar 5.22 : Inovasi Syarat layanan di Pengadilan Negeri Bantul

14. Warung Kejujuran

Warung kejujuran tersebut dikonsept untuk seluruh pengunjung maupun pegawai pengadilan. Pembeli mengambil barang, membayar dan mengambil pengembalian sendiri di kotak yang telah disediakan. Keuntungan dari hasil penjualan akan dimanfaatkan untuk kesejahteraan teman-teman honorer.



Gambar 5.23 : Inovasi Media Edukasi Kantin Kejujuran di Pengadilan Negeri Wates

Di Pengadilan Negeri Wates juga memiliki inovasi Warung kejujuran yaitu Media Edukasi berupa kantin kejujuran, pengunjung bisa ambil bayar (ambyar) makan dan minuman secara mandiri untuk melatih kejujuran.



Gambar 5.24 : Inovasi Warung kejujuran di Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Sleman

15. Mext SIPP

Mext SIPP memudahkan masyarakat untuk mengetahui jadwal sidang dan denda tilang di Pengadilan Negeri Wates melalui handphone yang berbasis android dengan mengunduh aplikasi melalui playstore



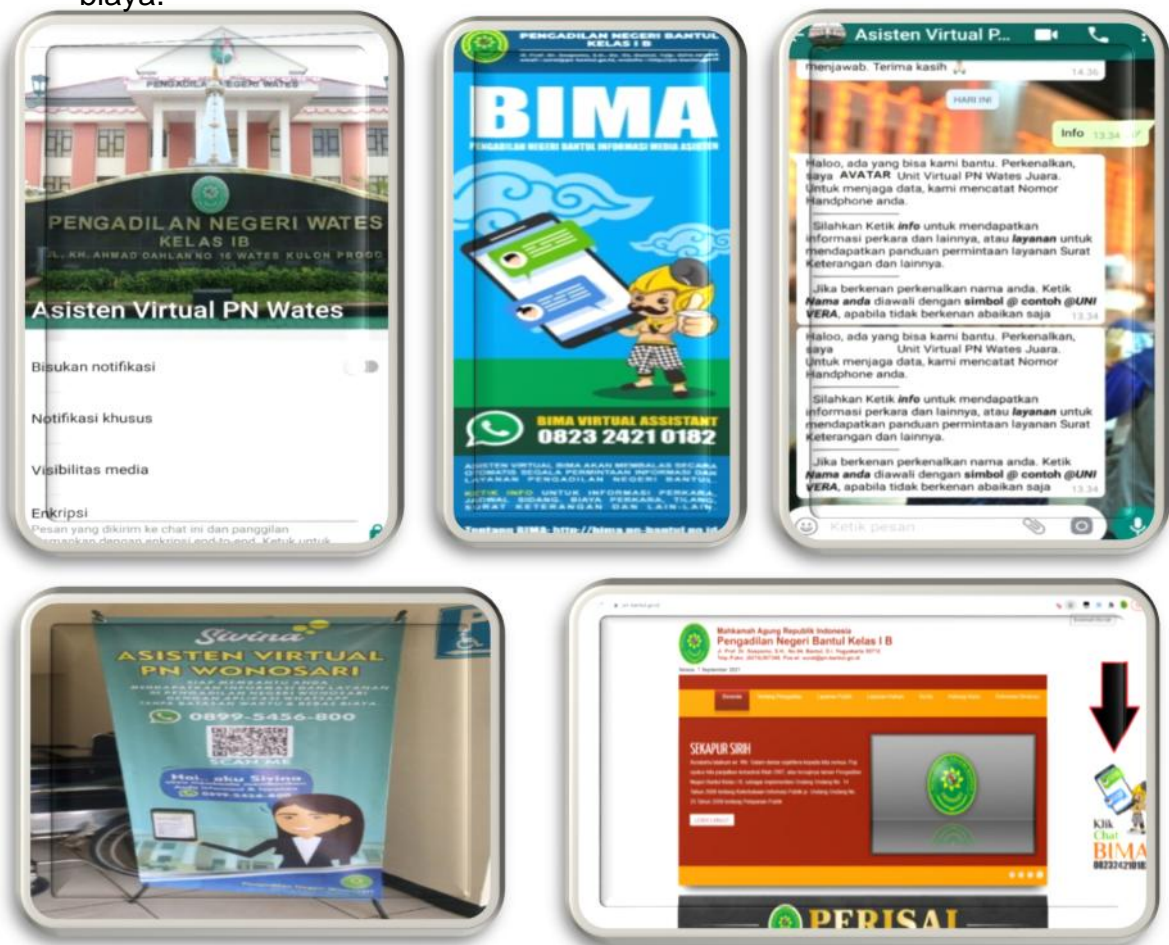
Jadwal sidang

Cek denda tilang

Gambar 5.25 : Inovasi Mext SIPP di Pengadilan Negeri Wates

16. AVATAR (Asisten Virtual) , Sivina dan Bima

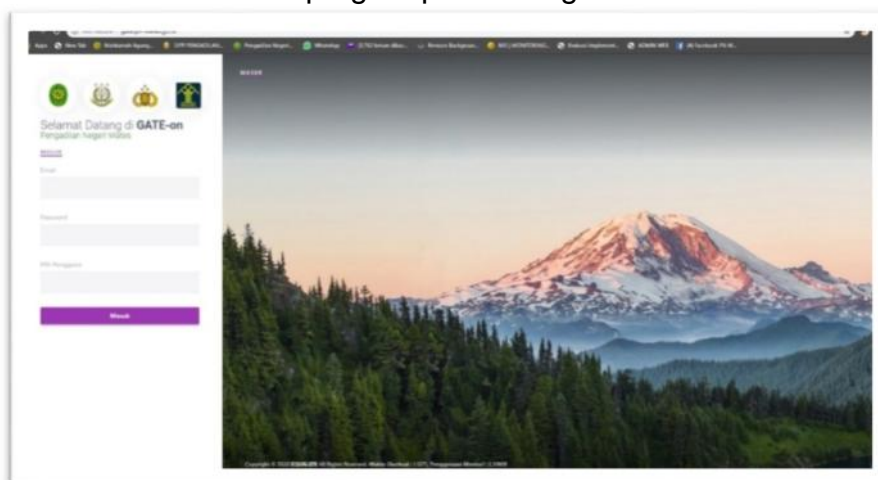
AVATAR (Asisten Virtual Pengadilan Negeri Wates Juara), Sivina di Pengadilan Negeri Wonosari dan Bima di Pengadilan Negeri Bantul Sebelum adanya inovasi, untuk mendapatkan informasi dan layanan terkait pengadilan, masyarakat harus datang ke kantor pengadilan. Sesudah adanya inovasi, untuk mendapatkan informasi dan layanan terkait pengadilan, informasi perkara, biaya perkara, jadwal persidangan, tilang, statistik, anggaran, kinerja pengadilan dan informasi yang lain masyarakat tidak perlu datang ke kantor pengadilan, cukup bertanya dengan Whatsapp dan memudahkan masyarakat untuk mengetahui informasi seputar pelayanan di Pengadilan Negeri Wates (AVATAR) dan Pengadilan Negeri Wonosari (Sivina) serta Pengadilan Negeri Bantul (BIMA) dengan cara chat langsung melalui aplikasi whatsapp, atau scan barcode yang nantinya langsung terhubung ke akun AVATAR ataupun SIVINA dan BIMA Akan melayani selama 24 jam, 7 hari kerja dan bebas biaya.



Gambar 5.26 : Inovasi Avatar (PN Wates), SIVINA (PN Wonosari), dan Bima (PN Bantul)

17. Gate-On (Geledah Sita Tahanan Online)

Gate-On (Geledah Sita Tahanan Online) yang bisa diakses melalui website, dengan membuka alamat <http://gate.pn-wates.go.id/>



Gambar 5.27 : Inovasi Gate-On (Geledah Sita Tahanan Online) di Pengadilan Negeri Wates

18. Pelayanan Ramah Difabel

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang disabilitas, fasilitas tersebut ditujukan untuk lebih menjamin kehormatan, kemajuan perlindungan, pemberdayaan, penegakan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.

Pengadilan Tinggi Yogyakarta telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor : W13-U/252/SK/KPT/XI/2020 tanggal 05 November 2020 tentang Penerapan Pelayanan terhadap Penyandang Disabilitas Khususnya Tuna Netra dan Tuna Rungu yang Berhadapan dengan Hukum pada Pengadilan Negeri se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Yogyakarta. Kebijakan tersebut bertujuan agar Pengadilan Negeri se- wilayah Pengadilan Tinggi Yogyakarta memiliki pelayanan khusus bagi penyandang disabilitas dan agar memiliki tingkat aksesibilitas yang seragam dalam melayani penyandang disabilitas. Kelima pengadilan yang dimaksud antara lain Pengadilan Negeri Yogyakarta, Pengadilan Negeri Sleman, Pengadilan Negeri Bantul, Pengadilan Negeri Wonosari, dan Pengadilan Negeri Wates.

Fasilitas tersebut antara lain guiding block, ramp, handrail, dokumen braille, toilet, hingga Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi

Yogyakarta. Adapun fasilitas yang disediakan di Pengadilan Negeri se D.I. Yogyakarta adalah :

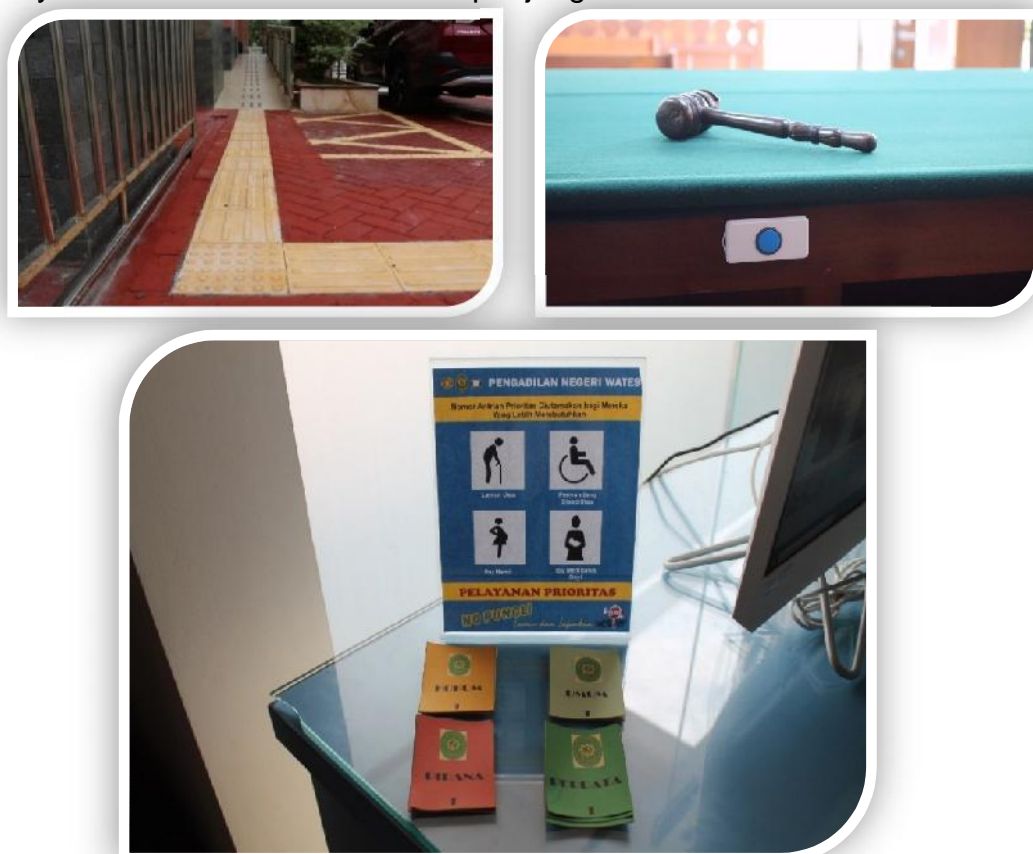
- a. Kursi Roda
- b. Tongkat Kruk
- c. Kursi tunggu prioritas untuk penyandang disabilitas
- d. Toilet untuk penyandang disabilitas
- e. Jalur Difable
- f. Parkir difable



Gambar 5.28 : Beberapa Fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas Di PT Yogyakarta dan PN Yogyakarta

Pelayanan Ramah Difabel PN Wonosari, masyarakat pencari keadilan dengan kebutuhan khusus tuna netra lebih mudah ketika memasuki gedung pengadilan, dengan disediakannya guiding block dari jalan raya ke gedung pengadilan. Tersedia leaflet informasi berperkara dan layanan pengadilan dengan huruf Braille bagi tuna netra. Tersedia toilet khusus difable, yang memungkinkan penyandang disabilitas dapat buang air kecil atau besar dengan nyaman. Tersedia video layanan pengadilan yang disajikan dengan bahasa isyarat untuk tuna rungu dan pengadilan menyediakan alat bantu jalan seperti kursi roda dan kruk, serta alat bantu pendengaran.

Di Pengadilan Negeri Wates, Pengunjung Disabilitas lebih mudah lagi menjangkau Pengadilan Negeri Wates karena terdapat Guiding Block, mereka juga dipermudah dengan sarana meminta bantuan yang lebih cepat dan efisien ketika di kamar mandi difable terkunci atau terjadi sesuatu di ruang sidang serta bagi pengunjung berkebutuhan khusus dapat langsung terlayani tidak memerlukan antrian panjang.



Gambar 5.29 : Beberapa Fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas di Pengadilan Negeri Wates



Gambar 5.30 : Fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas di Pengadilan Negeri Sleman

19. e-Bezoek Drive Thru

- ✓ Sebagai salah satu mitigasi resiko dalam menghadapi Pandemi COVID-19, pelayanan Pengadilan Negeri Yogyakarta menerapkan E-Bezoek Drive Thru.
- ✓ E-Bezoek Drive Thru adalah layanan permohonan izin besuk kepada terdakwa, yang diajukan melalui website dengan registrasi secara online, pihak mengupload dokumen yang dipersyaratkan, dan pihak Kantor Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam hal ini Kepaniteraan Pidana melakukan pengecekan dan verifikasi data, kemudian mengkonfirmasi by email dan whatsapp terkait waktu pengambilan izin dan pihak pemohon dapat mengambil izin besuk tersebut tanpa harus masuk ke Kantor Pengadilan Negeri Yogyakarta, cukup diambil dilayanan drive thru Pengadilan Negeri Yogyakarta.
- ✓ Jika evaluasi layanan ini dianggap efektif, layanan ini akan ditingkatkan kepada layanan lain yang sifatnya one day service, misalnya surat keterangan, salinan putusan dsb.
- ✓ Kendala : Kebijakan mitra kerja dalam hal ini RUTAN dan LAPAS yang memiliki kebijakan lain untuk meniadakan besuk secara offline diganti dengan besuk secara online.



Gambar 5.31 : Fasilitas e-Bezoek Drive Thru di Pengadilan Negeri Yogyakarta

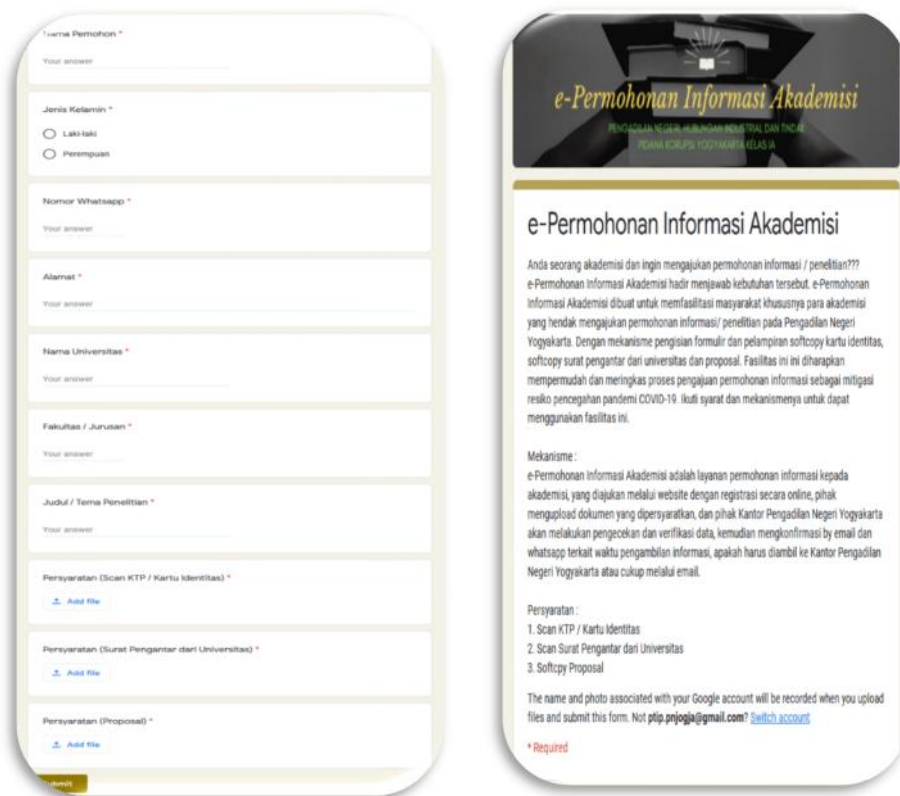
20. e-Permohonan Informasi Akademisi

e-Permohonan Informasi Akademisi dibuat untuk memfasilitasi masyarakat khususnya para akademisi yang hendak mengajukan permohonan informasi/ penelitian pada Pengadilan Negeri Yogyakarta. Dengan mekanisme pengisian formulir dan pelampiran softcopy kartu identitas, softcopy surat pengantar dari universitas dan proposal. Fasilitas ini diharapkan mempermudah dan meringkas proses pengajuan permohonan informasi sebagai mitigasi resiko pencegahan pandemi COVID-19.

Mekanisme : e-Permohonan Informasi Akademisi adalah layanan permohonan informasi kepada akademisi, yang diajukan melalui website dengan registrasi secara online, pihak mengupload dokumen yang dipersyaratkan, dan pihak Kantor Pengadilan Negeri Yogyakarta akan melakukan pengecekan dan verifikasi data, kemudian mengkonfirmasi by email dan whatsapp terkait waktu pengambilan informasi, apakah harus diambil ke Kantor Pengadilan Negeri Yogyakarta atau cukup melalui email.

Persyaratan :

1. Scan KTP / Kartu Identitas
2. Scan Surat Pengantar dari Universitas
3. Softcopy Proposal



Gambar 5.32 : Fasilitas e-Permohonan Informasi Akademisi di Pengadilan Negeri Yogyakarta

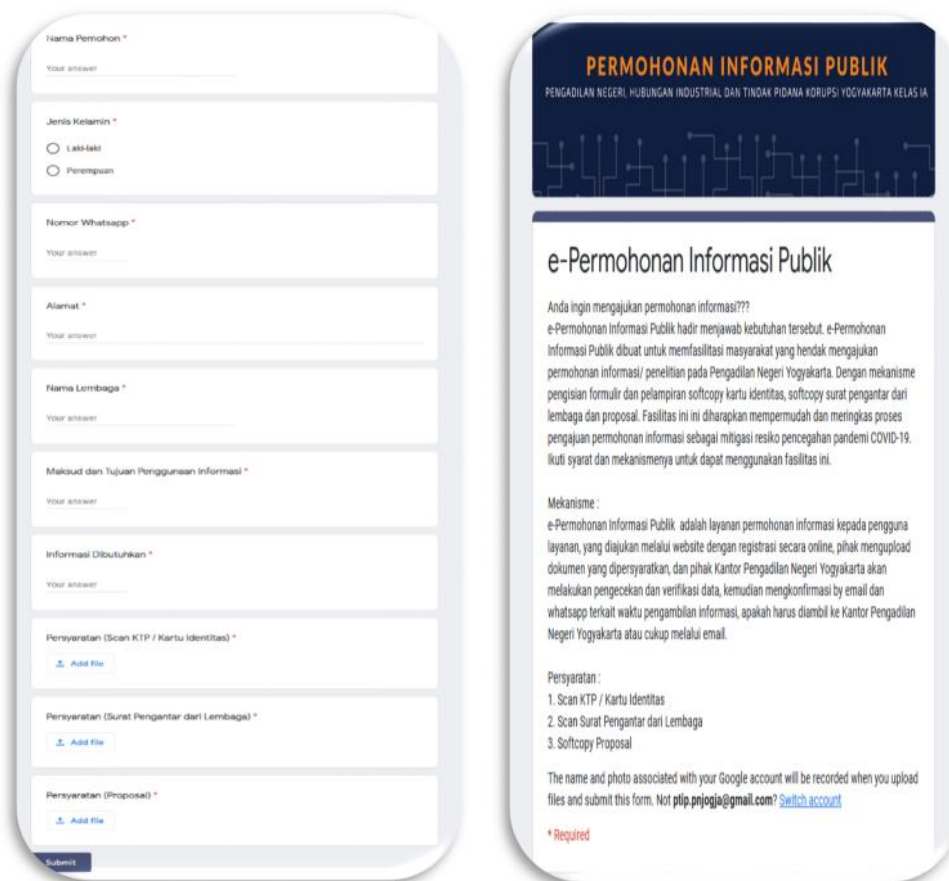
21. e-Permohonan Informasi PUBLIK

- ✓ e-Permohonan Informasi Publik hadir menjawab kebutuhan permohonan informasi. e-Permohonan Informasi Publik dibuat untuk memfasilitasi masyarakat yang hendak mengajukan permohonan informasi/ penelitian pada Pengadilan Negeri Yogyakarta. Dengan mekanisme pengisian formulir dan pelampiran softcopy kartu identitas, softcopy surat pengantar dari lembaga dan proposal. Fasilitas ini ini diharapkan mempermudah dan meringkas proses pengajuan permohonan informasi sebagai mitigasi resiko pencegahan pandemi COVID-19.
- ✓ Mekanisme :
e-Permohonan Informasi Publik adalah layanan permohonan informasi kepada pengguna layanan, yang diajukan melalui website dengan registrasi secara online, pihak mengupload dokumen yang dipersyaratkan, dan pihak Kantor Pengadilan Negeri Yogyakarta akan melakukan pengecekan dan verifikasi data, kemudian mengkonfirmasi by email dan whatsapp terkait waktu pengambilan informasi, apakah harus diambil ke

Kantor Pengadilan Negeri Yogyakarta atau cukup melalui email.

Persyaratan :

1. Scan KTP / Kartu Identitas
2. Scan Surat Pengantar dari Lembaga
3. Softcopy Proposal



Gambar 5.33 : Fasilitas e-Permohonan Informasi Publik di Pengadilan Negeri Yogyakarta

22. e-Posbakum

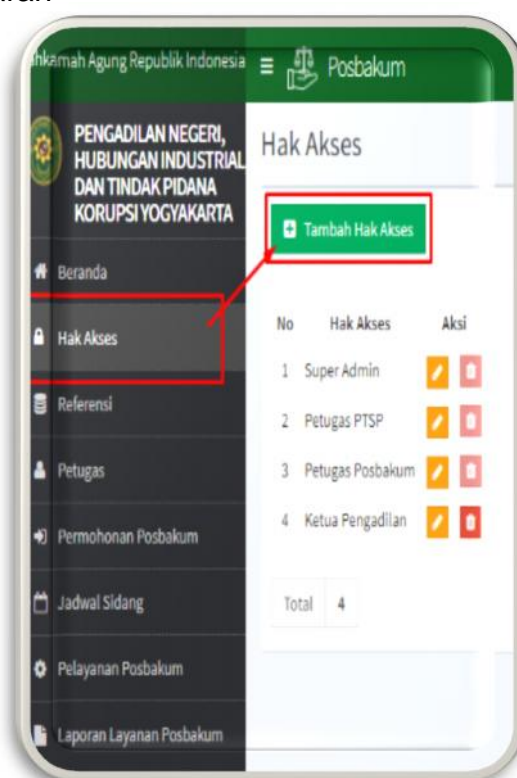
E-Posbakum adalah aplikasi yang digunakan untuk adminitrasi layanan Posbakum yang selama ini masih dilaksanakan secara manual.

Administrasi ini ditujukan untuk memonitoring pelaksanaan posbakum, baik dari jenis layanan, advise yang diberikan maupun jumlah pengguna layanan.

Dengan e-Posbakum ini diharapkan Panmud Hukum, Panitera, Kasub PTIP, PPK, Sekretaris maupun Ketua Pengadilan dapat memonitoring pelaksanaan Posbakum.

Adapun manfaat dari aplikasi ini adalah :

1. Bagi Panmud Hukum dan Kasub PTIP : Memudahkan dalam pelaporan.
2. Bagi PPK : monev realisasi anggaran posbakum
3. Bagi Sekretaris : monev realisasi anggaran posbakum
4. Bagi Panitera : monev pelaksanaan bantuan hukum kepada pengguna layanan agar tepat sasaran
5. Bagi Ketua : monev pelaksanaan bantuan hukum dan realisasi anggaran agar tepat sasaran



Gambar 5.34 : Fasilitas e-Posbakum di Pengadilan Negeri Yogyakarta

23. APLIKASI TRANSKRIP PERSIDANGAN

Aplikasi Transkrip Persidangan (ATP) yang diluncurkan oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta adalah sebuah inovasi aplikasi peradilan yang dibuat untuk merubah proses administratif peradilan dari konvensional menjadi berbasis teknologi informasi. Cara kerja ATP (Aplikasi Transkrip Persidangan) yaitu pengenalan suara pembicara dan dikonversi dalam bentuk text didalam komputer. Terdiri dari beberapa panel yang ditampilkan, dan pembicara dalam ruang sidang dapat berbicara bersamaan sekaligus.



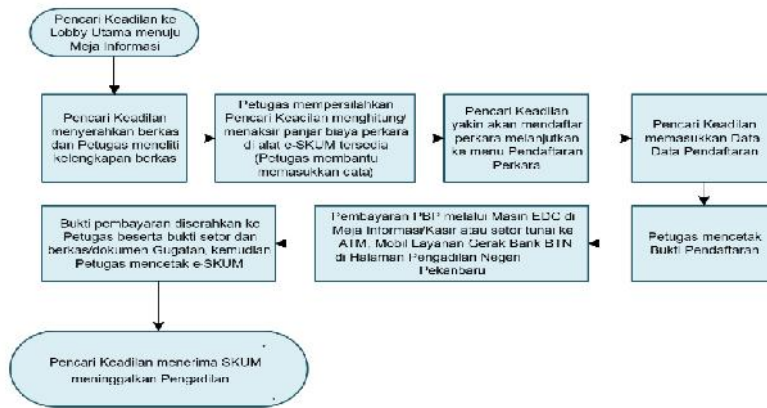
Gambar 5.35 : Fasilitas ATP di Pengadilan Negeri Yogyakarta

24.E- SKUM

e-SKUM adalah Sistem Aplikasi Menghitung Sendiri Panjar Biaya Perkara yang dilakukan oleh Para Pencari Keadilan di Loby Utama dengan menggunakan alat e-SKUM. Maksud dan Tujuan dalam penerapan Sistem Aplikasi e-SKUM adalah untuk memberikan pelayanan terbaik serta untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan tujuan akhir terciptanya peningkatan kualitas pelayanan publik di pengadilan agar pelayanan peradilan dapat terselenggara lebih cepat, sederhana dan berbiaya ringan.



Gambar 5.36 : Fasilitas E- SKUM di Pengadilan Negeri Yogyakarta



Gambar 5.37 : Alur Proses E- SKUM di Pengadilan Negeri Yogyakarta

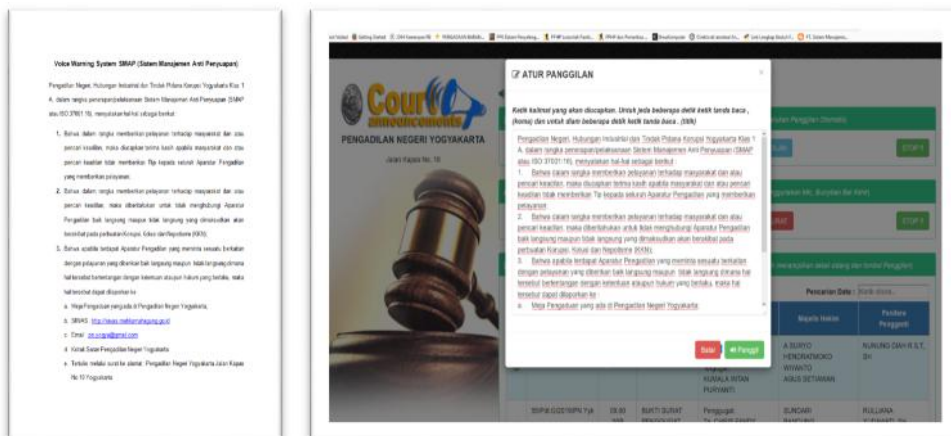
25.E-COURT & ERATERANG CORNER



Gambar 5.38 : Fasilitas E- COURT dan ERATERANG CORNER di Pengadilan Negeri Yogyakarta

26.VOICE WARNING SYSTEM (SMAP)

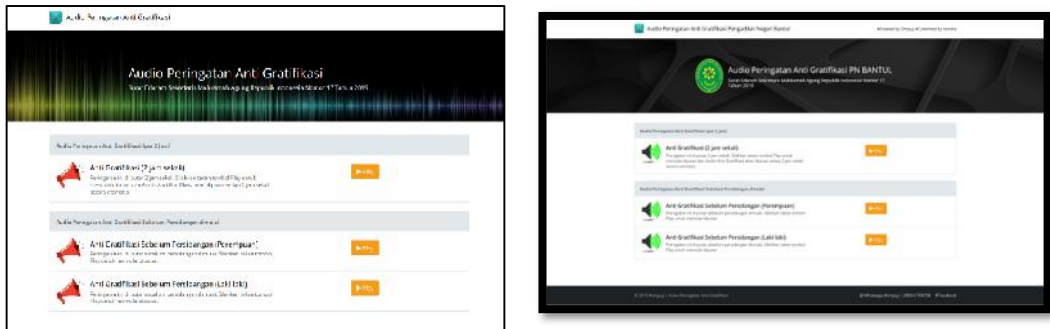
Voice Warning System SMAP(Sistem Manajemen Anti Penyuaan) diumumkan 1 jam sekali secara rutin di hari kerja.



Gambar 5.39 : Fasilitas SMAP di Pengadilan Negeri Yogyakarta

27. AUDIO GRATIFIKASI

Audio Peringatan Anti Gratifikasi diumumkan 2 jam sekali secara rutin di hari kerja.



Gambar 5.40 : Fasilitas Audio Gratifikasi di Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Bantul

28. JOGJA SMART SERVICE

Integrasi Aplikasi Layanan Pengadilan pada Aplikasi Jogja Smart Services (JSS), kerjasama dengan Diskominfo Kota Yogyakarta. Aplikasi JSS adalah jalur tambahan untuk menginformasikan dan memberikan pelaporan kejadian kedaruratan diluar jalur pelaporan konvensional (melalui telepon). Daftar layanan Pemerintah Kota yang dapat diakses langsung oleh masyarakat dengan mengedepankan pelayanan mandiri (Swalayan) dengan Single Sign On (SSO)



Gambar 5.41 : Fasilitas Jogja Smart Service di Pengadilan Negeri Yogyakarta

29. MEDIA INFORMASI DIGITAL

Informasi baik berupa prosedur layanan, standart pelayanan, persyaratan, video sosialisasi dan sebagainya disajikan dengan digital dan dapat diakses dengan QR Code baik pada lingkungan pengadilan maupun pada website.



Gambar 5.42 : Fasilitas Media Informasi Digital di Pengadilan Negeri Yogyakarta

E. Kegiatan Pelayanan Lainnya

1. Pelaksanaan SAKIP

Seiring dengan tujuan manajemen pemerintahan yang berfokus pada peningkatan akuntabilitas serta sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome), diperlukan penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas dan teratur dan efektif yang disebut dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan Pengadilan Negeri se D.I. Yogyakarta telah menyusun komponen-komponen SAKIP antara lain :

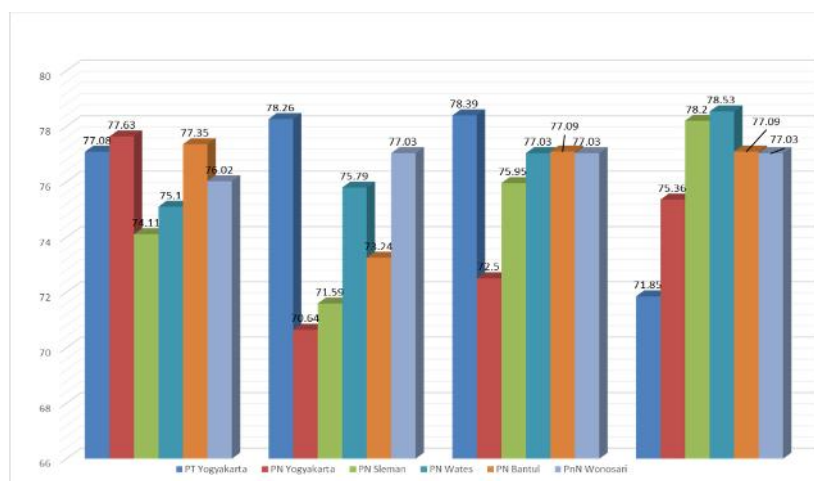
1. Rencana Strategis (Renstra).
2. Indikator Kinerja Utama (IKU).
3. Rencana Kinerja Tahunan (RKT).
4. Perjanjian Kinerja (PKT).
5. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).
6. Program Kerja (PK).

Pada periode 2022, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021 Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan Pengadilan Negeri se D.I Yogyakarta telah dilakukan penilaian, sebagai berikut :

Tabel 5.1 : Hasil Penilaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018 sd 2021

No	Satuan Kerja	LKjIP 2018		LKjIP 2019		LKjIP 2020		LKjIP 2021	
		Score	Nilai	Score	Score	Score	Nilai	Score	Nilai
1	PT Yogyakarta	77,08	BB	78,26	BB	78,39	BB	71,85	BB
2	PN Yogyakarta	77,63	BB	70,64	BB	72,50	BB	75,36	BB
3	PN Sleman	74,11	B	71,59	BB	75,95	BB	78,20	BB
4	PN Wates	75,10	B	75,79	BB	77,03	BB	78,53	BB
5	PN Bantul	77,35	BB	73,24	BB	77,09	BB	78,91	BB
6	PN Wonosari	76,02	BB	77,03	BB	77,03	BB	78,20	BB

Berdasarkan data diatas, nilai LKjIP pada Pengadilan Umum se Wilayah D.I. Yogyakarta yang mengalami kenaikan adalah Pengadilan Negeri Wates dan Pengadilan Negeri Wonosari, sedangkan peningkatannya dapat digambarkan dalam grafik sebagai berikut :



Grafik 5.1 : Nilai LKjIP pada Pengadilan Umum se Wilayah D.I. Yogyakarta periode 2018-2021

2. Pelaporan LHKPN

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) adalah daftar seluruh harta kekayaan Penyelenggara Negara yang dituangkan di dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

LHKPN memiliki dasar hukum sehingga setiap penyelenggara negara wajib melaporkan LHKPNnya. Pertama adalah Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Dasar hukum lainnya adalah Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor: KEP.07/KPK/02/2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pemeriksaan dan Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara.

Atas dasar hukum-dasar hukum tersebut, setiap Penyelenggara Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara atau pejabat publik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, wajib untuk bersedia diperiksa kekayaannya, baik sebelum menjabat, selama menjabat atau bahkan setelah menjabat. Penyelenggara negara juga wajib melaporkan harta kekayaannya pada saat pertama kali menjabat, mutasi, promosi, pensiun dan juga wajib dalam menginformasikan harta kekayaan.

Pengadilan Tinggi Yogyakarta sebagai lembaga yudikatif memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan LHKPN. Para Pejabat Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memiliki kewajiban untuk melaporkan LHKPN berjumlah 85 orang, sedang pejabat yang sudah melaporkan harta kekayaannya melalui laporan LHKPN sebanyak 85 orang yaitu :

1. Ketua	:	1 orang
2. Wakil Ketua	:	-
3. Hakim Tinggi	:	32 orang
4. Hakim Yustisial	:	10 orang
5. Hakim Ad Hoc Tipikor	:	3 orang
6. Panitera	:	1 orang
7. Sekretaris	:	1 orang
8. Panitera Muda	:	4 orang
9. Kepala Bagian	:	2 orang
10. Panitera Pengganti	:	31 orang
JUMLAH	:	85 orang

BAB VI

PENGAWASAN

A. Internal

1. Pengawasan Bidang

Hakim Tinggi Pengawas Bidang telah melaksanakan pengawasan ke masing-masing bidang dan telah membuat laporan hasil pengawasan dimaksud secara rutin setiap bulan. Hasil pengawasan telah dilaporkan kepada Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta selaku koordinator pengawasan paling lambat tanggal 10 setiap bulannya. Sebagai dasar pelaksanaan pengawasan bidang adalah :

1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/080/SK/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 145/KMA/SK/VIII/2007 tentang Pemberlakuan Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Di Lingkungan Badan Peradilan;
3. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor: W13-U/186/SK/KPT/X/2022 tanggal 14 Oktober 2022 tentang Penunjukan Hakim Tinggi Pengawas Bidang, Humas dan Protokol pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta;
4. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor : W13-U/38B/SK/KPT/II/2022 tanggal 25 Februari 2022 Perihal Tim Satuan Tugas Sistem Informasi Penelusuran Perkara (Tim Satgas SIPP) Pengadilan Tinggi Yogyakarta;

2. Pengawasan Reguler

Pengadilan Tingkat Banding selaku *Voorpost* Mahkamah Agung RI harus dapat memastikan implementasi fungsi pengawasan dan pembinaan sebagai atasan langsung terhadap bawahannya sebagaimana termuat dalam Paket Kebijakan tentang Pengawasan dan Pembinaan dalam PERMA Nomor 7,8 dan 9 Tahun 2016.

Pada tahun 2022, Pemeriksaan dan Pengawasan ke Pengadilan Tingkat Pertama telah dilaksanakan Tim Pengawas dan Pemeriksa Pengadilan Tinggi Yogyakarta sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor: W13-U/38/SK/KPT/II/2022 tanggal 25 Februari 2022 tentang Penunjukkan Tim Pengawasan pada Pengadilan Tingkat Pertama di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Yogyakarta. Selanjutnya untuk menindaklanjuti surat keputusan tersebut, Pemeriksaan dan Pengawasan ke Pengadilan Tingkat Pertama telah dilaksanakan ke lima Pengadilan Negeri di Wilayah D.I. Yogyakarta, yaitu:

No	Pengadilan		Semester 1	Semester 2
1.	Pengadilan Yogyakarta	Negeri	30 Juni 2022 dan 1 Juli 2022	24 s/d 25 Oktober 2022
2.	Pengadilan Sleman	Negeri	4 s/d 5 Juli 2022	26 s/d 27 Oktober 2022
3.	Pengadilan Wates	Negeri	12 s/d 13 Juli 2022	24 s/d 25 Oktober 2022
4.	Pengadilan Wonosari	Negeri	13 s/d 14 Juli 2022	27-28 Oktober 2022
5.	Pengadilan Bantul	Negeri	12 s/d 13 Juli 2022	27 s/d 28 Oktober 2022

Tabel 6.1 : Jadwal Pemeriksaan dan Pengawasan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Tahun 2022

Selain itu, kegiatan pembinaan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta ke Pengadilan Tingkat Pertama juga telah dilaksanakan secara daring pada tanggal 23 September 2022

B. Evaluasi

Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan Pengadilan Negeri se- Wilayah Hukum D.I. Yogyakarta mengadakan rapat berjenjang untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi tiap bagian agar semua tugas dan fungsi masing-masing bagian berjalan dengan baik untuk mencapai tujuan organisasi yang sama. Rapat berjenjang dimulai dari :

1. Rapat tiap panmud/subbagian;
2. Rapat tiap panmud/subbagian bersama hakim pengawas bidang;
3. Rapat kepaniteraan/kesekretariatan;

4. Rapat bulanan yang dihadiri oleh seluruh pegawai.

Rapat berjenjang ini masing-masing dilaksanakan minimal 1 (satu) bulan sekali. Rapat berjenjang merupakan bagian dalam sistem akreditasi penjaminan mutu yang mensyaratkan untuk setiap satker pada Mahkamah Agung dan peradilan dibawahnya untuk melaksanakan sistem tersebut, yang nantinya hasil rapat berjenjang tersebut akan dibawa kedalam rapat rutin bulanan/briefing. Rapat rutin bulanan/briefing membahas berbagai persoalan dan mengevaluasi hasil temuan dari Hakim Pengawas Bidang, permasalahan di tingkat kepaniteraan/kesekretariatan, dan lain-lain. Rapat ini diharapkan bisa menjadi tolak ukur dalam menghadapi rapat bulanan yang akan dilaksanakan pada bulan ini juga. Hasil evaluasi tersebut, kemudian dilakukan perbaikan secara komprehensif dan menyeluruh oleh masing-masing bidang. Temuan-temuan atau ketidaksesuaian dari hasil pengawasan regular oleh Tim Pengawas dan Pemeriksa Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sudah ditindaklanjuti oleh Pengadilan Tingkat Pertama dan dilakukan evaluasi oleh Tim Pengawas dan Pemeriksa Pengadilan Tinggi Yogyakarta.

BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian Laporan Tahunan 2022 sebagaimana disampaikan di depan dapat memberikan gambaran secara umum tentang keadaan dari Pengadilan Tinggi Yogyakarta beserta Pengadilan Negeri se Wilayah D.I. Yogyakarta, antara lain:

1. Percepatan penyelesaian perkara baik di tingkat banding maupun tingkat pertama telah dilaksanakan secara maksimal meskipun masih terdapat beberapa kendala teknis terutama dalam hal penyesuaian dengan kondisi pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dalam hal sistem kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam tatanan normal baru.
2. Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik telah diupayakan secara baik didukung dengan inovasi-inovasi pelayanan publik yang telah dikembangkan dan diterapkan pada semua Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan Pengadilan Negeri se D.I. Yogyakarta. Pada masing-masing pengadilan sudah menerapkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
3. Pembinaan dan pengawasan internal pada masing-masing satuan kerja Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan Pengadilan Negeri se D.I. Yogyakarta telah ditunjuk dan di SK-kan Hakim Pengawas Bidang serta telah dijalankan dengan baik dan terus menerus dikembangkan sehingga lebih efektif dan obyektif.
4. Pengadilan Tinggi Yogyakarta telah melaksanakan pembinaan, pengawasan, monitoring dan surveilan ke Pengadilan Negeri di bawahnya.
5. Pelaksanaan anggaran dan administrasinya telah dilaksanakan dengan baik dan tertib sesuai dengan besarnya anggaran yang telah ditetapkan dalam DIPA satuan kerja masing-masing serta telah dilakukan evaluasi secara berkala sehingga prosentase realisasi setiap tahunnya tinggi tercapai 99 % lebih.
6. Kebutuhan akan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan serta menunjang kompetensi sumber daya manusia bagi hakim dan pegawai masih

sangat diperlukan. Hal ini untuk meningkatkan kinerja serta pelayanan bagi masyarakat dimana diperlukan tenaga kerja yang profesional.

7. Dalam rangka mendukung pelaksanaan kebijakan pimpinan maupun tuntutan publik dibutuhkan peningkatan sarana dan prasarana yang saat ini masih kurang dalam spesifikasinya.
8. Dalam rangka mendukung program-program Mahkamah Agung RI yang berjalan dan guna meningkatkan fungsi pelayanan, masing-masing pengadilan menjalin kerjasama dengan stakeholder sesuai bidang masing-masing.

B. Saran dan Rekomendasi

1. Perlu adanya penambahan anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta, antara lain : Ruang Aula, Kendaraan Dinas, meubelair serta peralatan dan mesin.
2. Konsistensi dan suksesnya pelaksanaan kegiatan maupun program-program berdasarkan perencanaan, juklak, juknis maupun peraturan yang ada sangat bergantung pada komitmen pimpinan, komunikasi internal setiap pemangku kepentingan dan anggaran.
3. Pelaksanaan kegiatan setiap bidang perlu direview dan disesuaikan tupoksi sehingga tidak terjadi tumpang tindih penanganan program dan kegiatan.
4. Penunjukan personil/pegawai pada setiap kegiatan perlu memperhatikan tingkat kompetensi, dedikasi, tanggungjawab terhadap pelaksanaan setiap program dan kegiatan.
5. Perlunya peningkatan kualitas SDM bidang teknis untuk menunjang kinerja penyelesaian perkara, baik berupa pendidikan dan pelatihan secara berkala ataupun bimbingan teknis untuk Panitera Pengganti, Jurusita dan Jurusita Pengganti.
6. Perlu penambahan tenaga pegawai, baik untuk menggantikan pegawai yang memasuki masa pensiun, maupun untuk pekerjaan yang memerlukan teknis tertentu, antara lain: pranata komputer, arsiparis dan pustakawan.

DAFTAR LAMPIRAN

Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta No. W13.U/217/SK/KPT/XII/2022
Tanggal 27 Desember 2021 tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan
Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Tahun 2022.



PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA
NOMOR : W13.U/ 217 / SK / KPT / XII / 2022

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA TAHUN 2022

KETUA PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan tatanan organisasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* dan *accountability*, maka setiap institusi harus menyusun laporan pelaksanaan kegiatan yang digunakan untuk melaporkan perkembangan dan pencapaian serta prestasi yang telah diraih oleh organisasi selama 1 tahun sebelumnya;
 - b. Bahwa data dan informasi yang akurat menjadi kunci keberhasilan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik guna terciptanya budaya kerja yang profesional, transparan, efisien dan efektif;
 - c. Bahwa dalam rangka penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan (Laporan Tahunan) pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta Tahun 2022, dipandang perlu membentuk Tim Penyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan;
 - d. Bahwa yang namanya tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk menyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Tahun 2022.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 perubahan ke 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi;
 5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
 6. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2876/SEK/OT.01.1/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA TAHUN 2022.

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Tahun 2022 dengan susunan sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;
- KEDUA : Tim Penyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Tahun 2022 mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Mengumpulkan, menginventarisir dan mengolah data pendukung yang diperlukan untuk penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan;
 2. Menyusun buku Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Tahun 2022 sesuai dengan outline yang ditetapkan oleh Sekretaris Mahkamah Agung Republik dan memperbanyak sesuai kebutuhan;
 3. Melaporkan hasil penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022 kepada Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta;
 4. Mengirimkan softcopy Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022 ke Biro Perencanaan dan Organisasi Mahkamah Agung RI melalui email: renogevlap2@gmail.com dan menyerahkan/mengirimkan hardcopy-nya pada minggu pertama pada bulan Januari 2023;
- KETIGA : Segala biaya yang berkaitan dengan kegiatan Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Tahun 2022 dibebankan pada DIPA Pengadilan Tinggi Yogyakarta Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 27 Desember 2022

Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta



SETYAWAN HARTONO, S.H., M.H.
NIP. 195804011984031004

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. YM. Ketua Mahkamah Agung RI;
2. YM. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
3. YM. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI;
4. Kepala Badan Urusan Administrasi;
5. Kepala Badan Pengawasan;
6. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi.
- 7.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA

NOMOR : W13.U/217/SK/KPT/XII/2022

TANGGAL : 27 Desember 2021

NO	NAMA	JABATAN DINAS	JABATAN / BAGIAN DALAM TIM	TUGAS
1.	Setyawan Hartono, S.H., M.H.	Ketua	Penanggung Jawab	<p>a. Membentuk Tim Penyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022.</p> <p>b. Mengarahkan dan membina Ketua Tim, Sekretaris dan Anggota Tim Penyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022;</p> <p>c. Mensosialisasikan langkah-langkah penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan sesuai outline yang ditetapkan oleh Sekretaris Mahkamah Agung RI;</p> <p>d. Mengawasi pelaksanaan penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2022.</p>
2.	Eddy Risdianto, S.H.,M.H	Hakim Tinggi	Ketua Tim	<p>a. Mengkoordinir dan memberi petunjuk kepada anggota tim tentang penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan;</p> <p>b. Menerima hasil pengumpulan dan pengolahan data yang telah berbentuk Laporan dari Sekretaris Tim;</p> <p>c. Melaporkan progress dan hasil penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan kepada Penanggung jawab.</p>
3.	Dedy Sulaksono, S.H., M.M. Rio Kumitias Ambarsakti, S.H.	Sekretaris Panitera	Sekretaris 1 Sekretaris 2	<p>a. Berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Ketua Tim tentang penyusunan Laporan pelaksanaan Kegiatan;</p> <p>b. Mengumpulkan data yang telah dituangkan dalam bentuk narasi dari semua tim untuk disusun menjadi laporan;</p> <p>c. Melaporkan progress dan hasil penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan kepada Ketua Tim.</p>
4.	Rosyidatus Syarifeini, S.Psi. Ratna Dewanti, SH Andy Setiawan, SH.	Kabag Perencanaan dan Kepegawaian Panitera Pengganti Analisis Perkara Peradilan	Koordinator Tim 1 Anggota Anggota	<p>Penyusunan Narasi Halaman Muka dan Bab I</p> <p>a. Koordinator Tim mengkoordinir Anggota dan melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data yang dibutuhkan serta membuat narasi Laporan Pelaksanaan Kegiatan sesuai outline pada bagian :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Halaman Kegiatan - Profil Pimpinan - Kata Pengantar dan - Bab I Pendahuluan <p>b. Menyerahkan data yang telah dikumpulkan dan narasi laporan kepada</p>

NO	N A M A	JABATAN DINAS	JABATAN / BAGIAN DALAM TIM	TUGAS
				Sekretaris Tim;
5.	Didit Mahatmanta, SH. Sutoto, S.H. Siti Ria Rukmana, A.Md	Panitera Muda Tipikor Panitera Pengganti Pengelola Perkara	Koordinator Tim 2 Anggota Anggota	Penyusunan Narasi Keadaan Perkara di Peradilan Umum a. Koordinator Tim mengkoordinir Anggota dan melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data yang dibutuhkan serta membuat narasi Laporan Pelaksanaan Kegiatan sesuai outline yaitu pada : Bab II A Keadaan Perkara di Peradilan Umum (Perkara Perdata, Pidana, dan Tipikor) - Keadaan Perkara Tingkat Pertama - Keadaan Perkara Tingkat Banding - Keadaan Perkara Tingkat Kasasi - Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali b. Menyerahkan data yang telah dikumpulkan dan narasi laporan kepada Sekretaris Tim;
6.	Floriberta Setyowati, SH., MH. Suhardi, S.H. Alfiansyah Azhar, S.H.	Panitera Muda Pidana Panitera Pengganti Analisis Perkara Peradilan	Koordinator Tim 3 Anggota Anggota	Penyusunan Narasi Penyelesaian Perkara Peradilan Umum a. Koordinator Tim mengkoordinir Anggota dan melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data yang dibutuhkan serta membuat narasi Laporan Pelaksanaan Kegiatan sesuai outline yaitu pada : Bab II B Penyelesaian Perkara di Peradilan Umum (Perkara Perdata, Pidana, dan Tipikor) : - Jumlah sisa perkara yang diputus - Jumlah perkara yang diputus tepat waktu - Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK - Jumlah perkara perdata yang berhasil dimediasi - Jumlah perkara anak yang berhasil melalui diversifikasi b. Menyerahkan data yang telah dikumpulkan dan narasi laporan kepada Sekretaris Tim;
7.	Suyantoko, SH. Ratmiyati, SH.	Panitera Muda Perdata Panitera Pengganti	Koordinator Tim 4 Anggota	Penyusunan Narasi Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikasi ISO Pengadilan) / Layanan Hukum :
	Merina Kusumawati, SH., M.H.	Analisis Perkara Peradilan	Anggota	a. Koordinator Tim mengkoordinir Anggota dan melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data yang dibutuhkan serta membuat narasi Laporan

NO	NAMA	JABATAN DINAS	JABATAN / BAGIAN DALAM TIM	TUGAS
				Pelaksanaan Kegiatan sesuai outline yaitu pada : Bab II C Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikasi ISO Pengadilan) / Layanan Hukum : - Posbakum (Satker yang mendapat alokasi dan realisasi anggaran) - Sidang keliling / pelayanan terpadu - Perkara prodeo (pembebasan biaya perkara) b. Menyerahkan data yang telah dikumpulkan dan narasi kepada Sekretaris Tim;
8.	Nur Hasanah, SH., MBA. RR. Nurahayu Muliawatiningsih, SH Deby Aryanto Syahputra, S.Psi.	Kasubag Kepegawaian dan TI Analis Kepegawaian Muda Analis Sumber Daya Manusia Aparatur	Koordinator Tim 5 Anggota Anggota	Penyusunan Narasi Sumber Daya Manusia : a. Koordinator Tim mengkoordinir Anggota dan melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data yang dibutuhkan serta membuat narasi Laporan Pelaksanaan Kegiatan sesuai outline pada Bab III yaitu : Sumber Daya Manusia - Mutasi - Promosi Pensiun - Diklat (SDM Teknis/Non Teknis yg telah mengikuti Diklat) b. Menyerahkan data yang telah dikumpulkan dan narasi laporan kepada Sekretaris Tim;
9.	Rina Widiastuti, S.E., M.B.A. Toni Subagyo, S.H. Nanda Aprilia Suri, A.md.Ak.	Kasubag Keuangan dan Pelaporan Analis Pengelolaan Keuangan APBN Pengelola Barang Milik Negara	Koordinator Tim 6 Anggota Anggota	Penyusunan Narasi Pengelolaan Keuangan : a. Koordinator Tim mengkoordinir Anggota dan melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data yang dibutuhkan serta membuat narasi Laporan Pelaksanaan Kegiatan sesuai outline yaitu pada : Bab IV A Pengelolaan Keuangan - Laporan Realisasi Anggaran Belanja - Laporan Realisasi Pengelolaan Pendapatan PNB b. Menyerahkan data yang telah dikumpulkan dan narasi laporan kepada Sekretaris Tim;
10.	Erwan Hermawan, S.Kom. Muhammad Sholeh Nazaruddin, A.Md. Dion Satya Yudha	Kasubag TU RT Pustakawan PPNPN	Koordinator Tim 7 Anggota Anggota	Penyusunan Narasi Pengelolaan Sarana dan Prasarana : a. Koordinator Tim mengkoordinir Anggota dan melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data yang dibutuhkan serta membuat narasi Laporan Pelaksanaan Kegiatan sesuai outline yaitu pada :

NO	NAMA	JABATAN DINAS	JABATAN/ BAGIAN DALAM TIM	TUGAS
				Bab IV B Pengelolaan Sarana dan Prasarana - Sarana dan Prasarana Tanah, Gedung Dan Kendaraan - Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung - Sarana & Prasarana Penanganan Pencegahan Covid 19 b. Menyerahkan data yang telah dikumpulkan dan narasi kepada Sekretaris Tim;
11.	Suramin, S.H., M.H. Maria Angelina Anom HC, SH., M.Kn. Idzni Maizani, A.Md.	Panitera Muda Hukum Analisis Perkara Peradilan Pengadministrasian Registrasi Perkara	Koordinator Tim 8 Anggota Anggota	Penyusunan Narasi Pengelolaan Teknologi Informasi : a. Koordinator Tim mengkoordinir Anggota dan melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data yang dibutuhkan serta membuat narasi Laporan Pelaksanaan Kegiatan sesuai outline yaitu pada: Bab IV C Pengelolaan Teknologi Informasi - Implementasi e-court di lingkungan Peradilan Umum - Implementasi SIPP di lingkungan Peradilan Umum b. Menyerahkan data yang telah dikumpulkan dan narasi laporan kepada Sekretaris Tim;
12.	Haryanto, SH., MH. Suparlan, SH. Alfina Sauqi Anwar, SH.	Hakim Tinggi Kabag Umum dan Keuangan Analisis Perkara Peradilan	Koordinator Tim 9 Anggota Anggota	Penyusunan Narasi Peningkatan Pelayanan Publik : a. Koordinator Tim mengkoordinir Anggota dan melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data yang dibutuhkan serta membuat narasi Laporan Pelaksanaan Kegiatan sesuai outline pada yaitu : Bab V Peningkatan Pelayanan Publik - Akreditasi Penjaminan Mutu - Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) - Inovasi Pelayanan Publik b. Menyerahkan data yang telah dikumpulkan dan narasi laporan kepada Sekretaris Tim;
13.	Mahmud Fauzie, SH., MH. Mega Annisa, S.Kom. Tri Kusumaningrum Rahmawati, S.M.	Hakim Tinggi Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Analisis Tata Laksana	Koordinator Tim 10 Anggota Anggota	Penyusunan Narasi Pengawasan : a. Koordinator Tim mengkoordinir Anggota dan melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data yang dibutuhkan serta membuat narasi Laporan Pelaksanaan Kegiatan sesuai outline yaitu pada : Bab VI Pengawasan A Internal B Evaluasi

NO	NAMA	JABATAN DINAS	JABATAN / BAGIAN DALAM TIM	TUGAS
				b. Menyerahkan data yang telah dikumpulkan dan narasi laporan kepada Sekretaris Tim;
14.	Sugito, SH. Teguh Wiyono, SH. Ferry Budiman, S.Si.	Kasubag Rencana Program dan Anggaran Analisis Perencanaan Penyusun RKA	Koordinator Tim 11 Anggota Anggota	1. Perencanaan Laporan, Penggandaan, Distribusi dan Pengarsipan 2. Penyusunan Narasi Daftar Isi, Kesimpulan, Rekomendasi dan Daftar Pustaka 3. Menerima dan mengumpulkan data dan narasi dari Sekretaris Tim untuk dikompilasi menjadi Laporan Pelaksanaan Kegiatan.
15.	Guntur Purwanto Joko Lelono, SH. Erwin Fajar Saputra	Hakim Tinggi PPNPN	Koordinator Tim 12 Anggota	Berkoordinasi dengan Koordinator Tim 11 untuk Pembuatan Cover, Penyuntingan dan Layout Isi Laporan Pelaksanaan Kegiatan

Yogyakarta, 27 Desember 2022

Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta


SETYAWAN HARTONO, S.H., M.H.

NIP. 195804011984031004



PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA

Jl. Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH.,
Wojo, Bangunharjo, Sewon, Bantul, Yogyakarta - 55187
Telp. (0274) 4396412, Fax. (0274) 4396415,
Email: pengadilan_tinggi_yogyakarta@yahoo.co.id
Website: www.pt-yogyakarta.go.id